

JURNAL

KAJIAN WILAYAH

Volume 6

Nomor 1, Juni 2015

DAFTAR ISI

THE DUTCH'S 'FLOATING LIFE' ON DESHIMA ISLAND: A GLOOMY SIDE OF DUTCH-JAPAN RELATIONSHIP DURING THE TOKUGAWA PERIODE, 1715-1790	
Abdul Wahid	1 - 16
INDONESIAN MIGRATION INDUSTRY IN TAIWAN: SOME SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND IMPROVEMENT CHALLENGES	
Rudolf Yuniarto	17-33
PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK DI RAKHINE MYANMAR TAHUN 2012–2013	
Sandy Nur Ikfal Raharjo	35-51
PERKEMBANGAN MUSIK ROCK DI KOTA MALANG TAHUN 1970–2000-AN: KAJIAN GLOBALISASI DAN EKSISTENSI SOSIAL-BUDAYA	
Yovi Ardivitiyanto	53-69
DARI DUKUNGAN HINGGA PROTES: Dinamika Respons NGO terhadap Upaya Pengembangan Energi Terbarukan di Republik Ceko	
Kurnia Novianti	71-84
MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA	
Choerunisa Noor Syahid	85-92
TINJAUAN BUKU KRITIK TERHADAP MODERNITAS	
Abdul Fikri Angga Reksa	93-99

JURNAL

KAJIAN WILAYAH

Volume 6

Nomor 1, Juni 2015

DDC: 302.4

Abdul Wahid

ARUS KEHIDUPAN ORANG BELANDA DI PULAU DESHIMA: SEBUAH SISI BURAM DARI HUBUNGAN JEPANG-BELANDA SELAMA PERIODE TOKUGAWA, 1715-1790

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 1-16

ABSTRAK

Untuk memperluas jaringan perdagangan dan keterlibatannya dalam ‘jaringan perdagangan Asia’, VOC berusaha menjalin kontak dengan Jepang yang saat itu dikenal sebagai penghasil komoditas berharga berupa tembaga dan kain sutra. Pada saat yang sama, Tokugawa Ieyasu muncul sebagai penguasa baru Jepang, yang rejimnya kemudian mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dikenal sebagai *Sakoku*, yaitu menutup Jepang dari dunia internasional untuk memperkuat situasi politik internal. Akibatnya hubungan diplomatik dan ekonomi Jepang dengan bangsa-bangsa dunia terputus total. Belanda (melalui VOC) – bersama dengan Cina dan Korea – merupakan pengecualian, karena Tokugawa memberikan mereka ijin dagang dan menjadikannya sebagai perantara untuk melihat perkembangan ‘dunia luar’. Meskipun demikian, para pegawai VOC harus membayar mahal hak istimewa tersebut karena mereka harus mengikuti aturan dan pengawasan yang ketat dari rejim Tokugawa. Mereka hanya diperbolehkan hidup dan tinggal di sebuah pulau buatan bernama *Deshima* yang terletak di teluk Nagasaki. Rejim Tokugawa menyediakan semua kebutuhan hidup mereka, namun sangat membatasi ruang gerak dan aktivitas mereka, terutama untuk mengakses daratan dan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dengan menggunakan sumber-sumber primer tercetak dan menggabungkannya dengan literatur mutakhir, makalah ini mengungkapkan kehidupan sehari-hari para pegawai VOC-Belanda di pulau tersebut, dan menganalisa makna penting ‘relasi yang aneh’ tersebut bagi hubungan politik dan ekonomis kedua bangsa tersebut.

Kata kunci: *VOC, Belanda, Tokugawa, Jepang, Deshima*

DDC: 304.8

Paulus Rudolf Yuniarto

INDUSTRI MIGRASI INDONESIA DI TAIWAN: BEBERAPA IMPLIKASI SOSIAL-EKONOMI DAN TANTANGAN PENINGKATAN

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 17-33

ABSTRAK

Kebijakan pengiriman tenaga kerja dan keputusan untuk bekerja keluar negeri terbukti telah memunculkan lembaga (aktor) parasit yang menanggung keuntungan dari proses penempatan tenaga kerja selain menimbulkan beban hutang bagi si pekerja. Walaupun kebijakan pengiriman tenaga kerja lumrah dilakukan negara dalam kondisi ketidakstabilan secara ekonomi, namun terdapat ketidakseimbangan posisi di antara para pelakunya. Hasil penelitian memperlihatkan industri pengiriman tenaga kerja (khususnya ke Taiwan) dikuasai oleh struktur aktor perantara (PJTKI dan agensi Taiwan), yang didukung oleh aturan masing-masing negara, berhak memonopoli biaya penempatan kerja dan potongan gaji yang harus dibayar oleh pekerja. Sistem ini sedikit banyak menguntungkan pihak perantara/agensi dan menyebabkan kerugian bagi pekerja, dalam bentuk hutang kepada agensi atau kepada pihak lain. Hutang menjadi kata kunci untuk ‘menundukan’ pekerja turut pada aturan yang diberlakukan sepihak dan menjerat mereka pada kondisi perbudakan. Implikasi lebih besar sistem penempatan pekerja ini, antara lain: perdagangan manusia dan pekerja kaburan, berkurangnya pengiriman uang (remitan), serta ketiadaan akses bantuan hukum bagi pekerja yang di hinggapi persoalan. Pekerja yang mengandalkan diri pada mekanisme hutang tiada ampun dijadikan subyek pemotongan gaji dan pungutan lainnya atas nama asuransi. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian kualitatif dan penelusuran pustaka, pada kurun waktu 2014, terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Kata kunci: hutang, perbudakan, industri pengiriman tenaga kerja, perantara (agensi)

DDC: 303.6

Sandy Nur Ikfal Raharjo

PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK DI RAKHINE MYANMAR TAHUN 2012–2013

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 35-51

ABSTRAK

Pada tahun 2012–2013, terjadi konflik komunal di Rakhine, Myanmar. Identitas agama antara minoritas Muslim dan Mayoritas Budha pun dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan. Tulisan ini mencoba menganalisis apakah perbedaan identitas agama tersebut benar-benar berperan sebagai faktor struktural/akar penyebab konflik Rakhine. Melalui studi pustaka, hasil kajian menunjukkan bahwa isu identitas agama telah dimainkan secara sengaja oleh aktor-aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dan mengakselerasi konflik, dalam rangka mengejar kepentingan riil mereka akan dominasi kekuasaan serta kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi kebijakan diskriminatif yang berkepanjangan dan tingkat ekonomi yang rendah sebagai faktor struktural penyebab konflik. Untuk mengoptimalkan proses resolusi konflik, kajian ini menyarankan para pemangku kepentingan agar memberdayakan kelompok biksu moderat dalam mempromosikan dialog antaragama, melibatkan pihak ketiga yang imparial sebagai mediator serta menghapus semua kebijakan diskriminatif.

Kata kunci: Myanmar, identitas agama, konflik komunal

DDC: 306.4

Yovi Ardivitiyanto

**PERKEMBANGAN MUSIK *ROCK* DI KOTA MALANG TAHUN 1970–2000-AN:
KAJIAN GLOBALISASI DAN EKSISTENSI SOSIAL-BUDAYA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 53-69

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan musik *rock* di Kota Malang pada tahun 1970-an–2000-an. Di sisi lain, artikel ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh eksistensi musik *rock* sebagai budaya populer bagi kehidupan sosial-budaya kaum muda di Kota Malang tahun 1970-an–2000-an. Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang selain menggunakan sumber-sumber sekunder juga menggunakan sumber primer seperti koran sezaman, majalah sezaman, dan sumber lisan. Musik *rock* merupakan bagian dari produk budaya populer yang mulai berkembang pada tahun 1970-an. Kaum muda menjadi konsumen bagi keberadaan musik *rock* yang terus membudaya pada tahun 1970-an. Musik *rock* tidak hadir dan diterima begitu saja, namun melalui sebuah perjalanan eksistensi dari waktu ke waktu. Eksistensi musik *rock* dapat terlihat dari panggung-panggung pertunjukan dan industri rekaman. Dari eksistensi musik *rock* ini muncul sebuah pengaruh berupa gaya hidup, yang pada akhirnya diikuti oleh para penggemarnya. Di sisi lain, peran media massa sebagai alat penyebaran sangat efisien bagi suatu bentuk budaya yang bersifat populer. Hingga pada akhirnya *genre* musik *rock* ini mampu menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kata kunci: sejarah perkembangan, musik rock, eksistensi, budaya populer

DDC: 304.2

Kurnia Novianti

**DINAMIKA RESPONS NGO TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN ENERGI
TERBARUKAN DI REPUBLIK CEKO**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 71-84

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada respons yang dinamis dari NGO lingkungan terkait pengembangan energi terbarukan di Republik Ceko. Data menunjukkan bahwa respons tersebut beragam. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi tidak sedikit pula yang mengekspresikan ketidaksetujuannya dalam bentuk protes dan disampaikan secara langsung melalui media. Dinamika ini menunjukkan bahwa setiap NGO memiliki interpretasi dan kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai justru kontradiktif dengan upaya pengembangan energi terbarukan. Dengan menggunakan perspektif resistensi, penulis melihat bahwa protes merupakan bentuk resistensi, yang berbeda dengan resistensi sehari-hari, diekspresikan melalui media. Perhatian penulis pada gerakan lingkungan setelah revolusi beludru (era transformasi bagi Ceko) menunjukkan bahwa NGO memilih menyuarakan aspirasi mereka, baik yang berasal dari organisasi maupun komunitas, dengan beragam metode atau strategi berdasarkan ideologi yang dimilikinya.

Kata kunci: dinamika respons, resistensi, NGO lingkungan, resistensi, energi terbarukan, Republik Ceko

DDC: 307.1

Choerunisa Noor Syahid

MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 85-92

ABSTRAK

Mobilitas mahasiswa adalah isu penting dalam dinamika global sekarang. Pada satu sisi, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akses mereka terhadap pasar tenaga kerja internasional sangat terbuka lebar. Sementara itu, pada sisi yang lain, dengan sumber daya dan jaringan yang dimiliki, mereka juga mempunyai peluang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik, termasuk yang berkaitan dengan persoalan sosial politik, baik yang terjadi di tanah air (Indonesia) maupun di bagian dunia lainnya. Dalam dua ranah tersebut, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi, studi ini akan meneliti aspek-aspek personal dan struktural yang melingkungi permasalahan mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda.

Kata kunci: mobilitas, Mahasiswa Indonesia, pendidikan tinggi, Belanda

TINJAUAN BUKU

KRITIK TERHADAP MODERNITAS

DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT

Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. California: Stanford University Press, xix + 282 hlm.

Abdul Fikri Angga Reksa

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 93-99

JURNAL

KAJIAN WILAYAH

Volume 6

Nomor 1, Juni 2015

DDC: 302.4

Abdul Wahid

THE DUTCH'S 'FLOATING LIFE' ON DESHIMA ISLAND: A GLOOMY SIDE OF DUTCH-JAPAN RELATIONSHIP DURING THE TOKUGAWA PERIODE, 1715-1790

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 1-16

ABSTRACT

In order to extend its trading network and engagement in the 'intra-Asian trading network', the VOC sought to gain contact with Japan, which was known for its luxurious products as copper and silk. At that time, Tokugawa Ieyasu just emerged as the new Japanese ruler; whose regime introduced a controversial policy known as Sakoku to cut Japan completely off from the international relations to strengthen internal politics. As a result, Japan lost its diplomatic and economic relationship with other nations. The Dutch (represented by the VOC) – together with China and Korea - were the only exception as the Tokugawa regime granted them trading license and used them as window to see 'the outer world's' development. The VOC's officers had to pay costly this privilege, however, since they should follow Tokugawa's strict rules and control. They were allowed to settle and live only on a virtual island called Deshima, which was located on the bay of Nagasaki. Tokugawa regime provided all their needs, but restricted their movements and activities especially in accessing land and making contact with local inhabitants. Perusing the available printed historical sources to be combined with the recent literature, this paper describes the daily life of those VOC's Dutch officers living on the island, and seeks to analyze the importance of this 'odd relations' for political and economic relations of the two nations.

Keywords: *the VOC, Dutch, Tokugawa Japan, Deshima*

DDC: 304.8

Paulus Rudolf Yuniarto

INDONESIAN MIGRATION INDUSTRY IN TAIWAN: SOME SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND IMPROVEMENT CHALLENGES

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 17-33

ABSTRACT

Institutional placement mechanisms are inevitable in migrant services industries. However, some business components in the recruitment process are unbalanced, whereby the migrant workers are entirely responsible for their departure costs and fees. Individual and institutional actors—banks, insurance companies, brokers, and private or even state recruitment institutions—are involved in the migrant workers sales market, and these conditions are faced by Indonesian migrant workers in general. As a result, debt bondage and slavery are typically characteristic of Indonesian migrant workers. Using existing literature and a qualitative approach through case studies of Indonesian migrant workers in Taiwan, this article demonstrates the role of brokers (agencies) in managing and controlling migrant labor abroad. Even some of the placement and financial policies designed to help migrants with their debt bondage and agency exploitation are also prone to manipulation. Therefore, this article also explores what circumstances and conditions might lead Indonesian migrant workers in Taiwan to debt bondage and suggests improvements for migrant empowerment.

Keywords: debt, slavery, migration industry, brokers (agency)

DDC: 303.6

Sandy Nur Ikfal Raharjo

THE ROLE OF IDENTITY OF THE RELIGION IN THE CONFLICT IN RAKHINE MYANMAR, 2012-2013

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 35-51

ABSTRACT

In 2012–2013, a communal conflict took place in Rakhine, Myanmar. Religion identities between Muslim minority and Buddhist majority have been made use to raise violence among parties. This paper tries to analyse whether the differences in religion identity played as structural/root factor of the Rakhine conflict. Through literature review, the result of study shows that religion identity issue was intentionally played by securitizing actors to mobilise people and to accelerate conflict, in order to pursue their own real interest of power domination, land ownership and business chance. Besides, this research also identifies several prolonged discriminative policies and low economic levels as the structural factor of the communal conflict. This paper suggests that stakeholders should empower moderate monk in promoting interfaith dialogue, involve impartial third party as mediator, and remove all discriminative policies as the ways to optimize the ongoing conflict resolution process.

Keywords: Myanmar, religion identity, communal conflict.

DDC: 306.4

Yovi Ardivitianto

**THE DEVELOPMENT OF ROCK MUSIC IN MALANG IN 1970S – 2000S:
GLOBALIZATION STUDIES AND THE EXISTENCE OF SOCIO-CULTURAL**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 53-69

ABSTRACT

This article aims to describe the development of rock music in Malang in 1970s–2000s. On the other hand, this article aims to look at the effect of the existence of rock music as a popular culture for socio-cultural life of youth in Malang in 1970s–2000s. Writing this article is done by using the historical method, in which besides using secondary sources, primary sources are also used, such as contemporary newspaper, contemporary magazines, and oral sources. Rock music is a part of popular culture products that began developing in the 1970s. Young people become consumers of the existence of rock music continuing to be entrenched in the late 1970s. Rock music was neither present nor taken for granted, but through a journey of existence from time to time. The existence of rock music can be seen through the stages and the recording industry. Of the existence of rock music appeared a form of lifestyle influences, which in turn was followed by its fans. On the other hand, the role of the mass media was highly efficient for the spread of a form of popular culture. Eventually the genre is able to spread widely throughout the world, including in Indonesia.

Keywords: *history of development, rock music, existence, popular culture*

DDC: 304.2

Kurnia Novianti

**NGO RESPONSES TO THE DYNAMICS OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
EFFORTS IN THE CZECH REPUBLIC**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 71-84

ABSTRACT

This study focuses on the dynamic responses of some of environmental NGOs in Prague, the Republic of Czech related to the development of renewable energy. Their responses are varied. Some of them support the government policy on renewable energy development, but some others express their disagreement to its policy by demonstration or protest in some media. These responses show that NGOs have their own interpretations and interests about dynamic condition of renewable energy development. They are not always having the same perception with the government policy. They argue that the government's policies somehow contradict with the effort to develop renewable energy in the Republic of Czech. This study itself borrows a resistance's perspective to analyze the data and information that were collected through a field research in Prague. It concludes that the environmental NGOs responses to the effort of renewable energy development are varied based on their methods and strategies influenced by their ideologies.

Keywords: *responses, environmental NGO, resistance, renewable energy, the Republic of Czech*

DDC: 307.1

Choerunisa Noor Syahid

INDONESIAN STUDENTS MOBILITY IN THE NETHERLANDS

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 85-92

ABSTRACT

Today the student mobility becomes an important issue in the global dynamics. As a student, they have good qualification with their high level of education, and at the same time their access to the international labor market also open wider. However, on the other hand, based on the resources and networks that they have, they also have many opportunities to engage in the public activities, which related to social and political issues, both in their own fatherland or as a part of the world. Based on those both domain, by using historical and sociological approach, this study will observe the personal and structural aspects of the Indonesian students mobility in the Netherlands.

Keywords: *mobility, Indonesian students, higher education, the Netherlands*

BOOK REVIEW

FEEDBACK TO MODERNITY

DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT

Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. California: Stanford University Press, xix + 282 hlm.

Abdul Fikri Angga Reksa

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 (1) Juli 2015: 93-99

THE DUTCH'S 'FLOATING LIFE' ON DESHIMA ISLAND: A GLOOMY SIDE OF DUTCH-JAPAN RELATIONSHIP DURING THE TOKUGAWA PERIODE, 1715-1790

Abdul Wahid

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: kang_ahid@ugm.ac.id

Diterima: 12-02-2015

Direvisi: 07-04-2015

Diterima: 09-06-2015

ABSTRACT

In order to extend its trading network and engagement in the 'intra-Asian trading network', the VOC sought to gain contact with Japan, which was known for its luxurious products as copper and silk. At that time, Tokugawa Ieyasu just emerged as the new Japanese ruler, whose regime introduced a controversial policy known as Sakoku to cut Japan completely off from the international relations to strengthen internal politics. As a result, Japan lost its diplomatic and economic relationship with other nations. The Dutch (represented by the VOC) – together with China and Korea - were the only exception as the Tokugawa regime granted them trading license and used them as window to see 'the outer world's' development. The VOC's officers had to pay costly this privilege, however, since they should follow Tokugawa's strict rules and control. They were allowed to settle and live only on a virtual island called Deshima, which was located on the bay of Nagasaki. Tokugawa regime provided all their needs, but restricted their movements and activities especially in accessing land and making contact with local inhabitants. Perusing the available printed historical sources to be combined with the recent literature, this paper describes the daily life of those VOC's Dutch officers living on the island, and seeks to analyze the importance of this 'odd relations' for political and economic relations of the two nations.

Keywords: *the VOC, Dutch, Tokugawa Japan, Deshima,*

ABSTRAK

Untuk memperluas jaringan perdagangan dan keterlibatannya dalam 'jaringan perdagangan Asia', VOC berusaha menjalin kontak dengan Jepang yang saat itu dikenal sebagai penghasil komoditas berharga berupa tembaga dan kain sutra. Pada saat yang sama, Tokugawa Ieyasu muncul sebagai penguasa baru Jepang, yang rejimnya kemudian mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dikenal sebagai Sakoku, yaitu menutup Jepang dari dunia internasional untuk memperkuat situasi politik internal. Akibatnya hubungan diplomatik dan ekonomi Jepang dengan bangsa-bangsa dunia terputus total. Belanda (melalui VOC) – bersama dengan Cina dan Korea – merupakan pengecualian, karena Tokugawa memberikan mereka ijin dagang dan menjadikannya sebagai perantara untuk melihat perkembangan 'dunia luar'. Meskipun demikian, para pegawai VOC harus membayar mahal hak istimewa tersebut karena mereka harus mengikuti aturan dan pengawasan yang ketat dari rejim Tokugawa. Mereka hanya diperbolehkan hidup dan tinggal di sebuah pulau buatan bernama Deshima yang terletak di teluk Nagasaki. Rejim Tokugawa menyediakan semua kebutuhan hidup mereka, namun sangat membatasi ruang gerak dan aktivitas mereka, terutama untuk mengakses daratan dan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dengan menggunakan sumber-sumber primer tercetak dan menggabungkannya dengan literatur mutakhir, makalah ini mengungkapkan kehidupan sehari-hari para pegawai VOC-Belanda di pulau tersebut, dan menganalisa makna penting 'relasi yang aneh' tersebut bagi hubungan politik dan ekonomis kedua bangsa tersebut.

Kata kunci: VOC, Belanda, Tokugawa, Jepang, Deshima,

INTRODUCTION

After established Batavia as its main headquarter, the VOC sought to expand its trading network to wider area of Asia in order

to get a deeper engagement in the dynamic of "intra-Asian trade network". One of its next destinations was Japan, a country known at that time for its luxurious products: copper and silk.

The Dutch made first contact with Japan in the early of 17th century, when the 'Liefde' (Charity or Love), one of the five ships from Rotterdam anchored in Japan on April 19th 1600. At that time, the *Sekigahara* battle, a long-bloody civil war had just ended, in which Tokugawa Ieyasu emerged as victorious leader and inaugurated the two and half centuries of his *Shogun* regime. It was reported that Tokugawa Ieyasu was impressed with the Dutch ship, with the skill of its crews and especially with the firearms it was carrying, which likely became the reason for granting them permission to settle and build a trading post in *Hirado*, just offshore of Nagasaki prefecture.¹ For Dutch historians, the permission the Dutch received was quite a privilege considering the fact that during the Tokugawa regime, Japan implemented the politic of *Sakoku* declaring herself as a 'closed country', to cut off from the rest of the world. The Dutch, who came under the flag of the VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), was the only European to have such position while the other two foreign nations were China and Korea (Blussé 1986: 47; Henshall 2004: 58-59).

The Dutch VOC gained such privilege, however, with a quite expensive cost because all of its trading representatives should settle in a confinement, inside a small 'ghetto' known as *Deshima*, a virtual island in the bay of Nagasaki since 1641 until the end of Tokugawa regime in 1853. On this island, the Dutch lived under a tight control and strict rules of Tokugawa authorities, and they could not leave the island without official permission. As a result, the Dutch had a very limited contact with local inhabitants and other foreigners. Through this policy, Tokugawa administration created a tight control upon the Dutch activities in order to filter outside influence that might be harmful to Japanese society.

¹ As of course, Tokugawa was also aware of the VOC's importance position as a global trading power with its vast network and influence, which at that time had already covered trading hubs in the Indian Oceans, South Africa and South East Asia. This was very much likely another reason for Tokugawa to choose the Dutch VOC as the only European to trade in his territory (Blussé 1986: 50).

Historical accounts have depicted that under such restricted surveillance the Dutch played a role as the only source of information for the Tokugawa, from whom the Japanese learned science, medicine and knowledge from outside world, especially from the West. Prominent historian, C.R. Boxer views this historical process as 'one of the most curious plots on the face of this planet for more than two hundred years' (Boxer 1936: 115).

Apart from some peculiar conditions the Dutch had lived through on this island, this period had been considered in literature as the most important period in the history of Dutch-Japan relation, when the two nations developed intense trading cooperation and exchanged large number of their respective cultural values. (See Sansom 1950; Huibert 1984; Goodman 2000; Rietbergen 2003 and Chaiklin 2003). In the context of commerce, as the only Western country being allowed to trade with Japan, the VOC merchants monopolized and accrued a large amount of profit from the export trade of copper and other precious commodities of Japan to Asian and European markets (Shimada 2002). These commodities were indispensable for the entire VOC's trading imperium in Asia. Remmelink, a Dutch historian, has argued that 'it was one of three pillars of the VOC's trade empire: precious metals from Japan, textiles from India, and spices from the Indies' (Remmelink 2004: xxiv). In the context of cultural exchange, the Dutch had a very important role in introducing and transferring Western technology and science to Japanese ruler and their society through *Rangaku* or Dutch studies system (Goodman 2000: 119-145).

This paper discusses the commercial activities of the Dutch merchants living in *Deshima* and their social cultural encounters with Japanese people of Nagasaki and from the surrounding areas. The main issue to be addressed is the daily life of the Dutch in the island of *Deshima*. How did the Dutch manage their daily life under a tight control of Tokugawa's Japan? Why did they accept such difficult situation and in what way did the cultural exchanges between

the Dutch and the Japanese take place in day-to-day basis? The first two questions cover the basic human needs of Dutch people ranging from such problems as entertainment, sex, consumption, social gathering, and many more. Meanwhile, the last question certainly aims to uncover the practice of *Rangaku* system throughout the period concerned. By addressing these questions, the paper sheds some lights on the history of Dutch – Japan relations in the eighteenth century. Basic information was taken from the following printed sources, namely *The Deshima Diaries, Marginalia 1700-1740* and *Deshima Diaries, Marginalia 1740-1800*,² which contain the logbook of daily activities of the Dutch and almost everything happened on this island.

JAPAN UNDER TOKUGAWA: SOCIO-POLITICAL CONDITION

Historians had given different terms to characterize the Japan's Tokugawa period. Referring to its political nature, historians label the Tokugawa's period as 'the great peace' (Sansom 1963), 'an age of stability' (Cullen 2003: 95), or 'closed country' (Henshall 2004: 51).³ According to Hayami, the two and half century of Tokugawa period (1600-1860s) consisted of at least the following important moments: the seventeenth century as a 'great transformation', nineteenth century as the busy 'transition', and the eighteenth century as a relatively quite, and static in every component of society (Hayami 1998: 131-132). The Tokugawa government successfully concentrated their energy to establish a strong administration and political control to an extent that it had created a long peaceful period during which Japan saw almost no international and domestic political upheavals at national level.

2 *The Deshima Register*. 11 Vols. (1640-1650; 1680-1800) (Leiden: The Center for the History of the European Expansion 1986-2001); *The Deshima Diaries, Marginalia 1700-1740* (Tokyo: The Japan-Netherlands Institute 1992); *The Deshima Diaries, Marginalia 1740-1800* (Tokyo: The Japan-Netherlands Institute 2004).

3 Henshall refers to the most famous term of *sakoku* political system, when the Tokugawa regime cut off the country from any international relations, and only with the Dutch as exception.

The political success of Tokugawa regime had a lot to do with its distinctive political system known as *bakufu* system. Under this *system*, the shogun had national authority and the *daimyo* – a samurai lord - had regional authority, the territorial unity under a feudal structure, which controlled an increasingly large bureaucracy to administer the mixture of centralized and decentralized authorities. The Tokugawa became more powerful during their first century of rule: land redistribution gave them nearly 7 million *koku*, control of the most important cities, and a land assessment system reaping great revenues. The Tokugawa also consolidated their control over the emperor, the court, all the *daimyo*, and the religious orders. A code of laws was established to regulate the *daimyo* houses. The code encompassed private conduct, marriage, dress, and types of weapons and numbers of troops allowed; required alternate year residence at Edo; prohibited the construction of ocean-going ships; prescribed Christianity; and stipulated the *bakufu* regulations as national law. The various regulations and levies strengthened the Tokugawa but also depleted the wealth of the *daimyo*, thus weakening their threat to the central administration, which was placed at Edo, nowadays Tokyo (Totman 1967: 14-15; Henshall 2004: 51).

This political system was constructed based on the existing social structure of Japanese society, which was known as *Shino-koshoi* system (a kind of caste system). The system divided hierarchically the citizenry into several groups. At the top of the hierarchy, but removed from political power, were the imperial court families at Kyoto. The real political power holders were the samurai, followed by peasants, artisans, merchants, and an underclass of untouchable society, consisted of religious leaders. Given that these professional warriors had no function in time of peace, the Tokugawa saw them as a threat to law and order. They were thus put under a close supervision of the *metsuke*, the secret police, and to facilitate this control they obliged to settle in the cities.

In descending hierarchical order, they consisted of farmers, who were organized into villagers, artisans, and merchants. Urban dwellers, often well-to-do merchants, were known as *chonin* (townspeople) and were confined to special districts. The individual had no legal rights in Tokugawa Japan. The family was the smallest legal entity, and the maintenance of family status and privileges was of great importance at all levels of society (Kootte 1986: 46).

Japan under Tokugawa was also known as 'a closed country', because the *Sakoku* system dominated its foreign policy (also called as the policy of seclusion). The policy was formulated in 1630s, and included policy to remove the Western threat, symbolized by the political threat to shogun's authority presented by Christianity, and international policy to effectively close Japan off from the rest of the world (Goodman 2000: 2-3). Yet, that was not mean closing the door entirely to other countries. Japan during the period enjoyed his own world order in his relation with the kingdoms of Korea and Ryukyu, and saw merchants travel to his shores from China and Netherlands. There are two hypotheses among historians to explain why the *sakoku* system was introduced. Both assume that the Tokugawa government was aware of the superior military technology of Western countries. One hypothesis suggest that the Tokugawa government was concerned that a local lord might get help from a foreign country in order to topple the Tokugawa shogun; while the other maintains that the Tokugawa government was afraid of a direct threat from foreign countries, which had already invaded China and the Philippines.⁴

Some historians connected this political policy, as a Tokugawa's reaction, to the expansion of European trade influence and the propagation of Christianity, especially those run by the Spanish and Portuguese missionaries. For Tokugawa

⁴ The *sakoku* system has been increasingly challenged by Western and Japanese scholars since the 1970s. They proposed to see Tokugawa foreign relation in 17th century as its effort to integrate Tokugawa diplomatic behavior into the structure of politics and polity in the domestic realm (Toby 1984).

regime, Westerner always presented problem. Their trade was beneficial, and they had some useful technology, but they were simply a big threat for the shogun's peace of mind. In particular, the challenge that their uncompromising God presented to the authority of the shogun was a major problem, not in theological terms, but in political ones (Henshall, 2004: 57). According to Henshall, though the regime did not concern overly with the theological distinction, Catholicism was seen as more of a threat than the newly emerged Protestantism. This, Henshall said, may have been because Catholics comprised the great majority of the Christians in Japan – and all the converted Japanese – or because they were outward and assertive in the expression of their faith than the Protestants. Most likely, however, it was largely because the *shogunate* aware of the vigorous empire building pursued by Catholics nations in the New World. Therefore, in any event, Christianity came to symbolize the Western's presence and threat to shogun's power and authority. It became focal point for the shogun to take action against that threat.⁵

Under Tokugawa regime religion was a serious matter, and they controlled it as part of state affairs. Various sects of Buddhism was continued to be tolerated as the popular religion, however official Tokugawa patronage was given to orthodox Confucianism with its firm foundation of discipline and obedience, as principles of social order. Meanwhile, Shinto was also allowed to develop as minority religion (together with Christianity), and was only developed as state religion after the collapse of Tokugawa. The official philosophy was the Neo-Confucianism of Chu Hsi (1130-1200), a leader of the Sung (960-1279) philosophical

⁵ In this case, some historian found the reason why Tokugawa regime was enlightened with the arrival of the Dutch. The ruler had just started his campaign against Christianity (Catholics) due to the over-enthusiastic of Portuguese Jesuits threatening his authority, and knowledge of the 'red haired barbarians' as the Dutch came to be called, would prove useful to counter the influence of Christianity in Japan. The protestant Dutch, whose first objective was trade and not the propagation of the Christian faith, had arrived and established their credibility just in time (Fujita 1991: 20-25).

renaissance in China. This Chu Hsi brand of Confucianism had great appeal for the military rulers of Japan because it fitted the precepts of the ancient saga into a metaphysical framework. This Neo-Confucianism system seemed well suited in its application to authoritarian Tokugawa rule. It emphasized loyalty and orthodoxy and was essentially conservative in tenor. The regime hoped to derive from their official sponsorship of the Neo-Confucianism philosophy not only guiding principles by which they could rule the country but a historical and ethical justification for their own position. Once adopted, therefore, Neo-Confucianism provided both the form and the ideology for the maintenance and perpetuation of the *Bakuhau* politics and its samurai-dominated social organization (Goodman 2000: 4).

In economic field, during Tokugawa period, goods, money and services were simply exchanged between three social groups; the ruling warrior class (*samurai*), farmers, and merchants/artisans, circled respectively. Within each group, off course there were different social strata, for instance in the warrior class territorial lords (*daimyo*) and vassals, or in the farming group, landowners and tenants. It means that the main economic sectors at that time were agriculture, trade/commerce, and small industries such as precious metals mines. In Tokugawa Japan, said Hayami, about 80 percent of the population lived in rural areas, and agriculture commanded the biggest production. A marketing and trade system developed, and in the eighteenth century what historians called as ‘the Osaka-centered commerce system’ functioned effectively. The export trade also played an important role, and one of the important commodities of the time was copper, traded with and by the ships of VOC to Asian and Western markets (Ito 1986: 8).

THE DUTCH AND JAPANESE ECONOMY

In her *Merchant in Asia*, Els Jacob states that the Dutch’s trade contact with Japan had a unique place within the Asian network of the VOC. The uniqueness of this contact lays on the

fact that Japan was only supplier of precious metal as an important commodity in the intra-Asian trade system. Meanwhile, the Dutch acquired this product in exchange for purely Asian products, such as raw silk from Bengal and cotton fabric and ray skin from Coromandel. As the only Western country with such privilege to trade and have limited contacts with Japan, the Dutch held a very profitable position. Since 1641 the Japanese authorities allowed them to build a trade post in *Deshima* – close to Nagasaki bay, and accordingly granted also permission to the VOC to export Japanese copper. Therefore, it could be said that the VOC merchants’ biggest interest in Japan laid on their precious metal products, especially copper. Owing to these contacts, said Jacob, the VOC had a commercial strength in Asia in the seventeenth century that no other European or indigenous competitor could match (Jacob 2006: 145-155).

Japan, according to Shimada, had already gained recognition as a copper-exporting country in East Asia since the middle age, and until the mid-seventeenth century its copper exports were considerably influential in the world economy. This was the period of ‘the golden age of Japanese copper’. Copper was widely used as material for numerous utilities. In the seventeenth and eighteenth century, copper both in Asia and in Europe was mostly converted into low-value coins used for small payments (called *doit*). In Asia, it was also used as material of some household utilities. Besides the VOC, Japanese copper was exported by Chinese junks from Nagasaki and by Japanese ships via the island of Tsushima. The ultimate market for Japanese copper was the world in general, but some particular traders had particular markets to supply. The VOC reshipped Japanese copper from Batavia and Malacca mainly to South Asia and Europe. Japanese copper exported by Chinese junks went mainly to mainland China with some to Southeast Asia while that which was exported through Tsushima Island went to Korea. However, among the markets in the intra-Asian trade system, South Asia was the most important recipient of Japanese copper, in terms of

the VOC's trade circle. Throughout the eighteenth century more than 80 percent of Japanese copper was traded by the VOC (Shimata 2006: 25).

Concerning the production of copper, Shimada depicted that the main mining regions were limited to a few areas in northeastern Japan and on the island of Shikoku. These areas produced more than 75 percent of the total output of Japanese copper throughout the eighteenth century. Another several productive mines were located in the *Mutsu* and *Dewa* regions, also in the northeastern Japan. Together they produced around 40 per cent of the total production in Japan. Most of those copper mines were run by the local domain (*han*), or by a family. In the island of Shikoku, for instances, the Sumitomo family managed the *Tatsakawa* and *Besshi* mines. These mines were two of the greatest in early modern Japan, and the Sumitomo family was one of the biggest business groups in Japan. However, the exploration of the mines should have a permission of the central authority. As a rule, all those raw copper had to be sent to Osaka for further refining, which was also run by the Sumitomo family. Refined-copper produced in Osaka was delivered to the VOC and Chinese merchant in Nagasaki for export. The Tokugawa's shogunate strictly monitored the refining process in Osaka and the distribution route of copper from the mines via Osaka to Nagasaki (Shimata 2006: 48-51).

Referring to trend in gross profit per unit, Shimada divided the copper trade between Japan and the Dutch in the eighteenth century into three periods: (1) 1700-1725: gross profit per unit stagnated from the beginning century until around 1725; (2) 1725-1760: gross profit per unit began to rise rapidly around 1760. During these thirty-five years the profit per unit in 1760 was approximately twice as high as that of 1725; (3) 1760-1790: after 1760 gross profit per unit gradually decreased. With a fluctuated size of the VOC's copper trade during the eighteenth century, Shimada came to the conclusion that the company enjoyed advantages from the intra-Asian trade system. One important factor in the success of this system was that

Japanese copper was a significant commodity in this trade network. This commodity also gave a significant contribution to the continuity of economic growth in the eighteenth century Japan. And last but not least, the commodity also had far-reaching economic consequences. It stimulated an international division of production across Asian region. On the basis of competition in term of comparative advantage in production, the VOC's Asian trade paved the way for Asian economic development and social change in the modern period (Shimada 2006: 168-171).

Besides exporting copper as main trading activity during the eighteenth century, the VOC also involved in exporting other commodities such as camphor, porcelain, pickles, lacquer and copperware. However, according to Nagazumi, Imari porcelain was the most important competitive export for the VOC; and in the context of private trade this was the highest commodity being traded in 1711. Nagazumi also highlighted the VOC's import trade in Japan in commodities like silk, textile, sugar, spice, sappanwood, and pepper. The most important import commodity for the VOC was sugar, but the only good 'monopolized' by the company was Bengal silk. It was the least profitable commodity because the competing domestic silk product had emerged in several regions of Japan, but the company had to bring these goods to meet the orders of the Nagasaki magistrate, who demanded that one third of import goods had to be silk (Nagazumi 1986: 150-151).

During this period, the presence of the VOC's trading post in *Deshima* had certain unexpected effect in expanding rather than restricting the profile of the Dutch. In the context of strict rules, the business was not as profitable as it had been at the end of the *Hirado* period when free trade was allowed. Goods had to be sold at fixed prices decided upon in advance. Maximum prices for import and export goods were set, and goods that were remained unsold had to be taken back. However, in spite of all these regulations, the VOC still made profits and continued to trade – mainly – silk for gold, silver, copper and camphor.

Also, lacquer work, porcelain and tea were bought and exported to Batavia or Europe. Contrary to what one might conclude, *Deshima* was a popular posting among the VOC's employees. One reason for this was that the Japanese authority, apart from official trade, gave permission for limited personal and private trading as well, a privilege which provided those employees with a handsome additional income sometimes reaching levels of more than 20 times their normal annual salary. The *Opperhoofd*, ship captain, whose salary was 1200 guilders a year, was recorded to have made profit as much as 30.000 guilders (Chaiklin 2003: 12-21).⁶

In the late of eighteenth century, in line with some political reasons, both in Japan and Europe, profit and trade on *Deshima* was deteriorated, and *Deshima* lost its key position within Asian trade system. The Japanese authorities set out new regulations on such affairs as the numbers of ships permitted and the exchange rate between silver and gold - initiatives that restricted profits for the Dutch traders. This was the era of the French Revolution and the loss of the once mighty Dutch command of the sea. After the collapse of the VOC in 1799, and then English occupation in 1811, the Dutch merchants in Japan did not seek to change the condition of private trade. Several figures of private merchants tried to keep remain the trade activities in Japan, and in the following decades they played a significant role to keep the relation trade between the Netherlands and Japan.

DESHIMA: A MELANCHOLIC PICTURE OF THE DUTCH LIFE IN JAPAN

As already mention before the Tokugawa government started their *Sakoku* politic in 1930s. The application of their policy regarding the foreigners in Japan can be summed up briefly in chronological order as follows: the requirement

⁶ According to Nagazumi, the private trade among VOC officers or servants had started since *the bakufu* implemented the *sadame-daka*, the limitation on the trade volume through Nagasaki, in 1685, when private trade was officially recognized by the Nagasaki magistrate's office (Nagazumi 1986: 148).

that permission be obtained from the *roju*, senior councilors, for Japanese ships to sail overseas (1633); the ban on Japanese people going abroad (1635); the concentration of the Portuguese trade only in *Deshima* in Nagasaki (1636); the ban on Portuguese trade (1639) after the Christian revolt in *Shimabara* and *Amakusa* in 1637-1638 and they completely expelled from *Deshima* in 1639. With *Deshima* vacant, the shogunate found ways to restrict the freedom of movement of the last westerner in Japan: the Dutch. In 1640 they found a good reason to confine the Dutch to *Deshima*. Head merchant Francois Caron had two warehouses built of stone to prevent loss by fire - a common threat in those days. And below the roof arch, following European custom, the words 'Anno 1640' were engraved to show the year of completion. The mentioning of the Christian date proved an insensitive mistake. The Dutch had to tear them down and move to *Deshima*. The Shogun's decree meant the Dutch left Hirado on 24 July 1641. From then on for more than 200 years the Dutch would be the only western country permitted to have contact with Japan and the Japanese.

The Morphology of *Deshima*

Deshima was an artificial land, built under the command of shogun in 1634 and located in the bay of Nagasaki to assemble all of Portuguese traders in one place. By keeping them apart like this the Tokugawa government wanted to control them in easier way. One study reported that the building process of the land was involving 25 prominent citizens of Nagasaki, and upon completion it became an integral part of Nagasaki. The island was constructed in the shape of a fan; local legend has it that when the shogun was asked to determine its form, he spread out his fan in reply. The land was then called *Deshima*, which literary meant a 'fore island' or 'projecting island' referring to its position before the town of Nagasaki. For local people, *Deshima* was usually referred to as 'the Dutch lodge' (*oranda heya*), 'the Dutch mansion' (*oranda yashiki*), or 'Deshima ward' (*Deshima-machi*). The supervision of the island

and, off course, the Dutch was fully responsible of the Nagasaki magistrate (Han-Liem 1986: 53; Hesselink 2000: 49).

Based on the report written by Engelbert Kaempfer, who arrived on Deshima in 1690 as the VOC's doctor, Goodman reveals that the foundation of the island was made of stone to rise it 0.5 fathom above the sea level. According to Goodman, both the east and west sides were 210 feet each in length. The north side closest to the town was 557 feet long, while the south side facing the harbor was 760 feet. The total area of the island was 3969 *tsubo* (around 15,700 square yards). The entire island was surrounded with a high board wooden fence with a double row of sharp stakes, completely enclosed the island. On the west side there was a landing gate, which was opened only at the time during the season when the Dutch ships were being unloaded or loaded. The island was connected to the mainland by a wooden drawbridge, by the end of it was built a strong guardhouse, which served as the entrance to the island to make sure that no unauthorized person entered or left the island (Goodman 2000: 19).

In order to have a permission from Tokugawa authority to stay in *Deshima*, the Dutch had to pay certain amount of money for rental payment. The rent price of the island was 55 *kame* of silver (1 *kame* = 8,27 lb) per year or 5,500 tails. In 1641 this amount was equivalent to 8,250 guilders, but by 1720s this had risen to 19,530 guilders, and in 1733 the rental price was reset at 2,750 tails. By paying the rent, the VOC could use all buildings and facilities on the island including residences, warehouses and several domiciles for Japanese officials such as the overseers, the interpreters, and the guards. But, the VOC could also built new building if they found it necessary at their own expense. All of the buildings also had to be furnished by the Dutch. Some that were built included a place for the sale of goods, two warehouses, a large kitchen, a house for deputies – appointed by the *bugyo* (local magistrate) to regulate trade, and quarter

for interpreters. Concerning the basic needs, Goodman has described that the Dutch had kept cows, sheep, pigs and chicken on one corner of the island. Water for cooking came in bamboo pipes from a river inside Nagasaki and had to be paid as a separate item. In addition to that regular fee, the Dutch were also expected to give a gift to *bakufu* (shogun) to maintenance their relationship once in a year (Goodman 2000: 19-20).

On this tiny island, the number of Dutch personnel consisted of only fifteen to twenty persons. During certain times, mainly the trade season when the ships from Batavia arrived, this number increased. However, there were seldom more than forty Dutchmen on the island, since most crewmembers were not allowed to step ashore. The VOC employees consisted of the following officers or servants: the *opperhoofd* or chief merchant, who held the rank of senior merchant (*opperkoopman*) and was in charge of the factory; a deputy (*secunde* or *pakhuismeester*); a bookkeeper (*boekhouder*); a scribe and a warehouse keeper (*pakhuismeester*), usually a junior merchant (*onderkoopman*); the store keeper (*dispencier*); the clerks (*klerken*); the butler (*bottelier*) in charge of the liquor supply; the cook (*kok*) and the smith (*smid*). Apart from the VOC personnel, there were some slaves brought from Bengal or Java, who were called 'black boys' (*koronbo*) by the Japanese because of their dark skin (Hesselink 2000: 48).

For this small group of powerless and isolated Dutchmen, the Tokugawa authority developed a 'special section' of bureaucracy to supervise all of their activities. The most important officials were the interpreters (*tsuji*), since they involved in almost every important moment in *Deshima*. Besides the official interpreters, there were several unofficial interpreters who offered their services as guide boys. There were also Japanese cooks who assisted the Dutch cook. Meanwhile, the daily necessities of the factory was supplied by a fixed number of hereditary suppliers, they were called marketers (*comprador* or *konpura*). From 1677 four Japanese physicians (*Japane meester*;

Deshima naika) were attached to the factory. The water supply was the responsibility of someone called ‘the waterman’ (*waterman*; *mizuya*), and someone who served as tailor (*snijder*, *shitateya*). There were also the porcelain makers (*tokiya*), the camphor suppliers, and the lacquer workers (*urushiya*). During the trading season, *Deshima* was crowded with a number of coolies (*hiyatoi*) supervised by a ‘coolie master’ (*koelimeester*; *hiyatoigashira*), who transported the merchandise and goods from *Deshima* to the city, after judged by the ‘expert’ (*kennisluijden*; *mekiki*). The island also had some guards, who always patrolled at night, drafted from the poorest inhabitants of Nagasaki and supervised by a ward elder. The total number of Japanese involved in running the Dutch factory was quite high. In 1708, for example, it was reported that 224 peoples with different kind of functions had a certain connection to *Deshima* (Hesselink 2000: 49).

From Trade to Love: the Social Life of the Dutch

Trading, absolutely, was the most important activity for the Dutchmen in *Deshima*, where they could make direct and indirect contacts with different groups of Japanese community. The trading itself was a seasonal activity, which came on only in certain period, mostly in September-October. On the same month of the next year the account books of the previous year were closed. The ships from Batavia usually arrived in July and August, and then the cargo was offloaded, weighed, measured and inspected. The cargoes were then sold in September-October and the return shipment, consisting primarily of copper and camphor, and also some silver, porcelain, and lacquered goods, were weighed and loaded on board to the ships. They set sail from Nagasaki Bay for Formosa, Cambodia, or Batavia in October or November, but never late than December. During this trade season all the VOC’s officers were busy, when they would meet with many local people, traders, officers in charges, and coolies to trade or earn money (Hesselink 2000: 50).

After trading season was over, the resident *opperhoofd* would give his authority and all the Company’s properties to the incoming *opperhoofd* in front of all the Dutch personnel staying over in Japan. It was decided after 1640 by the Japanese government that the *opperhoofd* of *Deshima* would last for a period of one year. It was the time for the replacement of the *opperhoofd* by his successor, who had been appointed in Batavia. According to some historians, this arrangement was aimed at preventing the *opperhoofd* to become too friendly with the Japanese. The new officer then had to go to pay his compliments to the magistrate of Nagasaki. After that he had to go to Edo for annual visit to the shogun, as part of a diplomatic cooperation between the VOC and Japan, due to their exclusive trading cooperation. This was then recognized as the court journey (*hofreis*), when the Dutch presented a full boat of gifts, which was represented the respect of the Dutch to the *shogunate* but also in term of cultural exchange between the two nations (Chaiklin 2003: 39-42). The court journey usually took three months, started in February or March until May or June. While the *opperhoofd* was away, his deputy would supervise the repairs and maintenance of the building, and keep the official diary up to date. The court journey always occurred in the spring so that the *opperhoofd* could be back in time to manage the business activities, which were actually his most important task. For the rest, the Dutch in *Deshima* only received occasional visitors to have an informal meeting or to observe the condition of *Deshima*’s facilities (Effert & Forrer 2000: 18-19).

On top of the relation with the shogunates and local magistrates, another important local officer in term of trading was the officer of *Geldkamer* or *kaisho*. It was established in 1698, after the abolition of taxation trade system. This institution was essentially a government office that monopolized the trade of all merchandises imported by the Chinese junks and Dutch ships. It purchased all the Dutch living expenses and paid off the remainder in export products. In essence,

the *Geldkamer* took over the administration and accounting that the Dutch factory previously handled. There were many officials in this institution, appointed by the magistrate of Nagasaki. Among them were ward elders, the inspectors, the paymasters, the subordinate officials and the experts. They were all local officials appointed by the citizen of Nagasaki. It was said that in order to have a good trading agreement, the Dutch would also present gifts to those officers. However, at the end of the eighteenth century, gifts to *Geldkamer* officials and special order by shogun's official went through non-conventional trade routes that did not pass through the *Geldkamer*, and cracks began to appear in their control of trade. Some historians view that the rise of private trade went hand in hand with the demise of the *Geldkamer* (Keisuke 2000: 60; Nagazumi 1986: 152-54).⁷

In almost every occasion and important activities the Dutch would always need a help from the interpreters, who were called officially as 'Dutch interpreter' (*oranda tsuji*). Unlike during the years of *Hirado*, when there were some Dutchmen with proficiency in the Japanese language, including Jacques Specx and Francois Caron, each later appointed as *opperhoofd*. But on *Deshima* the Dutch were officially forbidden to study Japanese and had to depend on the Japanese interpreters. Dissatisfaction and discontent with the language abilities of the interpreters were repeatedly express throughout the *opperhoofd* official diaries of the later half of seventeenth century. The Dutchmen had complained about the inefficiency, dishonesty, rapacity and corruption of the Japanese interpreters. However, the Dutch had not alternative choice accept to keep use their services, otherwise their business could not run properly. In the early eighteenth century, the number of interpreters who worked in *Deshima* was 150 persons (123 according to Kaempfer) and 140 in the 1850s and 1860s (Goodman 2000: 33-34; Boxer 1936: 57-58).

⁷ The important meaning of the *Geldkammer* could be seen in the official diary written by *opperhoofd* of *Deshima* year after year.

Detail information about the interpreters' activities from the official Dutch diaries, like *Deshima Diaries*, encouraged one to conclude that their duties were very complex and very important in connecting the Dutch to the Japanese 'world'. They were supposed to interpret and translate various documents related with economic, politic, culture and even academic and sciences, including medicine, botany, astronomy, geography and military. Recognition and credit should be given to the interpreters, who took care of miscellaneous daily affairs, received and conveyed foreign news and contributed to the transfer of new sciences and technology, but also to the initial stage of 'Dutch studies' (*Rangaku*) (Yumiko 2000: 117-118). During the rise of private trade in the eighteenth century, some of the interpreters had a side business to provide the Dutch demand on Japanese manufacture products through a mutually advantageous alliance with some porcelain makers (*tokiya*), the champor suppliers (*shonoya*), and the lacquer workers (*urushiya*).

However, after the trading seasons ended and all of trade matters finished, what kind activities the Dutch did in *Deshima*? In his account, Blomhoff reported that after finishing the court journey in May or June, the *opperhoofd* and all the VOC's officers should be ready to receive the occasional visits from the Nagasaki magistrate. On such occasion, the island was swept clean, and fresh sand was sprinkled on the streets. All Japanese officials connected with the island's organization would present. The magistrate was welcomed at the land gate by all the Dutchmen of the island, and the *opperhoofd* then led the magistrate on a tour of the island, showing him the garden and the pavilion, where the magistrate would watch the Dutch play billiard. Besides the Nagasaki magistrate, the Dutch also should be ready to welcome occasional visitors of other official government members (Effert & Forrer 2000: 17).

Outside those business affairs, time in *Deshima* was running really slow for the Dutch, and they had a plenty time for relaxation. They

would play sometimes billiard in the game-house in the garden. Sometimes they discussed the vague rumors they heard about the political development in the country and kept eye on the number Chinese junks loaded with merchandise. Sometimes they would also play music, singing a Dutch song and dancing the whole night while drinking a great deal of liquor, wine, beer and *sake*. They also passed the rest of the time smoking tobacco pipes, and if there was a suitable occasion they would slaughter a cow, pig or goat, to have variation in their diet.⁸ In certain moment, the Dutch would have a quite big party and celebration in *Deshima*, such as on the New Year's Day of 1 January. On this occasion, as reported by Huibert, the *operhoofd* would receive present from the interpreters and congratulation from his compatriots and his servants. In return, he invited everyone to a party, which often lasted all day and sometimes went on until i night. The Dutch were also frequently invited to come to the Japanese celebration, such as *Matsoeri* party in Oktober, and lampion party held in August (Huibert 1984: 100-102).

The story of entertainment and pleasure activities of the Dutch in *Deshima*, can not be separated from the role of so-called *keesjes* of Maruyama. *Keesjes* was the Dutch way to say a Japanese word of *keisei*, which means 'beautiful women' or 'castle toppler', in reference to the legendary powers of an ancient Chinese beauty. The Dutch used the word *keesjes* to refer to courtesan girls or prostitute sent from the Maruyama brothels, Nagasaki (Smits 2000: 43). It was said that since moved to *Deshima* in 1641, the Dutch were forbidden to bring their wives and families with them to Japan, or to have relationship with Japanese women. As compensation, the Japanese government gave permission to two teahouses of Nagasaki, the Maruyama-cho and the Yorai-cho, to send their *yujos* or courtesans to the island. However, by the

⁸ The two volumes of *The Deshima Diaries*, recorded a lot of the information about the Dutch habits to play billiards and music in welcoming occasional visitors and in spare time as well. The Japanese was reported really enthusiastic to watch the Dutch playing billiard and music.

later half of 18th century the Dutch were permitted to leave *Deshima* to visit Maruyama brothels, and it was reported that in 1722 there were 270 Dutchmen visited the brothels (Goodman 2000: 22).

The *yujos* of Maruyama were initially, around 1640s, only allowed to go to *Deshima* for an evening, and they had to leave the island in the following morning. In 1713, they were allowed a three days stay on the island and later even five days. Finally, they were allowed to extend their stay by just showing their faces to the gatekeeper on the third or fifth day. In *Deshima*, they stayed in the *yuja-beya* or *yujo* residence or with the Dutchman if a more or less permanent relationship had arisen. In this relationship, sometimes the *yujo* gave birth. If that the case then the child was allowed to stay with his/her parents until seventh year, after which the Japanese grandparents took it on as a rule, and look after his/her further upbringing and education (Kawabata 1986: 61). Those Dutch-Japanese mix-blood children in Nagasaki were considered to be Japanese, and at an early age they were subject to restriction similar to those imposed on other Japanese. But, in the later period the Dutch fathers were allowed to receive occasional visits from their children at certain specific periods and to provide their education and supports. Frequently the fathers were also required to purchase for their adult Japanese sons some office under the government at Nagasaki or somewhere (Goodman 2000: 23).

The good manner and cooperative attitude of the Dutch to the Tokugawa's policy did not make their life fully safe from the unexpected threat. Robbery, for example, could happen anytime, especially at night when most of servants fell asleep, and even worst that the criminals were from the Japanese patrol guards themselves. They tended to steal anything from the Dutch whenever they had the chance. For this, the Dutch created the internal guard and operated a watch night session. However, the nature posed a greater threat. *Deshima Diaries* recorded several disasters, mostly earthquakes, happened during

the eighteenth century, and the most disastrous one was the volcanic eruption in 1792, which cost a lot of lives and material. The man-mistake disasters, fire, also happened in 1798, which burn out 25 buildings and turned one-third of *Deshima* completely into ashes.

Those melancholic stories of *Deshima* started to change as time passed, and the Tokugawa authority introduced a little leeway to its strict rules for the Dutch. Concerning the religious matters, for instance, Tokugawa's regime considered the Dutch as trustworthy people so they could keep and practice their religions. The Dutch was allowed to conduct their religious activities as long as they were practiced inside the wall of *Deshima*. Besides, while in the eighteenth century no Dutch people were buried in the Japanese soil, now the government provided a cemetery lot for the Dutch located in the foot of Inasa Mountain, across *Deshima* on the other side of the bay, outside Nagasaki. The most important development was that in the early nineteenth century the Dutch was allowed to take their women to stay in *Deshima*. It was Titia Blomhoff, the wife of Jan Cock Blomhoff – the *opperhoofd* of *Deshima* was the first Dutch woman to stay in *Deshima* (Bersma 2000).

CONCLUSION

This paper has shown that the Dutch life in *Deshima* during the eighteenth century was actually far from comfortable and pleasant. Under a strict regulation and control of the Tokugawa, the social life of the Dutch in *Deshima* was very unique. They have to adjust their life to the Japanese policy and to the local condition. For some historians, the co-operative spirit of the Dutch and their acceptance to such

restrictive condition were actually emanated from their economic-minded strategy to retain trade profit that they accrued so far from Japan. Considering the political economic context of the seventeenth and eighteenth century, such kind of impression was quite understandable. However, this economic deterministic view ignores the other sides of the story in *Deshima* that the Dutch also had interested to know more about this unique Asian civilization. In this respect, the Dutch life in *Deshima* reflected not only the gloomy side of the two nation's relationship, but also the bright and more positive one as can be seen from the *Rangaku* system (Dutch studies).

Concerning the cultural exchange between the Dutch and Japanese, this paper notice that the cultural exchange indeed had taken place through a 'formal' way, through a wide range of relation between the Dutch and the Japanese authorities – the shogunate, the local magistrate and all of bureaucracy officials. However, it proceeded also through 'informal' process, which was reflected from the relations arose between the Dutch and all Japanese peoples working with *Deshima*. Since they involved in taking care of the Dutch miscellaneous daily affairs and needs, they had intense relations from which the cultural understanding and exchange taken place among them. For instances, the Japanese cooks worked to assist the Dutch cook, he would absorb information on the cuisine, the drinking, the food, and eating custom of the Dutch and on the other way around the Dutch cook started to know something about Japanese culture. So, the understanding process of their respective culture started through day-to-day contact among the Dutch and the Japanese.

Appendix 1.

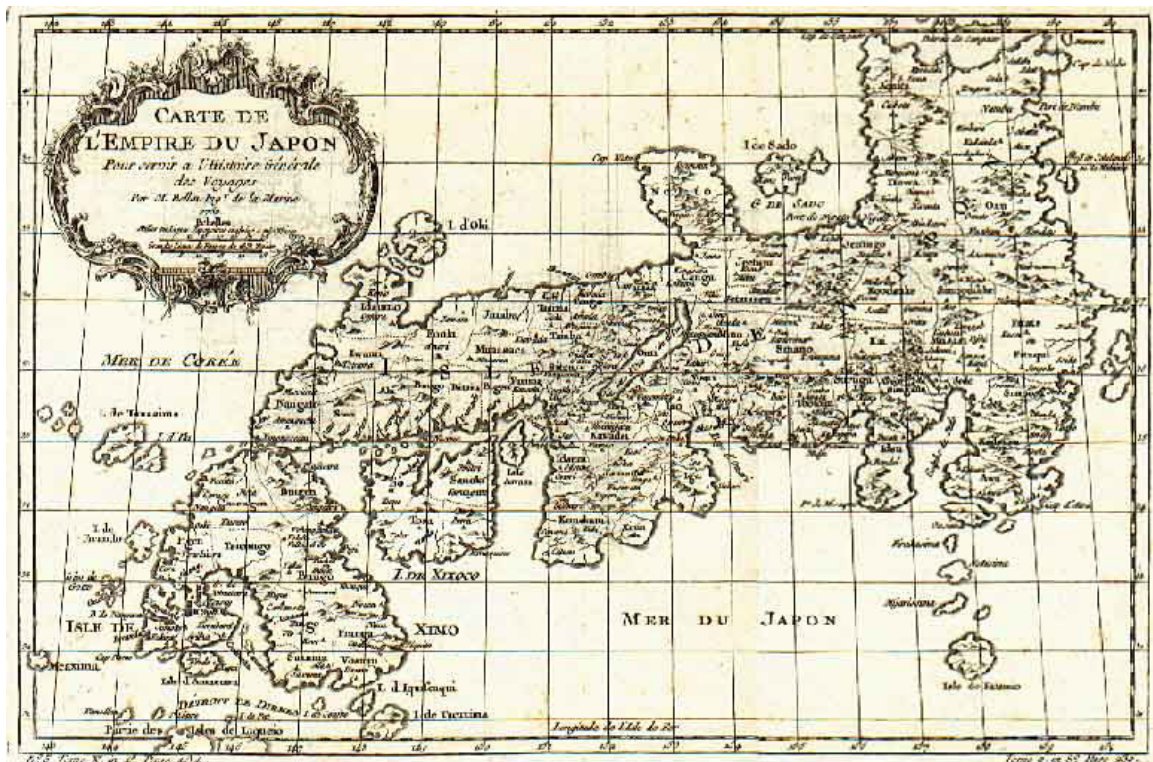
Deshima in 1761



Source: <http://www.oranda.or.jp/index/english/neth/relations.html#10>, downloaded on 7 October 2006.

Appendix 2.

Japan in 1750s



Source: <http://www.oranda.or.jp/index/english/neth/relations.html#10>, downloaded on 7 October 2006.

ACKNOWLEDGMENT

Archival and literature research for this article was conducted under the auspice of the ENCOMPASS Scholarship Program, Institute of History, Leiden University, 2009-2010. The article was initially submitted for the course workshop 'Colonialism in Asia'. The author would like to thank to Prof. Dr. Leonard Blussé and Dr. Alicia Schrikker for their valuable comments, and to all participants of the course for their insights and criticism.

REFERENCES

- A Country Studies: Japan. (1994, November). Retrieved from <http://www.loc.gov/rr/frd/>.
- Blusse, L., Willem, R., & Ivo, S. (Eds.). (2000). *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.
- Blusse, L., Willem, R., Paul van der, V., & Rudolf, B. (Eds.). (1992). *The Deshima Diaries: Marginalia 1700-1740*. Tokyo: The Japan-Netherlands Institute.
- Blusse, L., Willem, R., Cynthia, V., & Issabel van, D. (Eds.). (1992). *The Deshima Diaries: Marginalia 1700-1740*. Tokyo: The Japan-Netherlands Institute.
- Blusse, L. (1986). The Children of Hirado. In *In The Wake of The Liefde: Cultural Relations between The Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
- _____. (1992). A Glimpse behind the Screens: Some Remarks on the Significance of the Deshima Dagregisters for the Study of Tokugawa Japan. In L. Blusse, R. Willem, V. Paul van der, & R. Bachofner (Eds.), *The Deshima Diaries: Marginalia 1700-1740*. Tokyo: The Japan-Netherlands Institute.
- Boxer, C. R. (1936). *Jan Compagnie in Japan, 1600-1817*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- _____. (1973). *The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800*. Harmondsworth: Pelican Books.
- Chaiklin, M. (2003). *Cultural Commerce and Dutch Material Culture: the influence of European Material Culture on Japan, 1700-1850*. Leiden: CNWS.
- Cullen, L. M. (2003). *A History of Japan, 1582-1941: Internal and External Worlds*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Effert, F. R., & Matthi F. (Eds.). (2000). *The Court Journey to The Shogun of Japan: from Private Account by Jan Clock Blomhoff*. Leiden: Hotei Publishing.
- Fujita, N. S. (1991). *Japan's Encounter with Christianity : the Catholic Mission in Pre-Modern Japan*. New York: Paulist Press.
- Glamann, K. (1958). *Dutch-Asiatic Trade 1620-1740*. Copenhagen and The Hague: Danish Science Press and Martinus Nijhoff.
- Goodman, G. K. (1984). *Japan and the Dutch 1600-1853*. In R. Curzon, & P. Huibert (Eds.), *Nederlanders in Japan: De VOC op Desjima*. Haarlem: Stichting Historisch Centrum Nederland.
- Han-Liem, H.N. (1986). A Fan in the Water: The Building on Deshima. In *In The Wake of The Liefde: Cultural Relations between The Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
- Hayami, A. (1998). Japan in the Eighteenth Century: Demography and Economy. In L. Blusse & F. Gaastra (Eds.), *On the Eighteenth Century as a Category of Asian History: Van Leur in Retrospect*. London & New York: Ashgate.
- Hesselink, R. K. (2000). People on Deshima Around 1700. In L. Blusse, R. Willem, & I. Smits (Eds.), *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.
- _____. (2000). The Island Deshima. In L. Blusse, R. Willem, & I. Smits (Eds.), *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.

- _____. (2000). A year on Deshima. In L. Blusse', R. Willem, & I. Smits (Eds.), *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.
- Henshall, K. (2004). *A History of Japan: from Stone Age to Superpower*. New York: Palgrave Macmillan.
- Huibert, P. (1984). *Nederlanders in Japan, 1600-1854: De VOC op Desjima*. Amsterdam: Stichting Historisch Centrum Nederland.
- Hyma, A. (1953). *A history of the Dutch in Far East*. Michigan: George Wahr Publishing Co.
- In the Wake of the Liefde: Cultural Relations between the Netherlands and Japan Since 1600. (1986). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
- Ito, T. (1986). *The Japanese Economy*. Massachusetts: the MIT Press.
- Jacob, Els M. (2006). *Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the eighteenth century*. Leiden: CNWS.
- Kawabata, K. (1986). The Girls from Maruyama. In, *In The Wake of The Liefde: Cultural Relations between The Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
- Keisuke, Y. (2000). The Geldkamer. In L. Blusse', R. Willem, & I. Smits (Eds.), *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.
- Kootte, T. (1986). A far-Off Land of Silver, The Dutch in Japan 1600-1641. In, *In The Wake of The Liefde: Cultural Relations between The Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
- Nagazumi, Y. (1998). From Company to Individual Company Servants: Dutch Trade in Eighteenth Century Japan. In L. Blusse' & F. Gaastra (Eds.), *On the Eighteenth Century as a Category of Asian History: Van Leur in Retrospect*. Aldershot: Ashgate.
- Rietbergen, P. (2003). *Japan Verwoord: Nihoon door Nederlandse ogen, 1600-1799*. Amsterdam: Hotei Publishing.
- Remmelink, W. (2004). Koper is de Bruid Waaron wij Dansen: Copper is the Bride for whom We Dance. In L. Blusse', R. Willem, C. Vialle', I. van Daalen (Eds.), *The Deshima Diaries: Marginalia 1740-1800*. Tokyo: The Japan-Netherlands Institute.
- Shimada, R. (2006). *The Intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the Eighteenth century*. Leiden: Brill.
- _____. (2006). The Golden Age of Japanese Copper: The Intra-Asian Copper Trade of the Dutch East India Company. In A.J.H. Latham, & H. Kawakatsu (Eds.), *Intra-Asian Trade and the World Market*. London: Routledge.
- Sansom, G. B. (1950). *The Western World and Japan: A study in the Interaction of European and Asiatic Cultures*. New York: Alfred A. Knopf.
- _____. (1963). *A History of Japan, 1615-1867*. London: The Cresset Press.
- Smit, I. (2000). The 'keesjes' of Maruyama". In L. Blusse', R. Willem, & I. Smits (Eds.). *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.
- Totman, C. D. (1967). *Politics in the Tokugaw Bakufu*. Cambridge: Harvard University Press.
- Toby, R. P. (1984). *State and Diplomacy in Early modern Japan*. Princeton: Princeton University Press.
- Vermeulen, T. (1986). In this Melancholy Isolation... 'the journal of Dutch merchants". In, *In the Wake of the Liefde: Cultural Relations between the Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.

Wolff, M. P. (1986). The Dutch on Deshima. In, *In the Wake of the Liefde: Cultural Relations between the Netherlands and Japan Since 1600*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, Museum voor Volkenkunde Rotterdam.

Yumiko, T. (2000). Dutch Studies': Interpreters, Language, Geography, and World History. In L. Blusse', R. Willem, & I. Smits (Eds.). *Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands – Japan*. Amsterdam: Hotei Publishing – Teleacnot.

INDONESIAN MIGRATION INDUSTRY IN TAIWAN: SOME SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND IMPROVEMENT CHALLENGES

Paulus Rudolf Yuniarto

Indonesian Institute of Science

Department of Anthropology, Tokyo Metropolitan University

Email: rudolfyuniarto@gmail.com

Diterima: 19-02-2015

Direvisi: 24-04-2015

Disetujui: 09-06-2015

ABSTRACT

Institutional placement mechanisms are inevitable in migrant services industries. However, some business components in the recruitment process are unbalanced, whereby the migrant workers are entirely responsible for their departure costs and fees. Individual and institutional actors—banks, insurance companies, brokers, and private or even state recruitment institutions—are involved in the migrant workers sales market, and these conditions are faced by Indonesian migrant workers in general. As a result, debt bondage and slavery are typically characteristic of Indonesian migrant workers. Using existing literature and a qualitative approach through case studies of Indonesian migrant workers in Taiwan, this article demonstrates the role of brokers (agencies) in managing and controlling migrant labor abroad. Even some of the placement and financial policies designed to help migrants with their debt bondage and agency exploitation are also prone to manipulation. Therefore, this article also explores what circumstances and conditions might lead Indonesian migrant workers in Taiwan to debt bondage and suggests improvements for migrant empowerment.

Keywords: *debt, slavery, migration industry, brokers (agency)*

ABSTRAK

Kebijakan pengiriman tenaga kerja dan keputusan untuk bekerja keluar negeri terbukti telah memunculkan lembaga (aktor) parasit yang menanggung keuntungan dari proses penempatan tenaga kerja selain menimbulkan beban hutang bagi si pekerja. Walaupun kebijakan pengiriman tenaga kerja lumrah di lakukan negara dalam kondisi ketidakstabilan secara ekonomi, namun terdapat ketidakseimbangan posisi di antara para pelakunya. Hasil penelitian memperlihatkan industri pengiriman tenaga kerja (khususnya ke Taiwan) dikuasai oleh struktur aktor perantara (PJTKI dan agensi Taiwan), yang didukung oleh aturan masing-masing negara, berhak memonopoli biaya penempatan kerja dan potongan gaji yang harus dibayar oleh pekerja. Sistem ini sedikit banyak menguntungkan pihak perantara/ agensi dan menyebabkan kerugian bagi pekerja, dalam bentuk hutang kepada agensi atau kepada pihak lain. Hutang menjadi kata kunci untuk ‘menundukan’ pekerja turut pada aturan yang diberlakukan sepihak dan menjerat mereka pada kondisi perbudakan. Implikasi lebih besar sistem penempatan pekerja ini, antara lain: perdagangan manusia dan pekerja kaburan, berkurangnya pengiriman uang (remitan), serta ketiadaan akses bantuan hukum bagi pekerja yang di hinggapi persoalan. Pekerja yang mengandalkan diri pada mekanisme hutang tiada ampun dijadikan subyek pemotongan gaji dan pungutan lainnya atas nama asuransi. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian kualitatif dan penelusuran pustaka, pada kurun waktu 2014, terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Kata Kunci: *hutang, perbudakan, industri pengiriman tenaga kerja, perantara (agensi)*

INTRODUCTION

International migration has become commonplace in the contemporary era of globalization. However, violations of workers’ rights and exploitation by agents, employers, or government agencies are coincident with such

migration, which is unacceptable. For instance, in the case of Indonesian migrant workers (*Tenaga Kerja Indonesia*, TKI), placement programs have reported instances of workers’ being subjected to verbal and physical abuse, debt bondage, and excessive exploitation through the recruitment

process, not only in the receiving countries but also after their return home (see *Trafficking in Persons Report Taiwan 2013*; Heyzer 2002; Human Rights Watch 2013; Fuch 2011; Sihombing 2008). In such cases, the state government and migrant agencies accused have neglected (not by coincidence) to protect migrant workers' rights in terms of both personal protection for workers and placement fee management (Silvey 2004: 259; Irianto & Truong 2014: 43). As a result, migrant workers often become victims in this unfair migration process that includes the recruiter/traffickers, the users (employers), and the policy makers who stand to gain in these situations (Fuch 2011: 2; Sihombing 2008: 43). Although some recent improvements have been made in preventive measures and the working conditions of Indonesian migrant workers in Taiwan (see Pawestri 2013; Anwar 2013; Widyowati 2014; Liang 2006), problems in their pre-departure situations and daily conditions remain unrecognized. Many migration-linked problems lack clarity, such as placement fees, debt bondage, and working conditions related to protection policies, which include migration financial credit, migrant empowerment, and law enforcement. Therefore, this paper seeks to question the conditions of Indonesian migrant workers in the context of the migration industry process and to examine the role of brokers (agencies) as main institutions—in fact, as an arm of the state—which, instead of regulating, have violated/manipulated migrant workers' employment rights. I attempt to reveal the alignments between brokers (including the state) and employers that represent their attempts to make a market economy flourish (i.e., brokers combined with the labor market), even as they extricate exorbitant job placement fees and provide substandard living conditions for migrant workers. In addition, this article offers critical notes and suggestions concerning protection policies that allegedly reduce placement fees, especially in terms of micro-credit schemes that still cost the workers.

I interviewed migrant workers and some institutions on the problems related to issues with the migration process, discrimination, or working conditions, and used these narratives to understand the human rights violations migrant workers are faced with, along with their social implications. I focus on the role of brokers for Indonesian migrant workers in Taiwan, especially with regard to misleading job placement promises, debt bondage, and unsatisfactory living conditions. I discuss the narratives of (mostly) victimized women workers to avoid gender bias because there are more Indonesian women migrant workers proportionately than men. I have also analyzed the moral economy of migration using debt philosophy. The data is based on my literature review as well as fieldwork in Taoyuan and Hsinchu Counties and Taipei City from June to December 2014. I observed and conducted interviews with migrant worker victims and staff in one migrant detention center and migrant shelter, labor agencies, researchers at academic institutions, and government officials. Related literature was identified through an Internet search with the following keywords: “illegal migrant,” “indebtedness,” “slavery,” and “business migrant Indonesia-Taiwan.” This study is organized into four sections. Section 1 focuses on the Indonesian and Taiwanese migration industry, and section 2 examines migrant regulations in Taiwan as well as the role of brokers. Section 3 discusses the link between the migration process and debt bondage/slavery process and its implications. The final section discusses an alternative perspective, focusing on migrant protection rather than financial problems for those who work abroad.

THE MIGRATION INDUSTRY

Migration as a part of the business industry has been the subject of numerous interdisciplinary studies. For instance, Kyle and Liang (2012) recognized the existence of migrant exporting schemes in which “a diverse range of people

may profit from migration by providing either legal or illegal services (p. 2-3).” Meanwhile, Harney (1977) introduced the term “commerce of migration” in reference to the activities of a set of intermediaries who profit by offering services to immigrants in their travels between the state of origin and foreign destinations (p. 47). Based on these activities, Salt and Stein (1997) proposed that migration as a business concept is a system of institutionalized networks with complex profit and loss accounts, including a set of institutions, agents, and individuals, each of which stands to make a commercial gain (p. 468); this definition considers a relatively broad range of social actors operating in sending regions. Moreover, Salt and Stein (1997) attempt to identify these actors in the migration industry practices as active profit seekers in the international migration business and the migrants as playing an overly passive role in setting their own migratory agendas—or in other words, in the process of producing migration (p. 468).

The above three perspectives all noted that the actors in the commercialization process of international migration include labor recruiters and contractors, money lenders, travel agents, transportation providers, people providing legitimate and forged documents, smugglers, formal and informal remittance and courier service owners, as well as lawyers and notaries involved in legal and paralegal counseling. All of these actors offer services for profit, and they are routinely regarded as those who disrupt the orderly migration process (Hernández-León 2005: 32). In sum, the migration industry consists of underprivileged entrepreneurs and enterprises acting as antagonists, rather than the protagonists they are supposed to be in the migration process (Adler 2000: 165; Rodríguez 1996: 21).

Ananta (2009) developed and examined Indonesian migrant workers and the migration industry surrounding their employment (p. 2-3). He characterized overseas labor business as “selling cheap overseas workers” to cater the market in richer economies that are experiencing

a shortage of low-skilled workers. He argued that migrants become marketable goods that can be sold and purchased as well as merchandise. For instance, the business receives payment from the buyers of overseas workers. In this context, buyers are employers demanding cheap labor for industries, labor markets, or domestic requirements. The largest buyers of Indonesian cheap labors are from developed countries such as Malaysia, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong, and Taiwan. Businesses in migrants’ home countries provide services that place workers abroad with “handsome benefits”—that is, they manipulate the salaries the migrants will be paid, whereas the workers have an obligation to pay a deduction fee for 9-15 months to the agency. Such services, provided by local firms on a national and international level, involve numerous investors, actors, and various vested interests. Interestingly, the prospective workers are actually migration business customers, who are common people from villages, undereducated, poor, and lacking in information about working abroad. These workers are required to pay money by the migrant provider for a service that manufactures them so that they can be sold in the international market. It is a very interesting and extensive business practice, especially in rural Indonesia, wherein the workers must incur the cost of making themselves saleable.

Actually, many institutions are involved in the Indonesian migration industry (world worker sales market): banks, insurance companies, brokers, and recruitment institutions (e.g., *Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia*, the PJTKI, or in local language commonly known as *PT*, *PJTKI*, *Agen*, *Sponsor*). As a business, the Indonesian overseas labor market is a very promising and captive market, wherein powerless customers (as prospective overseas workers) can afford to pay for the services offered by the banks. Insurance companies reap benefits from this captive, oligopolistic Indonesian overseas labor market by selling financial protection in the case of illness and/or accidents (Ananta 2009: 5). In short, international labor migration in Indonesia

occurs through various regulated and unregulated agencies as well as legal institutions. In addition, many invisible actors, such as the agency referred to as *Teikong's and Calo's*, a term used by Ernst Spaan (1994), serve as recruitment agents that take advantage of potential workers and neglect any placement rules and regulations in place (p. 93). According to the liaison officer of Migrant Care, Mrs. Anis Hidayah and Mr. Wahyu Susilo, although these agencies play a significant role in recruiting potential Indonesian workers, transporting and placing them overseas, as well as arranging their return, not all agencies provide perfect services to these workers. In addition, the Indonesian government is also responsible for ensuring that these labor recruiters do not breach migrant workers' rights

In Taiwan, the government decided to rely on the broker system to implement its guest worker program. Taiwan's government did more than relegate responsibility to the market; it moved beyond its traditional developmental duties of insulating industries and fostered competition through a neoliberal style (Surak 2014: 1). According to Surak, the resultant system meant not only that potential participants from the migrant exporting states were competing for limited spots but also that they were paying higher broker fees than those incurred by other countries for their guest worker schemes (Surak 2014: 10). This fact underscored the reality that employers hired people deemed to be "useless" (e.g., women for construction jobs) to maintain their migrant quotas, while the employment agencies—that is, the brokers—engaged in rabid competition. Furthermore, the 800 licensed firms in this close-knit sector, which is dominated by a handful of large businesses, paid employers as much as USD\$700 per migrant worker to handle their cases (CLA 2003). This fee was eventually redeemed from the migrants, which was typically will be deducted more than their wages for nine months (CLA 2003; Lan 2003). With the presence of activist governments and watchdog non-governmental organizations (NGOs) holding

down brokers' fees, migrant workers from the Philippines and Thailand were able to gain some money at year's end, but those from Vietnam and Indonesia were often less fortunate (Surak 2014; Lan 2003).

In sum, the migration industry encompasses a whole process in sending workers and involving many commercial actors/institutions. Thus, the migration industry needs to be perceived through a broader prism than it usually is, especially for understanding the impact of the commercialization of international migration and what may happen to migrants after they are placed in a job, particularly with regard to the conditions of petty harassment that often emerge. The consequence of the migration industry, in fact, is the emergence of negative aspects such as debt bondage and slavery in the countries faced with migration, and there are extensive economic implications as well.

THE MIGRATION BROKERAGE SYSTEM

In general, the migration brokerage system includes the intermediate mechanisms bridging people in one state to those in another state. Brokerage is used because not all persons are connected via direct links to the relevant others (Faist 2014: 6). It occurs at the interstices of formal and informal practices, such as acquiring a visa or connecting with traffickers or middlepersons; finding employment, housing, child or elderly care; accessing social services; entering organizations in the place of destination; and accessing channels for return or onward migration (Faist 2014: 7). Brokers (middlepersons) are often also involved in either official (i.e., institutional) or unofficial recruitment (Spaan 1994: 210). The migration brokerage system in Indonesia, which has been operating since 1983, was first introduced under the New Order Regime—namely, AKAN (Angkatan Kerja Antar Negeri or Labor Movement between Countries). Its name was changed periodically until, in 2004,

it became BNP2TKI (Badan National Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia or National Authority For Manpower Placement & Protection Abroad; see for detail history in Spaan 1999: 159; Silvery 2004: 251; Pawestri 2011: 30).

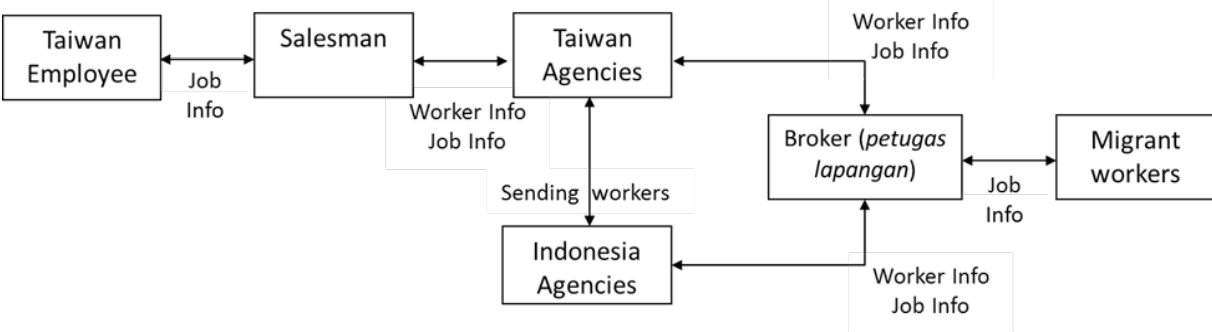
Two conditions get migrant workers into the brokerage system through deception. First, “the tricky law,” based on Law No. 39 (2004) on the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, mandates that every Indonesian migrant worker who works outside the country must pass through the Labor Service Company of Indonesia (*Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/PJTKI*). This policy is called the “one exit door policy,” which means that migrants can work abroad only through this regulation; if not, the worker is regarded as an “illegal worker” (Mafruhah et. al 2012: 249-250). The law likewise defines a placement service as one that is “cheap, quick, uncomplicated, and safe,” as opposed to other means; this may be translated as “if you want quick, then you have to pay.” The second is called the “poverty condition.” The majority of Indonesian migrant workers going to Taiwan must secure loans to pay their placement fees, usually based on the cost management regulations pre-determined by the agency (brokers). In other words, to work in Taiwan, one must have the funds to *buy* the job. Indeed, most Indonesian migrant workers live in poverty because they cannot afford recurring payments. However, it can be assumed that even in cases where migrants could manage the funds, the brokers will not allow

them to contact the employers directly because of this profitable arrangement. As a result, upon arriving in Taiwan, these workers are immediately indebted to the brokers and forced to pay off the loans through salary deductions. The system ties workers into a hegemonic brokerage pattern.

Figure 1 shows the pattern of brokerage practices governing Indonesian workers in Taiwan in the job placement system. This chart shows the role of the commercial agents, which is to recruit the workers, provide training, find them employment (agents in Indonesia would contact agents in Taiwan), arrange their passage, provide loans, draw up contracts, remit their remuneration, arrange their repatriation, etc. The steps of Indonesian brokerage in the migration industry to Taiwan are as follows: first, the workers usually obtain work info abroad from migrant agency field brokers or unofficial persons. According to staff at the Indonesian Worker Association in Taiwan (IPIT), there is an unstated contract that indicates an “illegal” cost that migrants are obligated to pay: that is, they have to pay USD\$500 for job information retained from migrant worker to broker (*petugas lapangan*). Second, the workers go or are sent to a shelter for a short job training session, after which they depart to Taiwan.

Employers in Taiwan typically rely on the services of labor brokers in Taiwan and placement agencies in migrant home countries to fill their labor requirements. In Taiwan, middlemen in recruitment, hiring, and employment are referred to as “labor brokers,” or sometimes as

Figure 1 Indonesia-Taiwan Brokerage Role and Job Placement System



Source: Rudolf, Fieldwork 2014

“foreign worker coordinators.” The Taiwan Labor Standards Law divided recruitment of migrant workers into three categories: brokerage system (the agencies are given the right to make salary deductions), **income tax** and forced saving, and regulation and management of migrant workers (CLA 2013). **In terms of the brokerage system, placement fees and wage deductions**, as of September 1, 2004, the Council of Labor Affairs (CLA) imposed a new regulation requiring migrant workers (new hires), employers, and brokers to sign affidavits specifying the loan amount that migrants “borrowed” from their placement agencies prior to deployment (CLA 2013). This “Salaries, Fees and Declaration Form” also specifies the migrant worker’s monthly salary, monthly broker’s service fee, health and labor insurance fees, income tax, resident permit fee, medical check-up fees, and return airfare (O’Neill 2008). These placement fee regulations were applicable not only for Indonesian migrant workers but also for those in various positions from the Philippines, Thailand, and Vietnam (Lan 2003). It takes an Indonesian migrant worker with regular wages an average of around 9–15 months to pay off the debts. In addition to repaying the placement fee, loan, or any money borrowed, they must also pay a broker’s fee (usually a three-year contract), legally collected through monthly installments (O’Neill 2008). Taiwan-bound migrant workers also have to pay for their own travel apart from the aforementioned salary deductions. In earlier times, their air travel was reimbursed by the employer. The following instance of an Indonesian female working as a domestic worker in Taipei demonstrates the required payment of a placement fee and salary deductions. It also describes the typical amount for salary deductions and placement and brokerage fees in Taiwan (see Table 1).

Ayu (a pseudonym), a female factory worker from Bandar Lampung, Lampung Province, has come to Taiwan twice. Each time, she had to pay Rp. 20,000,000 (USD\$2000) to Indonesian agencies for agency fees, training fees, tickets,

visa fees, and an administrative letter from the Taiwan Economic and Trade Office and BNP2TKI. The fees also included transportation and job fees for the broker officer (petugas lapangan). She also had to pay a salary deduction and others deductions/obligations while working in the factory for such items as food, dormitory, agency fee, bank deduction, health insurance, savings, and taxes for as long as 10 months. She cannot complain about all these deductions because, first, this is the rule, as her broker said. Second, there is no direct hiring mechanism for workers in factory jobs, so she has to follow the same situation as well as the first came to work abroad. She said, “We [Indonesian workers] can’t do anything; we just accept what we get (nrimo) and keep saving our money to send home” (interviewed October 10, 2014).

Clearly, overseas workers are the most important “customers” in the business of sending workers abroad. It is ironic that the value of a better income and life for migrants is reduced by the economic value of being taken advantage of through measures for “helping” the workers. Based on my observation of the experience Indonesian workers in Taiwan, these practices are common, and every stakeholder involved knows the rules of the game, the so-called “looking money from migrants, *cari duit dari TKI*.” Such services are sold to the captive market of Indonesian overseas workers in all of their migration stages. It is a market wherein the workers do not have many options except to follow and pay for the services provided by the industry. Moreover, rather than teaching the workers ways to gain employment by themselves, the industry has created a dependency on various actors for working overseas.

A CONSEQUENCE OF MIGRATION INDUSTRY

Lisa (28) had prepared the documents: her passport and the application form

Table 1. Placement Fees for Indonesian Workers in Taiwan

No	Placement cost	Formal Work			Informal Work
		Factory	Ship Crew	Old Folk Home	Domestic Workers
1	Placement fee in Taiwan (China Trust)	NT\$ 8250 x 10 months	NT\$ 8500 x 9 months	NT\$ 8500 x 9 months	NT\$ 9,525 x 9 months = NT\$ 114,300
2	Health insurance (from Taiwan Gov)	NT\$ 283 Per month	NT\$ 283 Per month	NT\$ 283 Per month	NT\$ 283 Per month
3	Accident insurance (from Taiwan Gov)	NT\$ 307 Per month	NT\$ 307 Per month	NT\$ 307 Per month	NA
4	Accommodation fee	NT\$ 4500- NT\$ 2500		-	NA
5	Broker's fee (legally by Taiwan Gov)	Firs year NT\$ 1800 x 12 = NT\$ 21,600 Second year NT\$ 1,700 Third year NT\$ 1,500			
6	Tax (from Taiwan Gov)	- Before 1 July (6%: NT\$ 1,040 - After 1 July 20% (NT\$ 3450x 6 month), after 6 months NT\$ 1,040 per month.			
7	Medical body check (from Taiwan Gov)	NT\$ 2000 per year			
8	Identity card (ARC) (from Taiwan Gov)	NT\$ 1000 per year			
9	Saving (Not must but must)	NT\$ 2,000	NT\$ 2,000	NT\$ 2,000	NT\$ 2,000
10	Placement fee in Indonesia pay to PJTKI (averages*)	NT\$ 50,000	NT\$ 20,000	NT\$ 40,000	NT\$ 30,000

Source: Migrant Struggle (2012)

to return home for good after working illegally in Taiwan for 1.5 years. I accompanied her to Hsincu Immigration Office to report and go through an administrative procedure. She was a bit nervous and worried that the police would arrest and send her to jail or detention center. However, she was simply asked several questions and informed of the standard deportation procedure for an illegal migrant as they were checking her documents. Meanwhile, I observed a group of illegal migrants who also reported and submitted the documents needed in order to return to their home country. While waiting for the deportation document to be processed, Lisa told her story about why she became an illegal migrant

worker. She began by saying that being an illegal migrant worker (TKI Kaburan) is like having an “abnormal” life. She could not make friends normally, not even a boyfriend, or get a normal salary or health insurance. On the other hand, a legal worker's life seems to be just “normal.” As addition information, according to data from The Ministry of Taiwan, at the end of July 2014, there were 45,579 illegal/ undocumented migrant workers in Taiwan, with detailed numbers as follows: 21,521 Indonesians; 20,615 Vietnamese; 2,460 Philippines; and 983 from Thailand.

Lisa came to Taiwan for the first time in 2010 as a legal worker. She took care of an elderly paralyzed lady. She worked for just two years and returned home

when the person whom she had cared for died. Coming home at Bintan City, Sumatera Island, she found her mother was sick and she needed some money for medical treatment. The salary she had made and saved during her two years of working in Taiwan was not enough to pay the expenses of the treatment as well her family's daily needs. In early 2012 she decided to go back to Taiwan with a lot of debt: USD\$1,300 for her mother's treatment that she had borrowed from her uncle and USD\$1,000 from the agency for paying her trip tickets and administrative fees. She had worked just two weeks when the immigration police came to check her employer and found false documents and other fake information about her work: there was no paralyzed person at home, for example. She was forced to finish her job and return home again. The agency that had arranged her work in Taiwan also suggested that she return home, and she had to pay back the loan because they failed to find another employer for her. Considering her debts both to her relative in Indonesia and the agency, she decided to work without legal documents. She moved from Taipei to Kaoshiung to visit a friend who was also an illegal worker (TKI Kaburan) and was introduced to an illegal agency. As usual, an illegal worker is introduced to the illegal worker/agency by another illegal one.

Business relating to illegal/undocumented workers seems risky, but it is profitable. For instance, from each employment, the agency gets "service money" (*uang jasa*) of 3,000-5,000 NTD (USD\$120-200) per month from the total salary. During her six months of working illegally, Lisa changed her work several times, from nursing old people at the hospital, to picking up kids at school and waitressing in a restaurant. Her salary ranged between 25,000 and 30,000 NTD (USD\$1,000-1,200). However, she had to pay the illegal agency "service

money" and cost of living, and she saved the rest of the money. Finally, after six months of working illegally, she could pay her debts. Then, she was offered a job at a fruit plantation around the Nantou Mountain area, but this time her agency asked for 8,000 NTD per month (USD\$320) out of 25,000 NTD (USD\$1,000). The deduction fee was abnormally high, but as usual, illegal workers cannot complain. Luckily, her boss (*laopan*) was very kind, and he understood the situation. Lisa and her boss staged a drama to deceive the "bad" agency. She told the agency that she had been badly treated by her boss, and the boss also complained to the agency that they had sent a lazy worker. Then, her boss called the agency saying that the worker had escaped and that he could not pay the salary anymore. When the agency came to check, they could not find her because she was hiding in an underground "bunker" on the plantation. Consequently, the agreement between her boss and the agency was cancelled, and after that, Lisa got a full salary and could save more money. Her boss facilitated anything she needed accept health insurance because she worked illegally. One year later, Lisa decided to go home for good because she wanted to take care of her mother, who was sick and old (interviewed October 18, 2014).

Three situations in this employment process evoke reflection, based on the aforementioned explanation: 1) unemployed migrant workers, because of their poverty, accept a job offer from an agent or friends; 2) they must pay money to an agent/company in order to work; and 3) they struggle to earn a salary to support their families at home while paying off their own debts. This cycle indicates that some workers fail to predict the grim working conditions and, consequently, face abusive working conditions and uncertain business practices. My observations of Indonesian

domestic workers have shown that it takes them months or even years to be debt-free, although they work a grueling schedule. Such situations tend to occur when workers are either tricked or trapped into working for low/no pay or if the details of the contract are ambiguous. The Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APFWLD) has observed that the value of domestic work is unfairly assessed. These experiences indicate that the work contract can become an instrument of debt bondage by legal definition and may be used as a tool for work limitations (APFWLD 2011: 27).

In regard to migrant debt as a consequence of the migration industry, the migrant workers' position is that of debtors who must pay a lender for buying jobs in which they provide the energy for the work. According to David Graeber (2011), a debt in the migration industry is an exchange that has not been brought to completion (p. 73-87). One party receives the goods/advantages; the other is owed a payment. To fail to honor a debt, therefore, is to be in a condition of guilt on either moral and economic grounds, or in other words, "they'd borrowed the money. Surely one has to pay one's debts." As David Graeber observed, although a wage-labor contract is, ostensibly, a free contract between equals, it is also "an agreement between equals in which both agree that once one of them punches the time clock, they won't be equals anymore." Moreover, debt essentially is an "agreement between equals to no longer be equal" (Graeber 2011: 73-87). Graeber mentions this situation as an economic paradigm, ignoring the moral paradigm, which is a moral obligation in the context of the migration industry to understand the social reciprocity of the actors involved and migrant workers as a part of human relationships. Thus, this kind of relationship is supposed to express certain equality between creditor and debtor, with no exploitation of the debtors.

We may extend Graeber's perspective by observing that because humans are social beings, they need each other. Thus, in social relationships

there should no controlling or being controlled. However, contrary to this perspective, in the migration industry, there is, in fact, no mercy for migrant workers who work abroad so that they can improve their living conditions. Instead, employers and brokers exploit salaries based on legal contracts that clearly state that the debtor must repay the debt. This situation is worsening because many workers are undereducated and unaware of their rights. Employers and brokers take advantage of this lack of knowledge by providing false information about laws and the attitudes of authorities or by simply threatening that workers who complain will be sent home. In this context, if workers attempt to report an abusive situation to the police, the act is synonymous with returning home. This type of vulnerability and dependence created through the brokerage system can be seen as a possible origin of slavery.

One can argue that migrant workers' debt bondage can be a form of slavery in advanced or, in other words, forced labor, as both situations (debt bondage and forced labor) enslave a person with regard to the broker/employer. It is common in Taiwan for migrant domestic workers to work every day of the week without a break and to be ready for work 24 hours a day, as they live in the employers' household. As mentioned earlier, they have to work for low pay and unreasonable working hours because paper contracts are often not clear. Even male factory workers have similar experiences, as they have to do other work besides their main job, such as cleaning factory machines. The high demand for migrant workers in destination countries and the existence of recruitment agencies and people willing to facilitate jobs have provided the thrust for transforming these migrants into slaves. Like the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APFWLD 2011: 76), I believe that inadequate employment opportunities, poor living conditions, lack of basic education, and poor health services are the factors that have caused the emergence of this business industry. Furthermore,

the contractual relationship can become a form of bondage or slavery in two ways: (1) if the value of the service is not applied toward paying off the debt or, in other words, if the worker is performing much more work than he or she should to pay off the loan and (2) if the duration and nature of the work are not respectively limited and defined. This is a result of an unclear contract, as mentioned above, by which migrants get trapped into bad working conditions (APFWLD 2011: 76).

Based on the explanation above, another consequence of the Indonesian migration industry is the relatively new phenomenon of people entering (modern) human slavery (Fuch 2011; Allain 2012). Traditionally, slavery refers to persons who are trafficked and enslaved in the country of their birth (Human Rights Watch 2006: 1). They may be terrorized by their owners into fearing the authorities, even though they are technically entitled to state protection. This perspective is based on the traditional idea of natal alienation, wherein persons who find themselves illegally transported to foreign countries fear seeking the protection of law enforcement and other state authorities (Patterson 2012: 6). As a result, they are isolated from familial and social ties. However, modernization has radically institutionalized traditional slavery (Davidson 2013: 2). In this current situation, laborers are increasingly alienated from traditional contractual relationships (employer to employee) and are instead recruited by middlemen contractors (state and brokers) and sub-contractors, many of the workers being exploited laborers from poor villages and families. In the past, employers would buy slaves from other employers, but in modern-day slavery, the migrant workers themselves must repay any recruitment-related debts to labor agents, sub-agents, banks, and moneylenders (Davidson 2013: 20). In addition, indebted and bonded factory workers, like their counterparts in the modernized farming sector, have little or nothing to do with the recruitment process, apart from the few regular employees that constitute the formal workforce (Allain 2012).

I would like to offer another case to illustrate migrants' situation in working abroad. I will call her Sari (27 y/o); she is a migrant worker from Semarang, Central Java. I was surprised to learn that she had been an illegal worker in Taiwan since about seven years ago. The first time, she came to Taiwan to work as a caregiver in a private household. She borrowed Rp. 18,000,000 (USD\$1,800) from her agency. Her working contract specified her duty as taking care of the elderly parents in the household, but in fact she also had to do housework and other tasks assigned by her employer. Even at that young age she had experienced working abroad, but she had never before experienced the working conditions here: not being allowed to leave the house because the elderly parents were not to be left alone, no holiday, no mobile phone, and an unreasonable fee deduction (the first month she received 3,000 NTD (USD\$120) and the second month 3,500 NTD (USD\$140). She held out only three months before deciding to become an undocumented worker for seven years as a *TKI kaburan*, though she retained the same profession of housecleaning (Interview in August, 2014).

The abundant and growing body of slavery appears under the guise of domination of individuals by institutions in the present era of globalization. The role of broker or agency in this kind of migration industry is visibly expressed by abusive employers, which is occasionally described as "modern slavery" (Davidson 2013: 1). Many migrant workers in Taiwan, who are under the control of labor contractors, are in temporary debt bondage that verges on servitude. In a number of migrant workers' cases of debt bondage to labor contractors (or who have been sold by these contractors to employers), the persons have been reduced to actual slavery. For instance, Bridget Anderson, in her work on immigrant domestics in Britain, compellingly identifies the key element that transforms domestic labor into genuine slavery as the fact that what the employer wants is not the "the labor power" of the domestic worker but her "personhood" (Anderson

2012: 55). Similar to the case in Taiwan presented above, the employer is buying the power to command, not the property of the person but the whole person. Because migrant workers end up being employed by private persons, they work in the private sphere, which is not considered as a workplace, thus escalating the risk of forced labor and slavery. In many cases, because of salary deductions, they are even dependent on their employers for shelter and food. A few who are brave run away.

CERTAIN PRACTICAL IMPLICATIONS

Human Trafficking and Smuggling in Taiwan

Besides the illegal/undocumented worker conditions as mentioned above, Taiwan faces a problem with human trafficking and smuggling. There were 484,367 foreign workers in Taiwan in 2013, with Indonesia being the largest contributor at 211,118 migrant workers, which was almost half of the total number of foreign workers in the country (CLA 2013). The Taiwan immigration office identified and assisted 462 trafficking victims in 2012, of which 152 were victims of labor trafficking and 310 of sex trafficking, most of whom were Indonesian and Vietnamese; all 462 victims were referred to care facilities for assistance (American Institute 2013). In 2012, the Taiwan Human Trafficking in Persons Report stated that the largest number of human trafficking victims was Indonesian (American Institute, 2013). According to the Chief of Immigration Division and Chief of Labor Division of Division at the Indonesian Economic and Trade Office (IETO), Indonesian human trafficking victims in Taiwan can be divided into three types: 1) runaways trapped by illicit agents in Taiwan; 2) victims of internal trafficking in Indonesia, which is very rare in Taiwan; and 3) laborers exploited by employers. According to them, most of the victims in Indonesian human trafficking are runaway workers facing challenges in adapting to

their employers because of cultural and religious differences. The Chief of the Illegal Immigration Management Section (Immigration Affairs Division) from the National Immigration Agency (NIA) in Taipei also acknowledge this particular motive. Additional reasons for runaway workers include forced salary deductions to pay the debt of the initial expenses and to reimburse the agent in Taiwan, and illicit pressure from agents wishing to increase their revenues. The Deputy Director of the IETO Shelter in Taoyuan also mentioned that the modus operandi involving Indonesian human trafficking victims can be attributed mostly to “bad agents” and “bad employers” who encroach upon employees’ rights and want to take advantage of the victims’ weaknesses.

Remittances Impact on Indonesian Overseas Workers

The workers often migrate for domestic work with the expectation of remittances to care for their families. However, such expectations sometimes do not come to fruition. Migrant workers in some cases even choose to stay and become illegal workers rather than returning home without repaying their debts. There are very many examples of Indonesians workers like Lisa’s case, as mentioned above, wherein both legal and illegal/undocumented migrants send half their salaries to their family in Indonesia. Because of salary deductions in Taiwan and debts in Indonesia, most of them cannot send remittance money until after they have worked a year. Those who need emergency money for children’s education, sick parents, a pregnant wife, or something else, do not have much choice, and some of them choose to become runaway workers and to risk being an illegal worker as a shortcut to gaining money for their families. As illegal/undocumented workers, they risk being put in jail, deported, working under employer pressure, or becoming victims of human trafficking. Their unforeseen situations intensify their sufferings as they give up hope for a better life.

However, this debt bondage is contrary to the

government's idea of promoting foreign exchange (*devisa negara*) through migrant workers. The Indonesian government has focused on mobilizing annual remittances (money transfers) rather than prioritizing migrant protection (see PSDR report, 2009). Although the Indonesian government relies on migrant workers' remittances, it has had no serious policy with regard to remittance management. Indonesian migrant remittances from Taiwan have been poor compared to those from Vietnam, Thailand, and the Philippines (*Jakarta Post* 2012). One of the reasons for these countries' success was that they established policies to send migrant workers abroad with governance-oriented migration protection through low-cost migration schemes. The Philippines and Vietnam even applied a standard money exchange for remittance transfers (*Jakarta Post* 2012). However, in Taiwan, private companies, such as remittance institutions and Indonesian stores, take advantage of the money exchange to make a profit by informally using Internet banking, reaping advantages from the remittance cost and the differences in currency exchange rates. In such cases, Indonesian workers are subject to extortion via their remittance money. I recommend maximum protection from the government and NGOs in the form of regulating remittance systems to provide a sense of productivity and decent wages that will boost remittances for the migrant workers. At the time I completed my research, the regulation of remittance systems had not yet been realized.

The government's strategy to increase the volume of migrant workers' remittances is still very traditional with the thought that a maximum number of migrants will ensure higher remittances. Politicians lack the will to design a policy for low-cost migration, although the costs of placement fees have increased annually. Such high costs have forced migrant workers into debt bondage, trafficking, and even unintended slavery. Given that the Indonesian government lacks a comprehensive policy for remittance management, perhaps it is not considered to be an

immediate problem. Nonetheless, remittances are related to migration costs. Unchanged conditions in low-cost migration, to some extent, will affect the sending of remittances to migrants' countries (villages) of origin, in turn, failing to stimulate regional economies. Remittances are one of the most visible and tangible contributions of migrants to their home countries. The money migrants send to their families pays for food, education, and healthcare, easing day-to-day hardship and poverty and contributing to the achievement of the local development goals (*PSDR Report* 2009). In high-cost schemes and debt-finance migration, the circulation of migrant remittances conforms to a hierarchy of debt repayment, consumption, and finally economic investment. Such schemes introduce a vicious cycle wherein the remittances of migrant workers are used only to pay debts, fall into more debt, and make successive payments to settle them (known as *gali lubang tutup lubang/robbing Peter to pay Paul*). Thus, without government's involvement in remittance management, migrant workers will be further subject to debt bondage, trafficking, or slavery.

Lack of Legal Protection Services

An Indonesian worker with little education and a poor intention to migrate overseas may encounter various challenges during each phase of migration as experienced workers in Taiwan. The challenges faced at pre-departure include the possibility of high cost recruitments and document manipulation. Based on my observation and interviews with the Indonesian Migrant Worker Organization in Taiwan (*Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan*, IPIT) and Indonesian Workers Association in Taiwan (*Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Taiwan*, ATKI), typical cases include the following: 1) recruitment by an illegal supplier of the Service of Indonesian Workers (PJTKI); recruitment arranged by a legal supplier of the PJTKI without a clear job order; recruitment and departure arranged by agents and not through the PJTKI; recruitment of children below the

age of 18, and recruitment of illiterate immigrant workers. Other challenges faced at and beyond recruitment include the following: 1) counterfeit documents, 2) being fettered to the creditors, 3) not being paid for work, 4) being prohibited from contact with their own families or relatives, 5) torture or other mistreatment; 6) inability to return home; 7) detention by security at the airport or harbor for various reasons; 8) unjust treatment at the airport or harbor; and 9) incidences of mental illness and depression.

In Taiwan, the Indonesian government is responsible for protecting migrant workers whose rights have been violated and for redressing them. On April 28, 2013, the headquarters of *Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei* (KDEI Taipei) formed the Labor Protection Task Force of Indonesia with 20 members. The team's goal is to protect the interests of TKI in realizing the fulfillment of their rights in accordance with the laws and regulations. It also attempts to improve the handling of TKI in a more intensive, effective, and efficient manner to resolve their issues. Meanwhile, the Indonesian government has begun to provide temporary shelter for migrant workers and is channeling resources to create crisis centers (shelters) for victims of violence in Taiwan. Between January and August 2014, there were 16 TKI in Shelter Taoyuan, 8 in Shelter Taichung, and 6 in Shelter Zhongli (IETO, 2014). However, most of these shelters are small, representing isolated, ad hoc efforts to address the needs of migrant workers.

Other self-help institutions exist to which migrants may turn in their difficulties, one example being the *Toko Indonesia* (Indonesian store). Indonesian stores can distinguish themselves as non-formal migration agencies, as the proprietors can help immigrants with their problems and thereby be assured of attracting Indonesian migrant clients. From their standing among Indonesians in Taiwan, they serve as brokers between troubled Indonesian migrant workers and the Taiwanese government (immigration office or police), as well as translators and

agencies for solving administrative problem. The relationship between entrepreneurs and migrant workers, in a broad sense, shows the possibility of empowerment and capacity building in Indonesian migrant society in Taiwan. However, it is important to note that adequately addressing the needs of migrant workers who have been cheated, exploited, or abused requires a strong, well-coordinated response by various organizations and strength of political will.

NOTES FOR IMPROVEMENT

In this case, there are three important situations that need improvement if migrant worker problems are to be addressed: education of workers, equal rights, and joint cooperation (Setyawati 2013: 275– 277; Farbenblum et al, 2013: 24; Irianto & Truong 2014: 37). Educating and training prospective migrant labors is vital to the improvement of their knowledge of basic rights and reduced number of mistreatment cases by their prospective employers. However, based on Indonesian Law No 39/2004, the Indonesian government has assigned the right to educate workers to private agencies. In the context of migration as an industry, agencies have advanced in terms of business aspects rather than in educating migrants. The Indonesian government's only function is to monitor whether the workers have received adequate training through the Final Pre-Departure Briefing program (*or Pembekalan Akhir Pemberangkatan/PAP*) (IOM, 2010), and in education, the government has not been effective. In terms of migrant rights, both governments are obliged to ensure workers' basic human rights, including the right to return to their home countries, the right to be informed of working conditions before taking up employment, and the right to form trade unions. Unfortunately, migrant workers have often become isolated machines, deprived of the freedom and opportunity to claim and exercise their rights (Fuch 2011; Li 2011: 139-151). In regard with institutional endeavors, joint cooperation among different local NGOs, and between Indonesia and other related international

organizations in Taiwan, is quite limited (Li 2011: 139-151). Thus, at least in Taiwan, the three basic aspects in which migrant improvement is required should be studied further.

We should note one important program regarding placement fees for working abroad. In December 15, 2010, the Indonesian Government launched a business credit program (*Kredit Usaha Rakyat, KUR*), designed to give Indonesian workers the ability to access bank credit for paying their placement fees. Interest rates for financing credit are set at a maximum of 22 percent per annum, for a maximum of three years and not to exceed three years' worth of deductions from the migrants' contracts (see for detail Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi 2014: 9-13). However, this scheme lacks consideration of the migration process and the worker administration procedures, as already explained above. For instance, placement fees in Taiwan are theoretically the employers' responsibility and are charged to the workers as one month's salary. In fact, all administration fees, such as tickets, visas, and training fees are charge to migrants and they have to pay it over 9-10 months through salary deductions. Other criticisms of this business credit program are the demanding banking regulations, such as a fixed payment time, the requirements for a letter of guarantee and complicated request letter, and interest rates that are still high compared to those of private banking and migrant company agencies; thus, this programs needs further evaluation. In this case, private agencies offer more flexibility administratively, and they are better coordinated with local migrant manpower agencies. Thus, migrant workers are still disadvantaged subjects of the migration industry schemes.

Another aspect for improving migrant protection and empowerment is migrant group's solidarity. I refer to the idea of bonded solidarity (Portes 1995), which itself is the source of collective work, embodied in the form of cooperation among Indonesian migrants in Taiwan. In my study (Yuniarto 2014), collective work is deter-

mined by the financial limitations of the migrants, the long distances required to spread information, and networking among migrant organizations in Taiwan. The purpose of the collective work model is to strengthen individual, organizational or religious kinship. Collective work, rather than being simply for economic purposes or group networks, forms the basis for long-term group identity, as Vertovec (1999) and Lewellen (2002) have shown, and sets migrants off from other ethnic groups. As observed, Indonesian migrant communities in Taiwan tend toward collectives, indicating that they are more unified and ecumenical than they are in their homeland. They are certainly easily affected by acts of love and kindness from their friends in the host society, such as the forming of migrant group associations. This exemplary collective work helps migrant workers to bring their homeland values and apply them in the host country, which can affect group solidarity and help migrants face their problems. As Atin Savitri (chairman of the ATKI Taiwan) has said, "...one problem faced by Indonesian migrant workers in Taiwan is that they do not have the right to participate at local trade unions, so in any problem they face, they don't have the same rights as local workers. Indonesian migrant workers have no power to solve their problems through the courts or mediation from third parties. They are more likely to rely on a friend." Thus, it is necessary to explore both solidarity and social networks as new challenges to migratory studies in Taiwan, whose complexities seem to deserve a more detailed empirical investigation. The ability to overcome obstacles in the migration process and in the receiving nation is not enough in itself; migrants also need socialization with friends to solve their fragmentation.

CONCLUSION

The experience of Indonesian migrants in Taiwan indicates that the migration industry has largely reduced everything to a matter of supply and demand, the profit motive being the ultimate aim. This approach dehumanizes migrant workers,

making them into nothing more than economic commodities to be bought and sold. This paper has explored the migration industry and migrant situation in Taiwan, revealing that migrants are trapped in debt. This condition arises from the debtor's pledge of his or her personal services, or those of a person under his or her control, as security for a debt. All these challenges regarding human slavery are just the logical endpoint, the most extreme form separating the human economy from the commercial economy). As Graeber (2011) shows, there is and always has been a curious affinity between wage labor and slavery (p. 163), whether an individual has been sold or simply rented out, but the involvement of money belittles individual identity until the person is capable of doing his or her duty (Graeber 2011: 352). However, this study demonstrates the salience of the migration industry and its socio-economic implications among Indonesian migrants in Taiwan. Although migrant workers make an important contribution to economic development in their home countries, the attention to improving their protection and empowerment both inside and outside the country is still inadequate.

ACKNOWLEDGEMENTS

Many thanks to Dr. Lan Pei Chia, Dr. Li Fang Liang, Dr. Paul Joseph Lim and the participants in *Debt, Slavery, And The Role Of State And Brokers Agent In Between* seminar for thought-provoking discussions on an earlier draft of this study. The research for this study was supported by a grant from the Taiwan Foundation for Democracy for an International Visiting Fellow 2014.

REFERENCES

- Adler, R. (2000). "Human Agency in International Migration: The Maintenance of Transnational Social Fields by Yucatecan Migrants in a Southwestern City". *Mexican Studies/ Estudios Mexicanos*, 16 (1), 165-187.
- Allain, J. (Ed.). (2012). *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*. UK: Oxford University Press.
- American Institute in Taiwan's. (2013). *Trafficking in Persons Report Taiwan*. Retrieved from <http://www.ait.org.tw/en/officialtext-ot1306.html>
- Anderson, B. (2012). "Who Needs Them? Care Work, Migration and Public Policy". *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 30 (1), 45-61.
- Anwar, L. A. (2013). "Stories of Lives and Culture of Indonesian Migrant Workers in Taichung City". Master's Thesis. Taiwan: Department of History, Chung Hsing University.
- Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. (2011). *The New Slave in the Kitchen: Debt Bondage and Women Migrant Domestic Workers in Asia*. Thailand: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD).
- Ananta, A. (2009). "Estimating the Value of the Business of Sending Low Skilled Workers Abroad: An Indonesian Case". Paper presented, The XXVI IUSSP International Population Conference, September 27 - October 2, Marrakech, Morocco.
- Council of Labor Affairs (CLA). (2003). *Monthly Bulletin of Labor Statistics* (April 2003). Taipei: Executive Yuan, Republic of China.
- Council Labor Affairs, CLA. (2013). *Foreign Workers in Productive Industries and Social Welfare by Nationality*. Retrieved from <http://statdb.cla.gov.tw/html/mon/c12030.pdf>.
- Davidson, J. O'Connell. (2013). **Troubling freedom: Migration, Debt, and Modern Slavery**. *Migration Studies*, (1), 176-195.
- Faist, T. (2014). *Brokerage in Cross-Border Migration: From Networks to Social Mechanisms*, Working Papers (121). Bielefeld University: COMCAD Arbeitspapiere.
- Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia*. Australia: Open Society Foundations.

- Fuch, R. (2011). *Human Trafficking of Legal and Illegal Migrant Workers in Taiwan*. Taiwan: Hope Worker Center.
- Global Alliance against Traffic in Women, “ATKI’s FPAR Research Report. (2010). *The Impact of Excessive Placement Fees on Indonesian Migrant Workers (IMWs) and Their Families*. Retrieved from http://www.gaatw.org/FPAR_Series/FPAR_ATKI.2010.pdf.
- Gonzales, J. (2013). “Philippine labor migration: Critical dimensions of public policy”. In D. Setyawati (Ed.), *Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines* 6 (2), 264-280. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Graeber, D. (2011). *Debt: First 5,000 Years*. New York: Melville House Publishing.
- Harney, R. (1977). “The Commerce of Migration”. *Canadian Ethnic Studies*, 8, 42-53.
- Hernández-León, Rubén. (2005). *The Migration Industry in the Mexico-U.S. Migratory System*. Los Angeles: California Center for Population Research, University of California.
- Heyzer, N. (2002). “Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework”. International Conference on The Human Rights Challenge of Globalization: Asia-Pacific-US: The Trafficking in Persons, Especially Women and Children Honolulu, Hawaii 13-15 November 2002.
- Human Rights Watch. (2006). *Swept Under the Rug: Abuses against Domestic Workers around the World*, 18 (7C). Retrieved from <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf>
- Human Rights Watch. (2013). *Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor*. Retrieved from http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor.
- IETO. (2014). *Dokumen Imigrasi dan Tenaga Kerja*, Retrieved from http://kdei-taipei.org/id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=59.
- IETO. (2014). *Siaran Pers KDEI Bulan Mei 2014*. Retrieved from http://kdei-taipei.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=492:siaran-pers-kdei-bulan-mei-2014&catid=34:berita&Itemid=55.
- Indonesian Labor Association. (2010). *The Impact of Excessive Placement Fees on Indonesian Migrant Workers (IMWs) and Their Families*. Association of Indonesian Migrant Workers & ATKI Limbangan.
- Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi. (2014, March). Mendorong Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan*, 4 (3).
- Kyle, D., & Liang, Z. (2001). *Migration Merchants: Human Smuggling from Ecuador and China*. Working Paper, 43. San Diego, CA: Center for Comparative Immigration Studies, UCSD.
- Lan, Pei-Chia. (2003). Political and Social Geography of Marginal Insiders: Migrant Domestic Workers in Taiwan. *Asian and Pacific Migration Journal*, 12 (1-2).
- Lewellen, T. C. (2002). *The Anthropology of Globalization: Cultural Anthropology Enters the 21st Century*. Westport: Bergin & Garvey.
- Liang, L-Fang. (2006). “Racialized and Gendered State: Migrant Labor Policy in Taiwan. No detail information”. International Workshop the Interdependence of Migration Politics and Demography, Irmgard Coninx Stiftung.
- Li, William D. H. (2011). Developmental State, Human Rights and Migrant Workers. *Development and Society*, 40 (1).
- Mafruhah, I., et.all. (2012, March). The Welfare of the Indonesian Migrant Workers (TKI) in the Land of a Malay Nation: A Socio-Economic Analysis. *Southeast Asian Journal of Social and Political Issues*, 1 (2), p. 246.

- Migrant Struggle. (2012). *Hapus Biaya Penempatan yang Sangat Tinggi (Overcharging) dan KUR bukan Jawaban atas Overcharging!*. Retrieved from <http://migrantstruggle.wordpress.com/page/3/>
- O'Neill, Fr. Peter. (2012). Taiwan Migrants' Labor System: The Catholic Church in Asia Cares for Migrants in Taiwan. *Hsinchu Diocese Taipei*, Taiwan.
- Pawestri, R. (2011). "Job Satisfaction of Indonesian Workers in Taiwan". Master's Thesis. Taiwan: International Master Program in Asia Pacific Studies, College of Social Sciences, National Chengchi University.
- Portes, A. (1995). *The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship*. New York: Russell Sage Foundation.
- PSDR LIPI. 2009. *Pengelolaan Remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi Remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- RI Migrant Workers Remittances Amounted to Rp 88.6 Trillion in 2013. (2014, January 13). *The Jakarta Post*.
- Rodríguez, N. (1996). "The Battle for the Border: Notes on Autonomous Migration, Transnational Communities, and the State. *Social Justice*", 23 (3), 21-37.
- Salt, J., & Jeremy S. (1997). "Migration as a Business: The Case of Trafficking". *International Migration*, 35, 467-494.
- Setyawati, D. (2013). "Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines". *Austrian Journal of South-East Asian Studies (ASEAS)*, 6 (2), 264-280.
- Sihombing, R. (2008). "A Study of Indonesian Irregular Migrant Workers in Taiwan". Master's Thesis. Taiwan: Faculty of Foreign Affairs Police Department, Central Police University.
- Silvey, R. (2004). "Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia". *Political Geography*, 23, 245-264.
- Spaan, E. (1997). Teikong's and Calo's: The Role of Middleman and Brokers in Javanese International Migration. *International Migration Review*, 28 (1), 93-210.
- Sulistiyowati I., & Thanh-Dam T. (2014). From Breaking the Silence to Breaking the Chain of Social Injustice: Indonesian Women Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. *Migration, Gender and Social Justice: Perspectives on Human Insecurity, Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace*, 9.
- Susilo, W. (2010). *Agenda Pembaharuan Kebijakan Perburuhan*. Retrieved from <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=2&artid=814>.
- Surak, K. (2011). *Notes on the Migration Industry and Developmental States in East Asia*. Working Paper, EUI Migration Working Group.
- Trafficking in Persons Report Taiwan. (2013). 2013 Republic of China (Taiwan) Trafficking in Persons Report. Republic of China (Taiwan): National Immigration Agency.
- Vertovec, S. (1999). *Migration and Social Cohesion*. Aldershot: Edward Elgar.
- Widyastuti, R. (2014). "Social Relations and Interactions of Muslim Ethnic Minorities in Taiwan: Case Study of Indonesian Muslim and Chinese Muslim". Master's Thesis. Taiwan: International Master's Program in Asia-Pacific Studies, National Chengchi University.
- Workers send home U.S. \$6 billion. (2012, January 02). *The Jakarta Post*.
- Yuniarto, R. (2014). "Making Connection: Indonesian Migrant Entrepreneurial Strategies in Taiwan". *Journal of Identity and Migration Studies*, 8 (1), 95-119.

PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK DI RAKHINE MYANMAR TAHUN 2012–2013

Sandy Nur Ikfal Raharjo

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
sandy.raharjo@gmail.com*

Diterima: 14-03-2015

Direvisi: 16-04-2015

Disetujui: 09-06-2015

ABSTRACT

In 2012–2013, a communal conflict took place in Rakhine, Myanmar. Religion identities between Muslim minority and Buddhist majority have been made use to raise violence among parties. This paper tries to analyse whether the differences in religion identity played as structural/root factor of the Rakhine conflict. Through literature review, the result of study shows that religion identity issue was intentionally played by securitizing actors to mobilise people and to accelerate conflict, in order to pursue their own real interest of power domination, land ownership and business chance. Besides, this research also identifies several prolonged discriminative policies and low economic levels as the structural factor of the communal conflict. This paper suggests that stakeholders should empower moderate monk in promoting interfaith dialogue, involve impartial third party as mediator, and remove all discriminative policies as the ways to optimize the ongoing conflict resolution process.

Keywords: Myanmar, religion identity, communal conflict.

ABSTRAK

Pada tahun 2012–2013, terjadi konflik komunal di Rakhine, Myanmar. Identitas agama antara minoritas Muslim dan Mayoritas Budha pun dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan. Tulisan ini mencoba menganalisis apakah perbedaan identitas agama tersebut benar-benar berperan sebagai faktor struktural/akar penyebab konflik Rakhine. Melalui studi pustaka, hasil kajian menunjukkan bahwa isu identitas agama telah dimainkan secara sengaja oleh aktor-aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dan mengakselerasi konflik, dalam rangka mengejar kepentingan riil mereka akan dominasi kekuasaan serta kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi kebijakan diskriminatif yang berkepanjangan dan tingkat ekonomi yang rendah sebagai faktor struktural penyebab konflik. Untuk mengoptimalkan proses resolusi konflik, kajian ini menyarankan para pemangku kepentingan agar memberdayakan kelompok biksu moderat dalam mempromosikan dialog antaragama, melibatkan pihak ketiga yang imparisial sebagai mediator serta menghapus semua kebijakan diskriminatif.

Kata kunci: Myanmar, identitas agama, konflik komunal.

PENDAHULUAN

Agama merupakan salah satu elemen peradaban manusia yang sangat penting dan berpengaruh. Pada satu sisi, agama menjadi panduan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hampir semua agama di dunia mengajarkan manusia tentang nilai-nilai kebaikan dan perdamaian agar dapat hidup dengan selamat. Pada sisi lain, agama juga menjadi sumber identitas individu dan kelompok yang sangat kuat. Kuatnya identitas agama ini kemudian memunculkan perspektif *ingroup-*

outgroup di mana orang yang beragama sama dianggap sebagai kawan dan saudara, sementara orang yang memeluk agama lain dianggap sebagai pesaing, bahkan diasosiasikan sebagai lawan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi agama, atau disebut juga dengan ambivalensi agama, yakni agama di satu sisi mengajarkan kebaikan dan perdamaian, tetapi pada sisi lain sering menjadi isu penyebab pecahnya konflik dan kekerasan (Appleby 2000; Basedau dkk. 2011; Philpott 2007). Dalam konteks ini, Kimball (2003) seperti dikutip oleh

Taufik (2014) menjelaskan bahwa ada lima faktor yang membuat agama dapat menjadi busuk dan mendorong terciptanya kekerasan, yaitu klaim kebenaran mutlak, kepatuhan buta pada pemimpin agama, kecenderungan pada zaman ideal, pembenaran segala cara untuk mencapai tujuan, dan penyeruan perang suci yang ofensif.

Konflik yang membawa isu agama umumnya berpotensi menjadi konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan (*intractable conflict/unnegotiable conflict*) dan berlangsung lama (Jeong, 2008). Selain itu, konflik berbasis agama juga dapat menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas, di mana kelompok-kelompok etnis tertentu menjadi pemeluk dari agama yang berbeda sehingga dikenal dengan istilah konflik etnis dan agama (*ethnoreligious conflict*) (Fox 2002; Kadayifci-Orellana 2009). Beberapa contoh konflik klasik yang melibatkan isu agama dan masih berlangsung hingga sekarang adalah konflik Israel-Palestina antara Islam dengan Yahudi, konflik di Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan, konflik di Kashmir antara Islam dengan Hindu, konflik di Filipina Selatan antara Islam dengan Katolik, dan konflik di Thailand Selatan antara Islam dengan Budha. Di satu sisi konflik-konflik tersebut belum terselesaikan, kini muncul lagi konflik-konflik berbau agama yang baru, misalnya konflik Kristen-Islam di Republik Afrika Tengah dan Nigeria serta yang terdekat dan cukup kontemporer adalah konflik Islam-Budha di Rakhine, Myanmar.

Konflik di Rakhine-Myanmar menarik karena walaupun bersifat internal, tetapi pengaruhnya dirasakan oleh negara tetangga dan sekawasan, termasuk Indonesia. Hal ini terkait dengan banyaknya orang-orang Rohingya yang dipaksa melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara tersebut. Konflik ini mulai memicu kekerasan fisik pada Juni 2012 dan terus menghangat hingga tahun 2013. Banyak literatur menyebutkan konflik ini sebagai konflik etnis, yaitu antara orang Rohingya yang minoritas dengan orang Rakhine yang mayoritas. Namun, penulis mengidentifikasikannya sebagai

konflik yang lebih berbau agama karena target penyerangan orang-orang Budha Rakhine tidak hanya terhadap orang-orang muslim dari “etnis” Rohingya, tetapi juga orang-orang muslim dari suku lain seperti Kaman (*Human Right Watch* [HRW] 2013; Morada 2012).

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah benar bahwa agama (kepentingan eksistensi agama) merupakan faktor struktural terjadinya konflik di Rakhine-Myanmar? Ataukah isu agama hanya dijadikan sebagai alat mobilisasi demi mencapai kepentingan yang lain? Pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini. Pertama, akan disajikan kerangka teori mengenai hubungan antara agama dengan konflik. Kedua, akan dipaparkan analisis konflik yang terdiri atas lokasi, kronologi, aktor, dan isu (Malik 2005). Ketiga, akan dijelaskan analisis terhadap peran identitas agama dalam konflik tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap upaya resolusi konflik yang sudah diupayakan, apakah sudah tepat sasaran mengenai isu struktural konflik atau belum, dan bagaimana rekomendasi ke depan.

HUBUNGAN AGAMA DAN KONFLIK: TINJAUAN TEORETIS

Sebelum membahas hubungan agama dengan konflik secara teoritik, akan dibahas dahulu definisi mengenai konflik, agama, dan konflik agama. Konflik secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih aktor berjuang untuk mendapatkan sumber langka dalam waktu yang sama (Wallensteen 2002). Sumber langka tersebut dapat berupa sumberdaya alam, kekuasaan, dominasi ideologi serta nilai, dan lain-lain. Kompetisi terhadap sumber langka yang sama tidak harus benar-benar terjadi secara nyata, karena dapat juga aktor-aktor konflik tersebut mempunyai posisi yang dipersepsikan dan diyakini berlawanan dalam satu waktu yang sama (Swanström & Weissman 2005 dalam Irewati dkk. 2015). Jika melihat pada Model Daur Hidup Konflik Swanström dan Weissman (2005), maka untuk dapat membedakan antara level sengketa

dengan level konflik adalah terjadinya kekerasan terbuka terhadap pihak lawan.

Sementara itu, definisi agama menurut Fox & Sandler mencakup lima dimensi berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik. Pertama, agama adalah salah satu dasar/basis bagi identitas. Dalam pengertian ini, agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama, kebangsaan, tempat tinggal, dan etnisitas membentuk identitas dari suatu masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. Kedua, agama mencakup sistem kepercayaan yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Semakin besar kepercayaan agama terlibat (dalam berperilaku), semakin berkurang kemungkinan terjadinya kompromi dan akomodasi. Ketiga, doktrin agama atau teologi juga dapat memengaruhi perilaku. Doktrin agama ini dijadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan. Keempat, agama menjadi sumber legitimasi yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan, sekalipun pihak lain menganggapnya tidak dapat dibenarkan, seperti tindakan bom bunuh diri. Kelima, agama diasosiasikan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap memiliki otoritas dalam memberikan pendapat atas nama agama. Dengan demikian, mereka mempunyai dasar untuk dapat melakukan mobilisasi massa (Fox & Sandler 2005).

Adapun konflik agama (*religious conflict*) sendiri setidaknya dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana agama itu sendiri menjadi pusat ketidakcocokan (bersifat substansial). Kedua, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana aktor-aktor yang terlibat menganut tradisi agama yang berbeda sehingga memiliki identitas yang berbeda pula (bersifat fungsional). Dalam tulisan ini, definisi kedua yang digunakan dan dimaksudkan sebagai konflik agama (Lindberg 2008). Di Indonesia sendiri, pengertian kedua ini lebih sering diistilahkan sebagai konflik antarumat beragama (Matulesy 2013; Rahmi 2012; Zainuddin 2013).

Setidaknya terdapat tiga hipotesis yang menghubungkan faktor agama dengan konflik. Pertama, dalam pandangan sosio-psikologis, identitas keagamaan yang beragam membentuk identitas kelompok dan dapat menghasilkan eskalasi dinamika antarkelompok. Orang akan cenderung untuk mengistimewakan orang yang beragama sama karena dianggap sebagai satu kelompok dibanding orang lain yang identitas agama kelompoknya berbeda. Hal ini meningkatkan potensi eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain (Basedau dkk. 2011). Kedua, identitas keagamaan bersifat khusus karena terhubung dengan ide, norma, dan nilai bersama yang dilegitimasi oleh sumber transedental. Sifat transedental kemudian menciptakan klaim kebenaran mutlak/absolut (dari Tuhan) yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Oleh karena itu, identitas berdasarkan norma dan nilai transedental tersebut sulit, bahkan tidak dapat dinegosiasikan/dikompromikan. Hal ini meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan oleh aktor agama terhadap mereka yang tidak percaya atau menganut tradisi agama yang berbeda. Melalui klaim sebagai yang paling benar, mereka menganggap dirinya tidak bersalah ketika melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan mereka termotivasi karena adanya pahala jika melakukan hal tersebut (Basedau dkk., 2011). Dengan kata lain, konflik agama biasanya dilihat sebagai permainan menang-kalah (*zero sum game*), di mana pihak yang kalah akan memulai lagi perkelahian begitu ia mendapatkan kesempatan (Lindberg 2008). Ketiga, faktor agama sering dipahami sebagai sumber mobilisasi yang memungkinkan dalam konflik. Pemimpin (agama) dapat (dengan mudah) memobilisasi agama untuk memobilisasi pengikutnya guna melakukan aksi kolektif dan ikut terlibat dalam konflik. Padahal, konflik tersebut mungkin sebenarnya bukan tentang masalah agama, tetapi berakar pada masalah lain seperti politik dan sosio-ekonomi (Basedau dkk. 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya juga membuktikan secara kuantitatif hubungan antara konflik dengan agama. Penelitian Basedau dkk.

(2011) menyimpulkan bahwa agama memainkan peranan signifikan dalam konflik bersenjata di Afrika. Polarisasi agama ini rawan konflik hanya jika dikombinasikan dengan diskriminasi agama dan ketegangan agama (Basedau dkk. 2011). Fox dalam Lindberg (2008) juga menemukan bahwa berdasarkan uji statistik t-test, konflik dengan perbedaan agama cenderung menghasilkan lebih banyak korban meninggal serta intensitasnya lebih tinggi dibandingkan konflik tanpa perbedaan agama. Bahkan dalam penyelesaian konflik pun, Svensson menemukan bahwa kecil kemungkinan konflik agama diselesaikan dengan perundingan (Lindberg 2008).

Tiga hipotesis dan hasil penelitian tersebut menjelaskan mengapa konflik yang melibatkan isu agama cenderung berlangsung lama dan sulit diselesaikan. Bahkan jika pun diselesaikan dengan kemenangan salah satu pihak, konflik berpotensi untuk terjadi begitu pihak yang kalah mendapatkan kesempatan. Padahal, konflik agama yang terjadi umumnya justru berakar pada masalah-masalah non-agama. Oleh karena itu, resolusi konflik yang seharusnya diterapkan setidaknya harus mencakup dua hal. Pertama, menyelesaikan masalah-masalah akar penyebab konflik yang sesungguhnya. Kedua, membangun kembali hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut.

DEMOGRAFI RAKHINE-MYANMAR SEBAGAI KONTEKS SOSIAL KONFLIK

Konteks sosial merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi dinamika konflik (Gelfand & Cai 2004). Perbedaan tempat dan budaya akan mengakibatkan perbedaan karakteristik konflik. Oleh karena itu, pemahaman tentang konteks sosial di Myanmar, terutama negara bagian Rakhine, menjadi sangat penting untuk dapat memahami konflik antara muslim Rohingya dengan budha Rakhine.

Sebagai sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, Myanmar secara sosial

ekonomi masih tergolong negara berkembang. Pendapatan per kapita pada tahun 2011 masih tergolong rendah, yaitu US\$1.144. Tingkat pendidikan warganya juga cenderung rendah, yaitu pada level sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Sementara itu, wilayah Myanmar terbagi menjadi 7 negara bagian yang dinamai berdasarkan etnis mayoritas yang menjadi penduduknya dan 7 wilayah yang didiami oleh mayoritas etnis Burma. Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2011 berkisar 48,337 juta jiwa. Adapun komposisi etnis penduduknya menurut Central Intelligence Agency (2013) adalah etnis Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2%, dan lain-lain 5%. Di sisi lain, komposisi agama penduduknya meliputi 89% Budha, 4% Islam, sisanya Kristen dan kepercayaan lain (Habibollahi, McLean, & Diker 2013).

Myanmar dikelilingi oleh banyak negara, yaitu India, Tiongkok, Laos, Thailand, dan Bangladesh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kelompok etnik di negara ini begitu banyak jumlahnya, di mana sebagiannya memiliki kemiripan dengan etnis yang mendiami negara tetangga. Terdapat lebih dari 135 kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya dan bahasanya sendiri-sendiri. Etnis terbesar adalah Burma (Bamar). Mereka berasal dari Sino-tibet dan tinggal di dataran tengah Myanmar. Agama mayoritas etnis Burma adalah Budha Theravada. Bahasa dan budaya mereka menjadi bahasa dan budaya nasional Myanmar. Mereka juga menguasai pemerintahan dan militer (Oxford Burma Alliance, tanpa tahun). Dominasi budaya dan agama etnis Burmalah yang menjadi faktor determinan bagi konteks sosial Myanmar.

Walaupun mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha, kondisi yang unik terjadi di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini, selain terdapat etnis Rakhine yang memeluk agama Budha Theravada, terdapat juga etnis rakhine/Arakan yang beragama Islam. Mereka mengidentifikasi diri sebagai Arakan Muslim. Mereka memiliki adat istiadat

seperti orang-orang Budha Rakhine dan juga menggunakan bahasa Rakhine. Selain itu, terdapat juga “etnis” Rohingya yang juga beragama Islam, tetapi memiliki ciri fisik, budaya, dan bahasa yang lebih mirip dengan dialek Chittagonian yang berasal dari bahasa Bengali yang banyak digunakan di Bangladesh (Minority Rights Group International, 2008). Jumlah orang Rohingya sendiri diperkirakan meliputi 4% dari jumlah penduduk Rakhine (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dengan demikian, walaupun Rakhine merupakan negara bagian yang jumlah orang muslimnya paling banyak (sekitar 45% dari total orang Muslim di seluruh Burma), bila dibanding dengan jumlah penduduk Rakhine yang Budha, jumlahnya sangat kecil. Komunitas muslim ini tinggal di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, dan Kyauktaw. Dengan demikian, orang muslim, baik muslim Rakhine maupun muslim Rohingya, menjadi kelompok minoritas di Rakhine maupun di Myanmar secara umum.

Sejak pemerintahan junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan, terutama terhadap muslim Rohingya yang dianggap sebagai orang asing, bukan asli orang Burma. Kebijakan “Burmanisasi” dilakukan melalui marginalisasi orang-orang muslim Rohingya. Akses mereka untuk berpindah, menikah, dan mencari pekerjaan dibatasi dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang sogokan. Mereka juga hanya diperbolehkan memiliki maksimal dua anak per keluarga dan tidak diberi sertifikat kelahiran untuk anak-anak mereka. Hak anak-anak muslim Rohingya untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar juga sangat dibatasi. Bahkan, pada tahun 1982 Pemerintah Myanmar mengeluarkan UU kewarganegaraan baru yang tidak memasukkan Rohingya sebagai warga negara Myanmar (Oxford Burma Alliance, tanpa tahun). Akibatnya, sekitar 800 ribu Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan apapun. Hal ini tentu menjadikan muslim Rohingya dalam kondisi tanpa perlindungan negara sehingga

rawan terhadap berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan (O’Brien, tanpa tahun). Diskriminasi agama juga terjadi di mana pemerintah junta militer mendeklarasikan dan hanya mengakui Budha sebagai agama nasional (*the religion of ‘true’ Burmese people*) (Hukil & Shaunik 2013). Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap orang-orang Muslim maupun pemeluk agama lainnya. Namun pada tahun 2011 terjadi perubahan politik yang signifikan di mana Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilu dan mulai lebih membuka diri dengan dunia internasional.

Dari penjelasan mengenai konteks sosial Myanmar, khususnya negara bagian Rakhine, terlihat bahwa identitas agama dan etnis dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi membuat masyarakat Myanmar rawan terhadap provokasi dan mobilisasi yang menggunakan isu identitas agama dan etnis. Meminjam pengandaian Malik (2005) dari Institut Titian Perdamaian, masyarakat Myanmar ibarat rumput kering yang mudah tersulut api. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya konflik antara kelompok Budha dengan kelompok Muslim di Rakhine yang cepat membesar dan melibatkan kekerasan massal.

KRONOLOGI KONFLIK

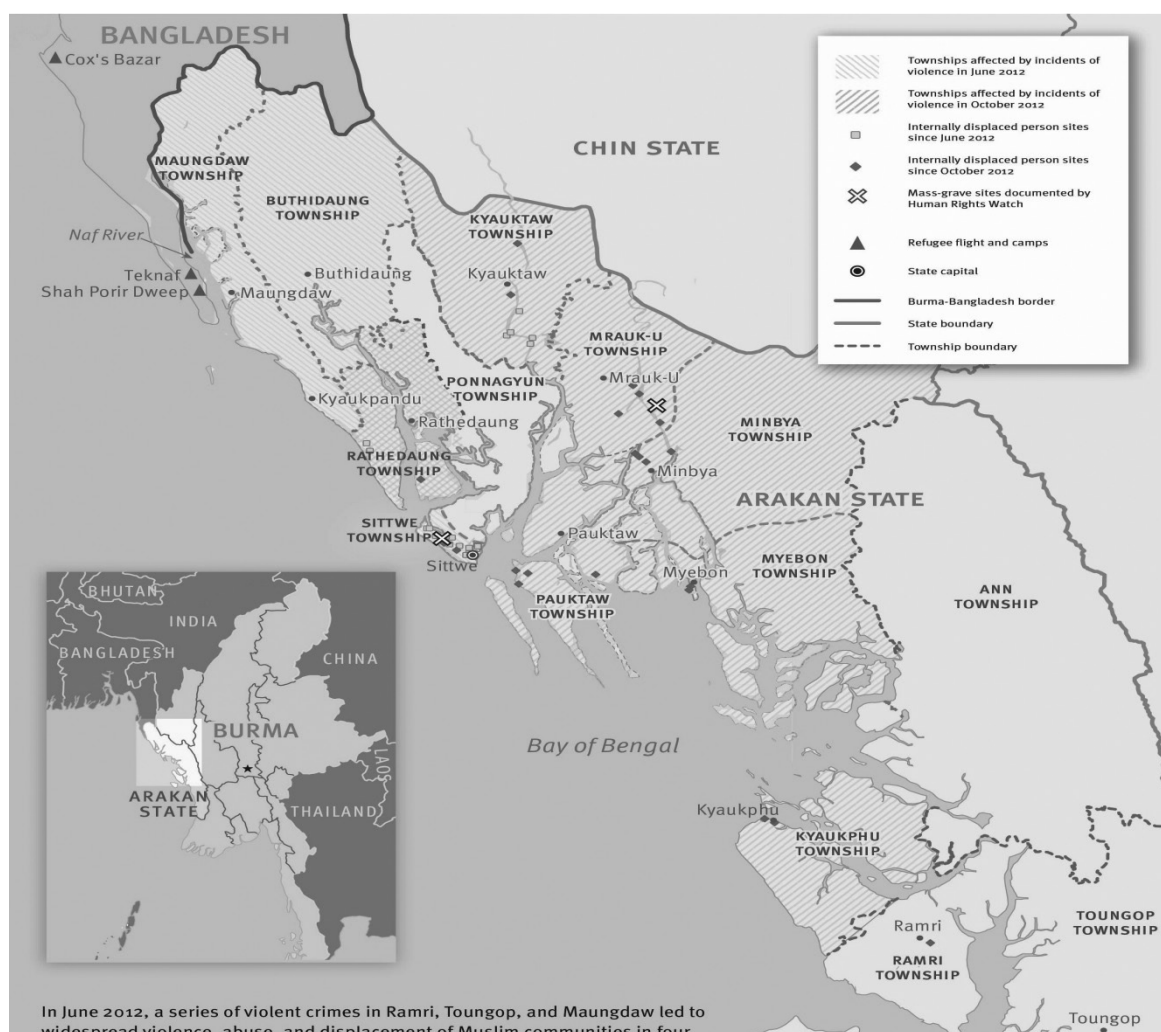
Kronologi di sini dimaksudkan untuk menggambarkan dinamika konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Budha di Rakhine. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika konflik. Salah satu yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Model Kurva Konflik (*The Curve of Conflict*) yang dikembangkan oleh Michael S. Lund (1996). Namun, model ini hanya sekedar menjelaskan tahap-tahap konflik apa saja yang sudah terjadi, tanpa ada rekomendasi bagaimana proses penyelesaiannya. Model lain yang dapat digunakan adalah Model Eskalasi Glasl yang dikembangkan oleh Friedrich Glasl. Model ini tidak hanya menganalisis sampai di

tahap mana konflik terjadi, tetapi juga memberi rekomendasi langkah yang dapat dilakukan saat konflik mencapai tahap tersebut. Tulisan ini akan menggunakan Model Eskalasi Glasl sebagai alat analisis kronologi konfliknya.

Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Budha yang diduga dilakukan oleh laki-laki muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Kejadian

tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan.

Peta Terdampak Konflik di Negara Bagian Rakhine Tahun 2012–2013



Sumber: Human Right Watch (2013). *All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*. USA: Human Right Watch.

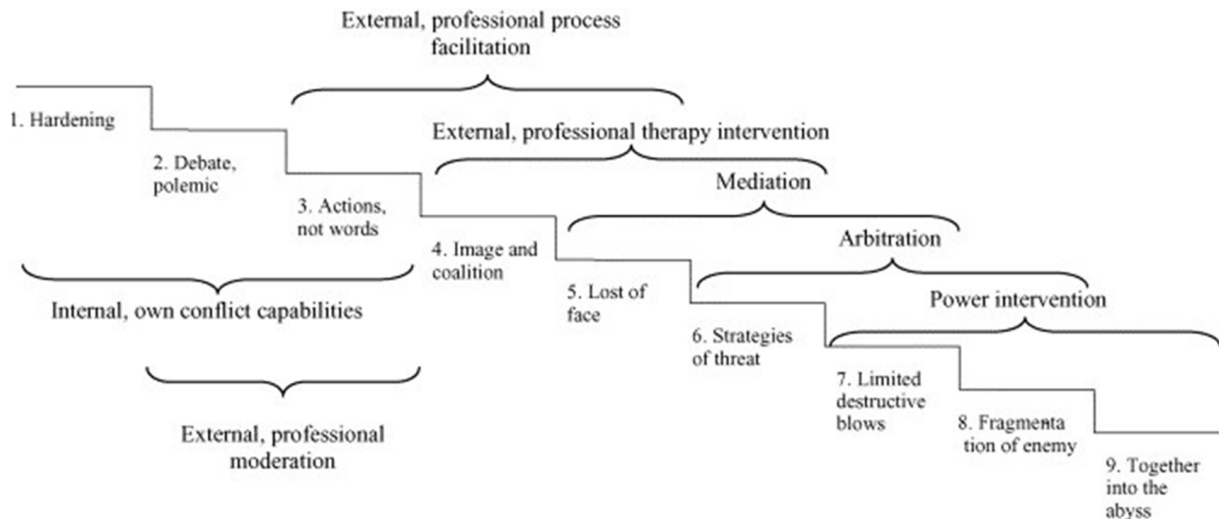
Berikut adalah kronologi terperinci dari konflik yang terjadi antara kelompok Budha yang mayoritas dengan kelompok Muslim yang minoritas di Myanmar pada tahun 2012–2013.

Berdasarkan kronologi tersebut, berikut adalah analisis konflik berdasarkan Model Eskalasi Glasl.

Kronologi Konflik Rakhine 2012–2013

Waktu	Peristiwa
28 Mei 2012	Terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Rakhine Budha berusia 28 tahun yang diduga dilakukan oleh tiga orang laki-laki Muslim di Kota Ramri.
3 Juni 2012	Terjadi pembunuhan terhadap 10 laki-laki muslim oleh sekelompok orang Rakhine Budha di dalam bus yang diduga memuat 3 pelaku pemerkosaan.
10 Juni 2012	Presiden Thein Sein mengumumkan kondisi darurat di negara bagian Rakhine setelah terjadi bentrokan mematikan antara kelompok Budha dengan Muslim Rohingya yang menyebabkan 88 orang tewas dan lebih dari 90.000 lainnya mengungsi.
12 Juli 2012	Presiden Thein Sein mengatakan kepada UNHCR bahwa Myanmar tidak akan bertanggung jawab terhadap “pelintas batas ilegal” Rohingya dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga mereka harus dipindahkan ke negara-negara ketiga yang bersedia menerima mereka.
18 Oktober 2012	Konferensi Solidaritas Para Biksu Arakan digelar dan menyebut para simpatisan Rohingya, termasuk mereka yang mengadvokasi perlindungan bagi hak asasi Rohingya, sebagai pengkhianat bangsa.
21 Oktober 2012	Kekerasan sektarian kembali terjadi di 9 kota di negara bagian Rakhine dan menyebabkan 35.000 orang yang sebagian besar Muslim mengungsi.
20 Maret 2013	Kekerasan komunal antara kelompok Budha dan Muslim kembali terjadi di Kota Meikhtila dan melebar ke beberapa wilayah di sekitarnya, menewaskan sedikitnya 40 orang dan membuat 12.000 orang lainnya lari mengungsi.
20 Mei 2013	Otoritas pemerintah di Distrik Maungdaw, Rakhine mengeluarkan aturan pembatasan dua anak terhadap keluarga Rohingya.
28 Mei 2013	Kekerasan anti-Muslim pecah di Lashio, negara bagian Shan. Kelompok Budha menghancurkan masjid, panti asuhan, dan bisnis (toko) milik orang Muslim, menyebabkan sedikitnya 14.000 orang Muslim mengungsi.
14 Juni 2013	Konferensi Pemimpin Budha digelar di Yangon, memproposalkan hukum pernikahan antaragama yang melarang perempuan Budha menikah dengan laki-laki Muslim, termasuk perlunya izin dari otoritas pemerintah bagi laki-laki Muslim yang akan berpindah agama menajdi Budha.
14 Juli 2013	Pengumuman pembubaran pasukan keamanan perbatasan (<i>border security force</i>) NaSaKa oleh Presiden Thein Sein. NaSaKa dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Rohingya, termasuk pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan.
20 Juli 2013	Status darurat di Meikhtila dicabut karena situasi disana dianggap sudah stabil.
25 Agustus 2013	Kelompok Budha membakar lusinan rumah dan toko milik orang-orang Muslim di Kanbalu, Divisi Sagaing.

Sumber: Global Centre for The Responsibility to Protect dan Human Right Watch (tanpat tahun)



Sumber: diolah kembali dari Presentasi Ichsan Malik dan Josephine R Marieta, *Intervensi Konflik*, di Universitas Pertahanan pada 16 Januari 2014. Sumber asli dapat dilihat di Friedrich Glasl (1997). *Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*. Bern: Paul Haupt Verlag.

Keterangan:

Tahapan/Posisi	Keterangan	Kognisi dan Sikap
1. <i>Hardening</i>	Posisi menguat dan mulai timbul konfrontasi. Masih terbuka kemungkinan penyelesaian konflik melalui diskusi.	Terjadi sejak 1962 ketika junta militer yang ultranasionalis menguasai pemerintahan. Mulai timbul kesadaran peran, pembentukan kubu-kubu baru dimulai, kecurigaan terhadap motif tersembunyi pihak lain. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan orang-orang Muslim Rohingya dari kewarganegaraan Myanmar.
2. <i>Debate, polemics</i>	Polarisasi dalam proses berpikir, merasa, dan berkemauan.	Mulai timbul kecurigaan terhadap perilaku pihak lain, fiksasi pada sudut pandang sendiri. Tergambarkan dengan kecurigaan bahwa orang-orang Muslim akan semakin berkembang dan dapat menguasai Myanmar.
3. <i>Action, not words</i>	“Bicara sudah tidak bisa membuahkan hasil lagi”. Strategi “ <i>fait accompli</i> ”, menghadapi lawan dengan data-data, mulai timbul aksi fisik.	Empati hilang, ada gejala mengenai proses pemahaman yang salah di kedua kubu. Adanya <i>ingroup conformity pressure</i> , antara lain melalui berbagai kebijakan dan perlakuan diskriminasi yang membuat orang muslim, terutama Rohingya kesulitan untuk berkembang dan kesulitan untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya.
4. <i>Images and coalitions</i>	Masing-masing kelompok bermanuver untuk memosisikan lawan dalam peran negatif dan akan mendorong penguatan peran ini. Mulai mencari dukungan dari orang-orang luar.	Kesadaran tentang hitam dan putih, <i>image</i> diri sebagai reaksi dari lawan. Misalnya melalui konferensi antarpara biksu yang mengeluarkan pernyataan bahwa para simpatisan Rohingya adalah pengkhianat bangsa.
5. <i>Lost of face</i>	Serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka. Tahapan eskalasi utama.	Lawan harus dipermalukan. Orang-orang Rohingya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan disuruh keluar dari wilayah Myanmar.

Tahapan/Posisi	Keterangan	Kognisi dan Sikap
6. <i>Strategies of threat</i>	Ancaman dan serangan balik. Konflik mulai terakselerasi dengan adanya ultimatum-ultimatum.	Aksi yang dilakukan hanya merupakan sebuah reaksi. Ada keinginan untuk mengontrol, timbul kemarahan. Wujudnya berupa pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Budha yang dibalas dengan pembunuhan 10 laki-laki Muslim.
7. <i>Limited destructive blows</i>	Penyerangan	Lawan tidak lagi dilihat sebagai manusia. Mulai ada proses dehumanisasi, nilai-nilai (<i>values</i>) mulai bergeser. Wujudnya berupa pembunuhan orang-orang Muslim berikut rumah dan properti mereka. Mereka juga melarang bantuan kemanusiaan dari luar masuk ke tempat-tempat pengungsian Muslim.
8. <i>Fragmentation</i>	Tindakan untuk menghancurkan lawan	Ketertarikan terhadap penghancuran secara besar-besaran terhadap lawan. Masih belum terjadi , karena buktinya kelompok Budha masih membiarkan adanya tempat-tempat pengungsian bagi waga Muslim di bawah pengawasan aparat keamanan.
9. <i>Together into the abyss</i>	Konfrontasi total tanpa ada kemungkinan untuk mundur kembali.	Menerima kehancuran diri asal lawan 'hancur'. Belum terjadi.

Berdasarkan analisis sebelumnya, konflik komunal di Rakhine sudah masuk pada tahap *limited destructive blows* (penyerangan yang bersifat destruktif). Menurut model Glasl, pada tahap ini seharusnya resolusi konflik sudah tidak dapat lagi mengandalkan kemampuan dan kemauan antarkelompok Budha dan Muslim yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Langkah resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau arbitrase pihak ketiga, dan juga sudah dapat menggunakan intervensi kekuatan (militer), dalam hal ini adalah negara.

AKTOR KONFLIK DAN KEPENTINGAN MEREKA

Berdasarkan telaah terhadap kronologi konflik, setidaknya ada tiga kelompok aktor utama dalam konflik Budha-Muslim di Rakhine Myanmar, yaitu kelompok muslim, kelompok Budha, dan pemerintah. Pada kelompok Muslim, mereka terdiri atas orang-orang etnis Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain seperti Kaman dan Rakhine Muslim. Sebagian telah mendiami

wilayah Rakhine sejak abad ke-15 (Than & Thuzar 2012) dan sebagian lagi mulai menempati wilayah Rakhine pada abad ke-19 dan ke-20 pada masa kolonialisme Inggris (O'Brien, tanpa tahun). Kelompok ini merupakan minoritas terhadap kelompok lawannya. Sebagai kelompok minoritas, mereka berkepentingan agar hak-hak hidup dasar mereka dapat terpenuhi, baik hasl sipil dan politik yang berupa pengakuan kewarganegaraan maupun hak ekonomi, soscial, dan budaya yang berupa akses terhadap pendidikan, kesehatan serta pengakuan terhadap identitas agama mereka yang berbeda dari agama nasional negara. Meskipun demikian, sejak tahun 1962 Pemerintah Myanmar telah menjalankan kebijakan diskriminatif, terutama terhadap Muslim Rohingya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlawanan terhadap diskriminasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perjuangan politik untuk mendirikan negara bagian muslim yang otonom. Bahkan, ada pula gerakan Mujahidin yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan menjadi negara yang merdeka. Namun, kelompok Mujahidin ini berhasil dikalahkan oleh Pemerintah Myanmar.

Beberapa kelompok bersenjata kecil yang terdiri atas para eksil Rohingya kemudian muncul, meneruskan perjuangan Mujahidin melalui lobi-lobi dan menginternasionalisasikan isu pengungsi Rohingya, terutama pada eksodus 1978 dan 1991–1992 (Than & Thuzar 2012). Kendati demikian, gerakan perjuangan bersenjata dan politik ini tampak tidak terlalu bergema di kalangan komunitas Rohingya dan Muslim Rakhine. Walaupun demikian, perjuangan sekelompok kecil orang-orang yang mengatasnamakan Rohingya telah menciptakan persepsi negatif bagi seluruh komunitas Rohingya dan orang-orang muslim di mata kelompok mayoritas Budha. Dengan jumlah populasi yang sedikit, kekuatan kelompok ini tentu jauh lebih kecil dari kelompok lawannya sehingga mereka sering menjadi target dan korban kekerasan konflik.

Pada kelompok Budha, setidaknya ada tiga pihak yang bersatu pada konflik ini. Pertama, para politisi dari *Rakhine Nationalities Development Party* (RNDP) yang berperan sebagai aktor yang menyekuritisasi isu agama dan etnis kepada warga Budha Rakhine. Kedua, para biksu beraliran keras yang juga menjadi aktor yang mensekuritisasi gerakan anti-Muslim Rohingya dan menyuarakan pengusiran warga Muslim dari pemukiman yang didominasi orang Budha. Salah satu pimpinannya adalah Biksu Wirathu yang dijuluki oleh media internasional sebagai “Burmese bin Laden”. Ia memproduksi *Digital Video Disc* (DVD) dan selebaran yang menyebarkan rumor melawan Muslim. Ia juga memimpin Gerakan 969 yang menghubungkan Budhisme dengan Nasionalisme Burma dan menyuarakan islamofobia/anti-Muslim (O’Brien, tanpa tahun). Walaupun demikian, ada pula beberapa biksu yang bersikap sebaliknya dengan membantu para pengungsi Muslim dan mempromosikan dialog antaragama sebagai salah satu cara penyelesaian konflik. Namun, jumlah mereka masih sedikit, bahkan oleh kelompok biksu garis keras yang mayoritas, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dibalik posisi mereka sebagai kelompok mayoritas yang mengopresi kelompok minoritas, sebenarnya

kepentingan mereka adalah pemenuhan dan pengakuan eksistensi kelompok mereka. Mereka tidak ingin keuntungan dan kekuasaan yang selama ini mereka pegang terancam oleh keberadaan orang-orang Muslim yang mulai berkembang dari segi jumlah populasi maupun segi ekonomi. Ketiga, masyarakat umum Budha Rakhine. Mereka berperan sebagai kelompok yang rentan diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah yang dikombinasikan dengan faktor elemen budaya dan agama akan tingginya kedudukan biksu dalam tatanan masyarakat, mereka akan mematuhi apa yang disampaikan oleh para biksu. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam konflik akan sangat bergantung pada aktor-aktor yang mensekuritisasi seperti para politisi dan biksu beraliran garis keras.

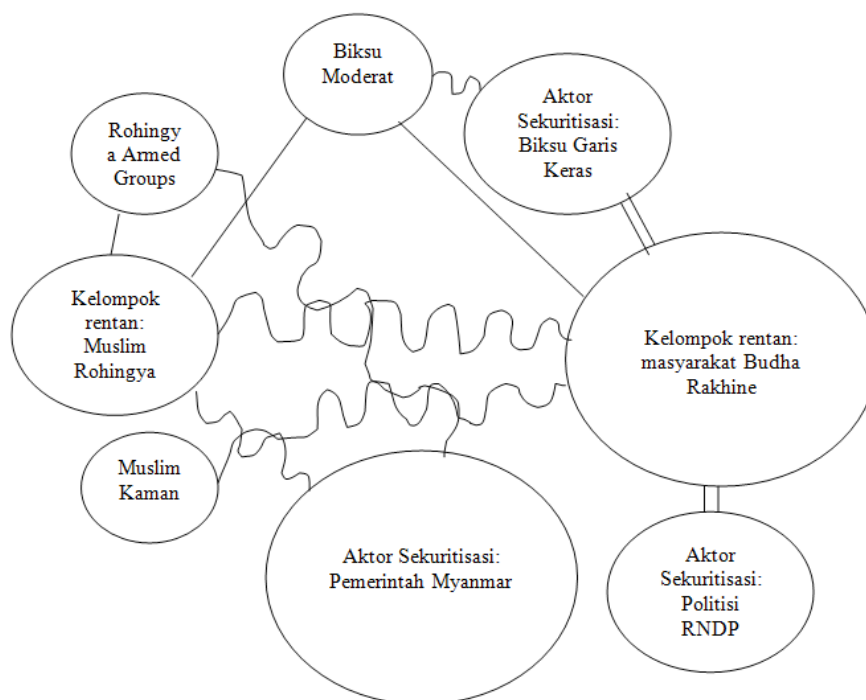
Aktor ketiga yang turut berperan penting dalam konflik adalah pemerintah. Mereka turut berperan sebagai aktor yang mensekuritisasi dengan mengatakan bahwa orang-orang Muslim Rohingya bukanlah bagian dari etnisitas asli Myanmar. Bahkan mereka juga meminta UNHCR untuk memindahkan para “pelintas batas ilegal” tersebut ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Selain berperan dalam mewacanakan Muslim Rohingya sebagai kelompok luar, pemerintah juga dianggap membiarkan kekerasan dilakukan oleh orang-orang Budha terhadap orang Muslim di Rakhine. Menurut laporan Human Right Watch, aparat keamanan pemerintah meminta senjata orang-orang Muslim dan berjanji untuk melindungi, tetapi begitu senjata diambil, mereka membiarkan orang-orang Rakhine Budha memukuli orang-orang Muslim. Aparat keamanan pemerintah juga ada yang dilaporkan terlibat aktif dalam pembunuhan dan penyiksaan terhadap minoritas muslim (Human Right Watch 2013). Padahal dalam konflik yang bersifat komunal seperti ini, pemerintah seharusnya dapat menjadi aktor fungsional yang membantu mendamaikan dua kelompok masyarakat yang berkonflik. Salah satu hipotesis penjelasannya

adalah pemerintah sengaja menciptakan konflik dan kekerasan ini dalam rangka mencapai kepentingan politik. Pemerintah ingin Aung San Suu Kyi berada dalam posisi dilema. Jika ia menyatakan dukungan terhadap perlindungan kelompok Muslim minoritas, ia akan kehilangan dukungan dari komunitas warga Budha yang merupakan mayoritas penduduk Myanmar. Jika ia tidak mendukung perlindungan terhadap kelompok minoritas tersebut, atau sekadar diam, ia akan mendapat kecaman dari para aktivis HAM dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya (O'Brien, tanpa tahun).

Berdasarkan analisis terhadap aktor seperti dijelaskan sebelumnya, didapatkan bahwa ada aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi isu agama dalam konflik sehingga memobilisasi kelompok-kelompok rentan untuk terlibat dalam

kekerasan massal. Aktor sekuritisasi ini terdiri atas para politisi dan biksu yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk Budha Rakhine. Kendati demikian, ada pula sekelompok biksu yang justru berperan sebagai aktor fungsional yang mempromosikan dialog antaragama untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, salah satu potensi penyelesaian konflik tersebut adalah dengan memperbesar peran dan suara para biksu fungsional ini sehingga menurunkan peran dan suara para biksu radikal. Kemudian terkait dengan peran pemerintah yang justru ikut mensekuritisasi konflik maka tekanan dari dunia internasional perlu diperkuat agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan konflik internal tersebut. Jika tidak dipenuhi, konsep *Responsibility to Protect* melalui intervensi kekuatan militer dari luar dapat menjadi faktor *deterrence* agar pemerintah Myanmar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Bagan 1. Hubungan dan Kekuatan Aktor Konflik Rakhine 2012–2013



Keterangan:

- = hubungan bersifat konflikual
- = hubungan bersifat kerja sama/aliansi taktis
- = hubungan bersifat aliansi strategis

ISU KONFLIK

Analisis isu konflik akan berfokus pada tiga jenis isu, yaitu pemicu, akselerator, dan struktural. Pada isu pemicu (*trigger*), tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan telah menimbulkan kemarahan masyarakat. Isu ini kemudian semakin berkembang bahwa pelaku kejahatan tersebut diduga adalah tiga orang laki-laki Muslim. Akhirnya, berita tersebut menimbulkan kemarahan warga Budha Rakhine (Human Right Watch 2013). Pada tahap ini, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang seharusnya merupakan ranah kejahatan dan hukum telah diseret dengan memasukkan elemen identitas agama. Jika saja kasus tersebut dapat dikelola sebagai hanya benar-benar kasus kejahatan tanpa embel-embel “perempuan Budha” dan “laki-laki muslim”, mungkin kejadian tersebut tidak akan mengeskalasi konflik dan kekerasan komunal.

Pada isu yang bersifat akselerator, sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, sudah ada perdebatan antarkelompok terkait isu orang-orang Muslim Rohingya apakah bagian dari etnis asli Myanmar atau bukan. Kelompok yang pro-Rohingya mengatakan bahwa mereka adalah penduduk asli Myanmar yang sudah menempati wilayah Rakhine jauh sebelum era kolonisasi Inggris. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Rohingya harus dicatat sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar dan diberikan hak kewarganegaraan. Di sisi lain, pemerintah dan kelompok yang anti-Rohingya yang lebih besar kekuatannya mengatakan bahwa orang Rohingya tidak pernah menjadi ras asli nasional di Myanmar, tetapi mereka adalah imigran dari Bengal yang datang setelah Perang Anglo-Burma tahun 1824. Sebagai imigran, mereka tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan (Than & Thuzar 2012). Selain isu penolakan sebagian besar warga Budha Myanmar terhadap pengakuan etnis Rohingya, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap orang-orang minoritas Rohingya. Populasi masyarakat Muslim Rohingya

terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut kemudian menimbulkan persaingan dengan orang-orang Budha Rakhine, baik dalam hal penguasaan lahan maupun dalam hal ekonomi/bisnis (Waluyo 2013). Hal ini semakin mempertebal kebencian terhadap kelompok lain dan menganggapnya sebagai lawan. Dengan demikian, kepentingan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan untuk menjaga eksistensi agama Budha, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi.

Pada isu yang bersifat struktural (mendasar), konflik di Rakhine pada tahun 2012–2013 sebenarnya merupakan puncak gunung es dari serangkaian kebijakan diskriminatif Pemerintah Myanmar sejak tahun 1962. Proses diskriminasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui pemisahan tempat tinggal warga muslim dengan warga mayoritas Budha, perampasan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan untuk tidak memberikan status warga negara bagi orang-orang Muslim Rohingya. Mereka diharuskan membayar ketika ingin mengunjungi desa tetangga. Mereka juga tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan ke lebih dari tiga kota. Mereka juga dibatasi aksesnya terhadap pendidikan tingkat kedua dan ketiga serta layanan-layanan publik lainnya (Robinson & Rahman 2012). Diskriminasi ini kemudian lama-kelamaan memengaruhi cara pandang orang-orang Budha yang mayoritas terhadap orang Islam yang minoritas. Akibatnya, terjadi stereotip-stereotip negatif terhadap mereka sehingga diskriminasi juga akhirnya dilakukan oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika konflik komunal warga Budha dengan warga Muslim tidak hanya terjadi pada tahun 2012–2013 saja, tetapi sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 1978, 1992, 2001, dan 2009 (Zawacki, tanpa tahun).

ANALISIS PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK

Mengacu pada penjelasan mengenai isu konflik yang dikaitkan dengan kerangka teori

yang dipaparkan sebelumnya, peran identitas agama dalam konflik di Rakhine dapat dijelaskan dalam tiga aspek hipotesis. Pertama, dari sudut pandang sosio-psikologis, identitas agama yang berbeda antara orang Rakhine Budha dengan orang Rohingya dan etnis lainnya yang beragama Islam telah membentuk identitas kelompok dan menghasilkan eskalasi dinamika antarkelompok. Orang-orang yang dari kelompok Muslim akan cenderung mengistimewakan orang yang sama-sama beragama Islam, demikian pula dengan orang Budha Rakhine. Sementara itu, mereka memandang orang dari kelompok lain sebagai pesaing, bahkan musuh yang mengancam. Hal ini kemudian meningkatkan eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain, seperti yang terjadi pada Juni 2012.

Kedua, hubungan yang konfliktual dan diwarnai kekerasan sulit untuk diselesaikan karena masing-masing berpegang pada identitas kelompok yang dibentuk atas dasar nilai-nilai transedental. Dengan demikian, bagi mereka posisi mereka sama dengan kepentingan mereka. Hal tersebut tidak dapat dikompromikan karena didasarkan pada teks-teks dan doktrin yang dianggap berasal langsung dari Tuhan. Pilihannya jadi begitu sempit antara menang atau kalah. Padahal, posisi yang mereka tunjukkan sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan mereka. Masih ada cara-cara lain yang lebih damai atau posisi-posisi yang lebih kooperatif yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan mereka. Akhirnya, terjadi proses dehumanisasi, di mana mereka merasa tidak melakukan kesalahan ketika melakukan pembunuhan dan penyiksaan karena mereka menganggap justru akan mendapatkan pahala dengan berbuat demikian.

Ketiga, ketika berbicara mengenai kepentingan sebenarnya dari masing-masing kelompok, analisis terhadap isu menunjukkan bahwa kepentingan dasar mereka sebenarnya lebih kepada motif ekonomi (masyarakat umum) dan motif politik (pemerintah dan politisi). Penghembusan isu agama dilakukan oleh aktor

aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dalam jumlah banyak agar melakukan tindakan aksi kolektif terhadap kelompok lawan. Salah satu analisis yang dikemukakan oleh aktivis Budhisme justru mengatakan bahwa pelibatan isu agama dalam konflik ini sengaja dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk memosisikan pemimpin oposisi, Aung San Su Kyi, dalam dilema. Jika mendukung perlindungan terhadap orang-orang Muslim, dukungan orang-orang Budha sebagai mayoritas terhadapnya akan menurun. Jika diam saja, maka ia akan mendapat kecaman dari para aktivis HAM dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya (O'Brien, tanpa tahun). Padahal, dengan adanya kekerasan tersebut, reputasi agama Budha sendiri justru menjadi turun di mata dunia internasional, di mana para biksu dan penganut Budha yang dikenal sangat cinta damai justru melakukan kekerasan, seperti yang digambarkan oleh Strathern (2013) dalam artikelnya di BBC New Magazine berjudul "Why are Buddhist monks attacking Muslims?". Dengan kata lain, kekerasan yang mereka lakukan dalam rangka melindungi agama Budha justru menjadi kontraproduktif.

EVALUASI RESOLUSI KONFLIK

Konflik yang terjadi antara kelompok Budha dengan kelompok Muslim di Rakhine sejak tahun 2012 hingga 2013 telah menelan korban hampir 200 orang tewas dan lebih dari 127.000 orang harus pergi meninggalkan kampung halaman mereka (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dampak konflik tidak hanya terasa oleh Myanmar sendiri, tetapi juga oleh negara-negara tetangga dan satu kawasan. Sekitar 25.000 korban konflik melarikan diri ke Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang menimbulkan permasalahan baru di negara-negara tersebut (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Oleh karena itu, konflik berbaur agama harus segera diselesaikan agar dampak konflik tidak semakin parah dan meluas.

Pemerintah Myanmar sendiri terindikasi sudah melakukan beberapa hal dalam rangka

resolusi konflik di Rakhine. Pertama, pemerintah melakukan intervensi kekuatan bersenjata untuk menghentikan kekerasan komunal yang terjadi antara dua kelompok (*peace enforcement*). Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis Model Eskalasi Glasl. Namun dalam pelaksanaannya, aparat keamanan yang ditugasi untuk meredam konflik tidak bersikap netral. Mereka justru membiarkan kekerasan terjadi. Bahkan sebagian aparat, yaitu NaSaKa, secara langsung melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap salah satu kelompok yang berkonflik, yaitu orang-orang Muslim Rohingya. Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan NaSaKa. Kedua, pemerintah juga sudah mulai memberikan izin kepada lembaga bantuan internasional, termasuk Palang Merah Indonesia, untuk beroperasi dan membantu para korban konflik. Sebelumnya, segala bantuan dari luar sempat dilarang.

Walaupun demikian, upaya pembuatan perjanjian perdamaian antardua kelompok belum mencapai kesepakatan final. Walaupun kekerasan telah mereda untuk sementara, faktor struktural konflik seperti UU Kewarganegaraan yang diskriminatif masih belum diselesaikan. Padahal seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori, konflik yang melibatkan identitas agama biasanya akan berlangsung lama dan cenderung muncul kembali begitu kelompok yang kalah, yaitu orang-orang Muslim, mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam. Apalagi, faktor-faktor struktural konflik seperti diskriminasi juga belum dicabut oleh Pemerintah Myanmar. Dengan demikian, masih sangat besar kemungkinan konflik akan pecah kembali pada masa mendatang.

PENUTUP

Konflik komunal yang terjadi di Rakhine, Myanmar pada tahun 2012 dan 2013 telah menyeret identitas keagamaan sebagai dasar bagi perlawanan masing-masing pihak. Aktor-aktor sekuritisasi seperti politisi, pemerintah, dan para biksu berhaluan garis kelas telah memobilisasi kelompok rentan untuk ikut

terlibat dalam kekerasan atas nama agama. Pada akhirnya, konflik ini melibatkan massa dari kelompok Muslim minoritas dengan kelompok Budha mayoritas. Hal ini semakin menguatkan hipotesis Basedau dkk. (2011) tentang hubungan faktor agama dan konflik bahwa keterlibatan isu agama dalam konflik dapat meningkatkan potensi kekerasan melalui pembangunan identitas kelompok yang dianggap mendapatkan legitimasi transedental sehingga mudah digunakan sebagai alat mobilisasi massa. Padahal, agama dalam konflik ini hanya dijadikan sebagai alat bagi para aktor sekuritisasi untuk mendapatkan kepentingan masing-masing, baik dominasi kekuasaan politik maupun kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Jika dikelola dengan baik dan tidak melibatkan isu agama, sebenarnya konflik ini dapat dicegah melalui penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang menjadi pemicu konflik. Namun, ketika isu agama sudah diikutsertakan, kepentingan agama justru terabaikan bahkan dirugikan karena menciptakan citra buruk bagi agama tersebut. Berbagai langkah resolusi yang dilakukan pemerintah Myanmar pun cenderung hanya berupa pemaksaan perdamaian (*peace enforcement*) yang dalam pelaksanaannya juga tidak efektif, bahkan memperburuk keadaan. Sementara langkah-langkah untuk mengadakan perjanjian antarpihak (*peace settlement*) maupun pembangunan kembali kondisi damai (*peace building*) masih belum nyata dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tulisan ini, nampak bahwa beberapa hal dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Rakhine. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekerasan yang terjadi. Jika selama ini aktor sekuritisasi mendominasi opini dan menggerakkan massa, perlu dilakukan peningkatan peran para biksu moderat yang mempromosikan jalan perdamaian melalui dialog antaragama. Mereka juga sangat dihormati dan dihargai oleh warga Budha sehingga berpotensi juga untuk memobilisasi warga rentan untuk menghentikan kekerasan dan memulai cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Hal ini

dapat dimulai dengan upaya penyadaran bahwa penggunaan kekerasan atas nama agama justru memberikan dampak negatif bagi eksistensi agama tersebut, baik dari sisi pelanggaran ajaran secara substansial maupun dari sisi citra agama di mata orang luar.

Kedua, terkait dengan proses pembuatan kesepakatan. Berdasarkan analisis Glasl, negosiasi yang hanya melibatkan dua kelompok yang berkonflik sudah sangat sulit dilakukan. Perlu adanya peran pihak ketiga yang netral, baik dalam bentuk mediasi maupun arbitrase untuk mempertemukan pihak yang bertikai dalam meja perundingan dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, intervensi kekuatan militer dari aparat yang berwenang juga perlu dilakukan dalam rangka menjaga agar kondisi tetap damai selama mediasi berlangsung. Dunia internasional bertugas mendorong atau menekan Pemerintah Myanmar agar aparat keamanannya bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak dipenuhi, konsep *Responsibility to Protect* melalui intervensi kekuatan militer dari luar dapat menjadi faktor *deterrence* agar Pemerintah Myanmar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, terkait upaya untuk menyelesaikan akar-akar konflik. Selama ini ide yang sering didengungkan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya. Namun, hal tersebut belumlah cukup. Pemerintah Myanmar perlu melakukan pencabutan semua aturan dan kebijakan yang mendiskriminasi orang-orang Muslim, Rohingya khususnya. Kedua, perlu dilakukan pembangunan ekonomi mengingat rendahnya tingkat ekonomi juga meningkatkan potensi kerawanan untuk dimobilisasi dalam konflik, yang tentunya perlu didukung dengan penciptaan situasi politik dan keamanan yang stabil. Ketiga, perlu dilakukan langkah membangun kembali hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut. Perlu ada

langkah-langkah rekonsiliasi untuk menyatukan kembali warga Myanmar. Langkah-langkah tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi prospek perdamaannya akan lebih berkelanjutan.

PUSTAKA ACUAN

- Appleby, S. (2000). *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Basedau, M., Strüver, G., Vüllers, J. & Wegenast, T. (2011). "Do Religious Factors Impact Armed Conflict? Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa". *Terrorism and Political Violence*, 752–779.
- Central Intelligence Agency. (2013). The World factbook: Burma. Diakses pada 15 April 2015 dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print/country/countrypdf_bm.pdf.
- Fox, J. & Sandler, S. (2005). "The Question of Religion and World Politics". *Terrorism and Political Violence* 17 (3), 293–303.
- Fox, J. (2002). *Ethnoreligious Conflict in the Late Twentieth Century: A General Theory*. Lanham, Md.: Lexington Books.
- Glasl, F. (1997). *Konflik Management. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*. Bern: Paul Haupt Verlag.
- Gelfand, M.J. & Cai, D.A. (2004). Cultural Structuring of the Social Context of Negotiation. Dalam Michele J. Gelfand & Jeanne M. Brett (Eds), *The Handbook of Negotiation and Culture*. California: Stanford University Press.
- Global Centre for The Responsibility to Protect. (tanpa tahun). Timeline of International Response to the Situation of the Rohingya and Anti-Muslim Violence in Burma/Myanmar. Diakses Pada 18 April 2014 dari <http://www.globalr2p.org/media/files/timeline-of-international-response-to-burma-3.pdf>.

- Habibollahi, Aydin, McLean, H. & Diker, Y. (2013). Crimes Against Humanity: The Case of the Rohingya People in Burma. The Norman Paterson School of International Affairs. Diakses pada 19 April 2014 dari <http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1443.pdf>.
- Human Right Watch. (2013). *All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*. USA: Human Right Watch.
- Hukil, R. & Shaunik, N. (2013). "Rudderless & Drowning In Tears: The Rohingyas Of Myanmar". *IPCS Issue Brief* No. 222.
- Irewati, A. dkk. (2015). *Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja*. Yogyakarta: Penerbit ANDI & P2P LIPI.
- Jeong, Ho-Won. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage.
- Kadayifci-Orellana, S.A. (2009). Ethno-religious conflicts: Exploring the role of religion in conflict resolution. Dalam J. Bercovitch, V. Kremenyuk, dan I. W. Zartman (Eds.), *The SAGE handbook of conflict resolution*, pp. 264–280. London: SAGE.
- Kimball, C. (2003). *When religion becomes evil: Five marring signs*. New York: Harper Collins.
- Lindberg, Jo-Eystein (2008). Running on Faith? A Quantitative Analysis of the Effect of Religious Cleavages on the Intensity and Duration of Internal Conflicts. *Tesis*. University of Oslo.
- Lund, M.S. (1996) *Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press.
- Malik, I. (2005). Analisis dan perspektif resolusi konflik. Diakses pada 9 Januari 2014 dari http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=10.
- Morada, N. (2012). ASEAN, The Rohingyas And Myanmar's Responsibility To Protect. *AP R2P Brief*, Vol. 2 No.9.
- Matulessy, Andik. (2013?). Menggalang Toleransi Guna Mereduksi Konflik Antar Umat Beragama. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://andikmatulessy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/90-menggalang-toleransi-guna-mereduksi-konflik-antar-umat-beragama>
- Minority Rights Group International. (2008). World Directory of Minorities and Indigenous peoples-Myanmar/Burma: Muslims and Rohingya. Diakses pada 20 April 2014 dari <http://www.refworld.org/docid/49749cdcc.html>.
- Oxford Burma Alliance (tanpa tahun). Ethnic Nationalities of Burma. Diakses pada 20 April 2014 dari <http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html>.
- O'Brien, B. (tanpa tahun). Buddhism in Burma, Part 2: Buddhist-Muslim Violence. Diakses pada 18 April 2014 dari <http://buddhism.about.com/od/throughasiaandbeyond/a/Buddhism-In-Burma-Part-2.htm>.
- Philpott, D. (2007). "Explaining the Political Ambivalence of Religion". *American Political Science Review* 101, No. 3, 505–525.
- Rahmi, D. (2012). "Konflik Antar Umat Beragama dan Alternatif Penyelesaiannya Melalui Pola Mediasi". *Buletin Kerabat Edisi* 67 (X), 6–7.
- Robinson, I.G. & Rahman, I.S. (2012). "The Unknown Fate of the Stateless Rohingya". Dalam *Oxford Monitor of Forced Migration* Volume 2, Number 2, 16–20.
- Samutra, R. (2014). Agar diakui, rohingya harus ubah nama. Diakses pada 16 April 2015 dari <http://www.cnnindonesia.com/internasiona/20141001131507-106-4932/agar-diakui-rohingya-harus-ubah-nama/>
- Strathern, A. (2013). Why are buddhist monks attacking muslims? Diakses pada 16 April 2015 dari <http://www.bbc.com/news/magazine-22356306>.

- Swanström, N.L.P. & Weissmann, M.S. (2005). *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
- Taufik, Z. (2014). “Sufisme dan Peran Mengurai Ambivalensi Agama”. Diakses pada 3 Juli 2015 dari http://www.academia.edu/11388700/Sufisme_dan_Peran_Mengurai_Ambivalensi_Agama.
- Than, Tin Maung Maung & Thuzar, M. (2012). Myanmar’s Rohingya Dilemma. *ISEAS Perspective*.Singapura: ISEAS.
- Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution War, Peace and the Global System*. London: Sage Publishing.
- Waluyo, T.J. (2013).” Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar”. *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2, 838–852. tanpa tahun
- Zainuddin. (2013). “Solusi Mencegah Konflik Antarumat Beragama”. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/11/solusi-mencegah-konflik-antarumat-beragama/>
- Zawacki, B. (tanpa tahun). “Defining Myanmar’s ‘Rohingya Problem’”. Diakses pada 18 April 2014 dari <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/20/3zawacki.pdf>.

PERKEMBANGAN MUSIK *ROCK* DI KOTA MALANG TAHUN 1970–2000-AN: KAJIAN GLOBALISASI DAN EKSTISTENSI SOSIAL-BUDAYA

Yovi Ardivitiyanto

*Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang
E-mail: truestorymax86@gmail.com*

Diterima: 13-03-2015

Direvisi: 31-05-2015

Disetujui: 09-06-2015

ABSTRACT

This article aims to describe the development of rock music in Malang in 1970s –2000s. On the other hand, this article aims to look at the effect of the existence of rock music as a popular culture for socio-cultural life of youth in Malang in 1970s–2000s. Writing this article is done by using the historical method, in which besides using secondary sources, primary sources are also used, such as contemporary newspaper, contemporary magazines, and oral sources. Rock music is a part of popular culture products that began developing in the 1970s. Young people become consumers of the existence of rock music continuing to be entrenched in the late 1970s. Rock music was neither present nor taken for granted, but through a journey of existence from time to time. The existence of rock music can be seen through the stages and the recording industry. Of the existence of rock music appeared a form of lifestyle influences, which in turn was followed by its fans. On the other hand, the role of the mass media was highly efficient for the spread of a form of popular culture. Eventually the genre is able to spread widely throughout the world, including in Indonesia.

Keywords: *history of development, rock music, existence, popular culture*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan musik *rock* di Kota Malang pada tahun 1970-an–2000-an. Di sisi lain, artikel ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh eksistensi musik *rock* sebagai budaya populer bagi kehidupan sosial-budaya kaum muda di Kota Malang tahun 1970-an–2000-an. Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang selain menggunakan sumber-sumber sekunder juga menggunakan sumber primer seperti koran sezaman, majalah sezaman, dan sumber lisan. Musik *rock* merupakan bagian dari produk budaya populer yang mulai berkembang pada tahun 1970-an. Kaum muda menjadi konsumen bagi keberadaan musik *rock* yang terus membudaya pada tahun 1970-an. Musik *rock* tidak hadir dan diterima begitu saja, namun melalui sebuah perjalanan eksistensi dari waktu ke waktu. Eksistensi musik *rock* dapat terlihat dari panggung-panggung pertunjukan dan industri rekaman. Dari eksistensi musik *rock* ini muncul sebuah pengaruh berupa gaya hidup, yang pada akhirnya diikuti oleh para penggemarnya. Di sisi lain, peran media massa sebagai alat penyebaran sangat efisien bagi suatu bentuk budaya yang bersifat populer. Hingga pada akhirnya *genre* musik *rock* ini mampu menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kata kunci: sejarah perkembangan, musik *rock*, eksistensi, budaya populer

PENDAHULUAN

Pada dasarnya seni musik sebagai bagian dari karya seni mengandung sifat yang menghibur, tetapi tidak semua musik dan karya seni bersifat demikian. Suatu jenis musik tergantung pada tanggapan yang diberikan oleh suatu masyarakat tertentu dan pada akhirnya melahirkan ciri-ciri

khas tertentu pada pemain maupun penikmat musik tersebut. Musik bukan sekedar nada dan irama yang merdu-merayu telinga, tetapi mencakup juga seluruh substansi yang terkandung di dalamnya. Sama seperti disiplin ilmu sejarah, sosial, antropologi, dan sebagainya, musik dan karya seni memberi petunjuk dan gambaran yang

jelas tentang suatu periode waktu di mana manusia hidup dan ada (Hardjana 2004: 492).

Musik merupakan bagian dari kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. Seni musik terus-menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari musik etnis sampai dengan musik kontemporer. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang melahirkan begitu banyak inovasi, perkembangan teknologi, dan munculnya industri baru. Seni musik secara langsung maupun tidak langsung mampu memengaruhi kondisi sosial-budaya masyarakat. Hal ini dikarenakan musik juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi manusia di bidang keagamaan, politik, sosial maupun budaya. Fungsi semacam ini dapat berlaku jika musik diberikan pesan-pesan di dalamnya, misalnya lagu yang berisi pesan-pesan sosial-budaya, kritik politik, dan sebagainya (Mack 1995: 7). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa musik merupakan cerminan dari suatu kebudayaan manusia pendukungnya yang berkembang dari masa lampau sampai sekarang.

Musik *rock* berasal dari ekspansi budaya etnik Afrika-Asia yang mengusung musik jazz dan blues ke daratan Eropa dan Amerika pada abad ke-20. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Amerika Serikat mulai tertarik pada jenis musik jazz dan blues sehingga para musisi Afro-Amerika pada saat itu mulai mengembangkan musik blues dengan *beat* yang lebih cepat. Hal tersebut kemudian memunculkan jenis musik baru yang dikenal dengan nama *rock 'n roll*. Pada tahun 1950-an musik *rock 'n roll* mulai populer di Amerika Serikat. Seiring perkembangan teknologi, jenis musik ini kemudian berkembang menjadi banyak aliran, salah satunya adalah musik *rock*. Namun, unsur musik blues masih terasa dari *reff*, permainan solo serta efek distorsi yang hangat dan tidak terlalu kasar. Meski demikian, sudah mulai terdengar lengkingan gitar khas yang kemudian dikenal sebagai ciri musik *rock* (Mack 1995: 34).

Semarak musik *rock* mengalami kepopuleran yang mendunia seiring dengan munculnya band-band *rock* asal Inggris pada

awal tahun 1960-an. *Group band rock* asal Inggris ini berhasil menginvasi Amerika Serikat dengan musiknya. Sebut saja group band Inggris seperti The Beattles, Rolling Stone, Deep Purple, Led Zeppelin, dan Black Sabbath yang memiliki gaya yang mendobrak serta terkesan ‘urakan’ dibandingkan band-band yang pernah hadir di Amerika Serikat sebelum tahun 1960-an.

Memasuki periode 1970-an muncul gerakan anak muda yang berorientasi pada perlawanan budaya mapan di Amerika maupun di Eropa. Dalam pandangan kaum muda pada saat itu, budaya mapan terlalu memanipulasi kehidupan mereka. Oleh karena itu, muncul *Flower Generation*, sebutan buat kaum muda bergaya hippies yang membawa semangat *Do It Yourself (DIY)* pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an Inggris melahirkan gerakan anak muda, yaitu *punk*, yang juga membawa semangat *Do It Yourself (DIY)*. Kebanyakan dari kaum muda inilah yang menggemari musik beraliran *rock*. Dari kalangan anak muda, musik *rock* berkembang dan bermetamorfosis menjadi berbagai *subgenre* (Yudisthira 2010: 42–43). Hal ini yang menyebabkan dari tahun 1970-an–1990-an banyak bermunculan *subgenre* besar yang lahir dari musik *rock*. Misalnya, *blues-rock*, *jazz rock*, *punk-rock*, *art-rock*, *heavy metal*, *glam rock*, dan *pop-rock*.

Musik *rock* yang membudaya di kalangan anak muda tidak hanya populer di negeri asalnya, namun mampu menyebar dan menanamkan pengaruhnya hampir ke seluruh dunia. Lewat peran media massa cetak dan elektronik, budaya baru ini mampu bertransformasi ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Hal ini yang menguatkan pandangan penulis bahwa kemunculan dan perkembangan musik *rock* ke seluruh dunia merupakan bagian dari budaya populer dunia yang diawali pada akhir tahun 1960-an.

Pada akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an musik *rock* mulai merambah ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Solo, Malang, dan Surabaya.

Kota Malang adalah salah satu dari kota-kota besar di Indonesia yang terkena dampak musik *rock*. Hal ini dibuktikan sekitar tahun 1970-an di mana Malang dikenal sebagai kota *rock* oleh para kalangan musisi, pengamat musik, ataupun wartawan musik di Indonesia (Wawancara dengan Sylvia Saartje, 28 Mei 2013).

Masyarakat Kota Malang dari berbagai kalangan pada saat itu senang mendengarkan musik yang dibawakan oleh *group band rock* dari Barat, seperti Rolling Stone, Jimmi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest, Genesis, dan lain-lain. Pada akhirnya masyarakat Malang secara tidak langsung mempunyai referensi yang luas tentang musik *rock* Barat. Media massa cetak dan elektronik, seperti koran, majalah, televisi, dan radio, berperan penting dalam memberikan informasi tentang perkembangan musik *rock* Barat maupun musik *rock* dalam negeri kepada masyarakat Kota Malang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Malang mampu menilai baik-buruknya suatu pertunjukan *rock* yang dimainkan oleh musisi lokal maupun nasional (Wawancara dengan Sylvia Saartje, 28 Mei 2013).

Selain itu, wilayah Malang Raya tergolong dalam masyarakat berkebudayaan Arek.¹ Ini yang menyebabkan musik *rock* mudah diterima di kalangan masyarakat Kota Malang. Faktor lainnya adalah karena musik *rock* tidak hanya membawa pengaruh musikalitas saja, melainkan juga membawa semboyan tentang keterbukaan, kebebasan, kebersamaan, persamaan, dan solidaritas tinggi. Bila dilihat dari keterkaitan dalam segi sosial-budaya, ternyata pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh musik *rock* mampu melebur dengan karakteristik dari budaya

Arek tersebut. Pada akhirnya budaya Arek mampu mendukung *genre* musik *rock* dan menjadi populer di kalangan kawula muda Kota Malang dan Surabaya sejak tahun 1970-an hingga tahun akhir 1990-an.

Pada kurun waktu 1970-an sampai awal tahun 1990-an Kota Malang menjadi barometer musik *rock* di Indonesia. Predikat Kota Malang sebagai barometer ini disebabkan oleh seringnya pertunjukan musik *rock* atau konser festival di kota ini. Pada awal tahun 2000-an musik *rock* mengalami kemunduran dari segi musisi, penggemar, dan pertunjukan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran selera kawula muda Kota Malang terhadap budaya populer lainnya. Pada tahun akhir 1990-an atau awal 2000-an kawula muda Kota Malang terpengaruh dengan pusat hiburan-hiburan malam.

Eksistensi para musisi maupun *group band rock* ini ternyata membawa perubahan sosial bagi perkembangan gaya hidup pemuda di Kota Malang mulai tahun 1970-an sampai awal 2000-an. Keberadaan musisi *rock* menjadi panutan bagi setiap penggemarnya, melalui pengaruh budaya berpakaian hingga penyimpangan-penyimpangan sosial yang mewarnai setiap kehidupan musisi maupun penggemarnya. Di balik itu semua, musik *rock* memberikan warna kebebasan kepada manusia untuk berpendapat, berkarya, dan mengekspresikan diri sesuai keinginannya. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa musik *rock* mampu memberikan motivasi bagi setiap musisi maupun penggemarnya tentang semangat perjuangan dengan kerja keras dalam menyikapi kehidupan.

Selanjutnya, fokus permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah perkembangan *genre* musik *rock* di Kota Malang dan eksistensi musik *rock* sebagai budaya populer yang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial kaum muda di Kota Malang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan serangkaian pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut. (1) Bagaimana sejarah perkembangan musik *rock* di Kota Malang pada tahun 1970-an–

1 Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi sepuluh wilayah kebudayaan, yaitu wilayah kebudayaan Jawa Mataraman, Jawa Panaragan, Samin, Tengger, Arek, Osing, Pandalungan, Madura Pulau, Madura Bawean, dan Madura Kangean. Wilayah Surabaya dan Malang Raya termasuk dalam kebudayaan Arek. Masyarakat dalam kebudayaan Arek ini memiliki karakteristik dalam hal kepemilikan tekad, solidaritas, semangat egalitarianisme yang tinggi, semangat juang yang tinggi, terbuka terhadap perubahan, dan mudah beradaptasi. Masyarakat berkebudayaan Arek ini memiliki kepribadian “*njaba jero padha*” (keterbukaan) (Sutarto 2004: 1–2).

2000-an ? (2) Bagaimana pengaruh eksistensi musik *rock* sebagai budaya populer bagi kehidupan sosial-budaya kaum muda di Kota Malang pada tahun 1970-an–2000-an ?

Secara umum artikel ini bertujuan untuk mengamati secara lebih dalam fenomena perkembangan musik *rock* sebagai budaya populer yang eksis sejak 1970-an–2000-an di Kota Malang. Namun, berkenaan dengan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan musik *rock* terhadap anak muda Kota Malang pada dekade 1970-an–2000-an, maka tujuan khusus yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan musik *rock* di Kota Malang tahun 1970-an – 2000-an. (2) Untuk mengetahui pengaruh eksistensi musik *rock* sebagai budaya populer bagi kehidupan sosial-budaya kaum muda kota di Malang tahun 1970-an – 2000-an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dituangkan secara deskriptif-naratif-analisis dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial-budaya (Haris 2007: 236). Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang bersifat ilmiah. Ada lima tahap dalam metode penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan topik menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan emosional² dan intelektual³. Langkah kedua adalah heuristik atau pengumpulan data yang berupa data sekunder yang meliputi buku-buku penunjang dan data primer

2 Kedekatan emosional adalah kedekatan peneliti sejarah dalam memilih topik yang akan diteliti. Kedekatan emosional didasarkan pada ketertarikan peneliti sejarah terhadap objek yang akan diteliti sehingga terjadi suatu relevansi dengan peneliti. Hal inilah yang pada akhirnya membuat peneliti sejarah akan menjadi menarik dan dapat dikerjakan lebih serius oleh seorang peneliti sejarah (Linctman & French 1978).

3 Kedekatan intelektual adalah kedekatan seorang peneliti sejarah yang didapat dari usaha membaca atau mendengar pelbagai bahan sejarah yang relevan dengan topik yang dirasa menarik sehingga yang bersangkutan kemudian benar-benar mengetahui pentingnya dan relevannya sebuah topik penelitian yang dipilih. Dari pelbagai informasi yang menarik tersebut tentu ada sesuatu yang menurutnya perlu ada penelitian lebih lanjut karena ada masalah yang belum terjawab atau belum tuntas penjelasannya (Abdulah 1985: xv).

yang meliputi hasil wawancara, dokumentasi foto, majalah sezaman serta koran sezaman. Langkah ketiga adalah kritik eksternal dan internal. Langkah keempat adalah interpretasi dari sumber yang diperoleh dengan dianalisis dan dilakukan secara sintesis (Kuntowijoyo 2001: 100). Hasil interpretasi kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang disusun secara kronologis. Hal ini biasa dikenal dengan istilah historiografi yang merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Penulisan sejarah perkembangan musik *rock* ini dapat dikategorikan sebagai tulisan sejarah sosial, yang pada umumnya model penulisannya terbagi menjadi dua sifat yaitu model sinkronis dan diakronis (Kuntowijoyo 2001: 43).

PEMBAHASAN

Perkembangan Musik *Rock* di Kota Malang Tahun 1970-an – 2000-an

Sekilas Tentang Sejarah Musik Rock di Indonesia Tahun 1970-an

Berbicara perkembangan musik *rock* di Malang kurang lengkap apabila tidak memaparkan perkembangan musik *rock* di Indonesia. Dalam konteks ini kawasan Kota Malang dipandang sebagai sejarah lokal, sedangkan sejarah nasional sebagai unit sejarah. Sejarah lokal berarti sejarah dari suatu tempat yang batasan wilayahnya ditentukan oleh penulis itu sendiri. Penulisan sejarah lokal bukan berarti menonjolkan kelebihan suatu daerah, melainkan untuk memperkaya khazanah sejarah (Kuntowijoyo 2003: 145). Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan sekilas mengenai sejarah kemunculan musisi maupun *group band rock* di Indonesia pada tahun 1970-an.

Pada dekade 1970-an hampir di setiap kota besar memiliki *group-group* musik sendiri. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Medan, Surabaya, dan Malang ternyata pada dekade ini lebih memunculkan *group-group* band maupun musisi beraliran *rock*. Kota Jakarta sebagai ibu kota negara banyak melahirkan *group-group* musik, antara lain Gipsy, Bigman

Robinson, Fancy, Ireka, Rhadows Rasela, Hookerman Equator Child, dan God Bless. Selain pentas di pesta-pesta, mereka juga tampil di beberapa tempat seperti mini *disco*, Taman Ria Monas, dan Taman Ismail Marzuki. Ibu kota Jakarta sering tidak dianggap sebagai barometer perkembangan musik populer ber-*genre rock* di Indonesia, kecuali dalam urusan industri produk rekaman. Hal ini dikarenakan industri rekaman di Jakarta lebih maju dan berkembang dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kota Jakarta lebih sekadar pasar, bukan pemasok musisi seperti halnya Kota Bandung (*Kompas* 2002).

Group-group musik di Kota Bandung pada saat itu banyak bermunculan, misalnya Savoy Rhythm, Provist (*Progressive Student*), Diablo Band, The Player, Happiness, Thippiest, Comets, Red & White, The Rollies, Gang of Philosophy Harry Roesli, Bani Adam, Giant Step, dan Finishing Touch. Tidak ketinggalan pula *group vocal* atau band perempuan yang mengikuti jejak Dara Puspita, misalnya Miscellina yang selalu tampil dengan gaya *hippies*, Dara Shinta, Moderato, The Mad, One Dee & Lady Faces, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak *group* yang muncul di Kota Bandung, hanya satu *group band rock* yang bisa dikata mengalami keberhasilan dalam *genre* ini, yaitu The Rollies. Letak geografis yang berdekatan dengan Jakarta menjadikan Bandung sebagai kota pertama yang menerima informasi setiap perkembangan baru yang terjadi di Jakarta sekaligus juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan musik di Bandung (*Kompas* 2003).

Kota Semarang dan Solo pada masa 1970-an merupakan tempat di mana musik *rock* bersinar di Jawa Tengah. Memasuki dekade 1970-an musik di Semarang dilanda *trend* musik *rock* ala Deep Purple, Led Zeppelin, dan lain sebagainya. Ada tiga nama *group* musik yang disegani keberadaannya, yaitu Mama Clan's, Dragon, dan Fanny's. *Group band rock* Mama Clan's tidak hanya berkiprah di kota asalnya, tetapi juga mampu menaklukkan penonton di Kota Bandung

yang dikenal sebagai gudangnya *group-group* musik *rock* pada dekade 1970-an. Mama Clan's bahkan juga mampu menawan hati publik Jakarta dengan manggung di Taman Ria Monas pada tanggal 20 Oktober 1973. *Group* dari Semarang lainnya yang mampu besinar tidak hanya di kota asalnya, yaitu Spider, tetapi entah kenapa ketika ikut perhelatan musik "Pesta Kemarau 75" di Bandung, ia berganti nama menjadi Voodoo Child (*Kompas* 2005).

Solo sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Tengah juga ikut andil dalam melahirkan penyanyi dan *group-group* musik dari berbagai macam aliran musik. *Group-group* musik yang pernah dilahirkan oleh kota ini di antaranya Yap Brothers, Ternchem, Ayodhia, Scorless, dan Fair Stone. Pada akhir 1969 *group* Ternchem menjadi *group rock* dari kota Solo yang berhasil melambung namanya di belantika musik *rock* Indonesia. Ternchem mempunyai ciri khusus dalam setiap cenderung sadis dipertontonkan ke penggemarnya, seperti halnya aksi Bernard (*vocalis* Ternchem) yang sedang memakan ular hidup-hidup, atau keluar dari peti mati yang dipenuhi kelelawar. Publik pun selalu histeris setiap kali menikmati penampilan Ternchem. Sejak itulah Ternchem selalu tampil di hadapan publik pecinta musik cadas. Gebrakan-gebrakannya waktu itu merupakan gema dari idealisme mereka (*Jawa Pos* 1989).

Kejayaan musik di Medan ditandai dengan empat grup yang bersaing di atas panggung pertunjukan, yaitu Rhytem King, Minstreal, The Great Session dan Destroyer. Selain keempat grup tersebut ternyata masih banyak musisi *rock* lainnya, seperti Freeman, The Foxus, Amateur, The Rag Time, Six Men, Grave Man, Black Spades, dan Bhineka Nada.

Perkembangan musik *rock* dalam negeri tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kota Medan memberikan bukti bahwa musik *rock* juga berkembang di Pulau Sumatra. Bahkan antusias penonton di Kota Medan cukup besar setiap kali digelar pertunjukan musik *rock* (*Kompas* 23 Desember 2004).

Surabaya sebagai kota pelabuhan yang pernah menjadi markas Angkatan Laut Belanda, Inggris, dan Indonesia pada akhir tahun 1960-an banyak melahirkan musisi-musisi *rock*. Berbagai tempat hiburan bertebaran di Surabaya, termasuk kehidupan musik yang merata di bar dan diskotek, seperti Seaside, Poras, Tegalsari, dan Mirasa. Musik *rock* mulai terdengar di antara lagu-lagu berirama chacha atau tango yang dibawakan oleh *group* musik. Hampir semua pemusik asal Surabaya pernah memainkan musik *rock*. *Group* musik AKA yang lahir di kota ini merupakan pioner musik *underground* di Indonesia. *Group* AKA juga mengusung aksi-aksi panggung yang tidak lazim dipertunjukkan ketika itu karena menampilkan aksi peti mati dan tiang gantungan. *Group* dan musisi lainnya yang terbentuk di kota yang sama meliputi SAS, Oorzaak, Yeah Yeah Boys, Lemon Tree's, D'Hand, Gembels, dan *Rock Trikel* (*Kompas* 28 Januari 2005).

Kota Surabaya sangat produktif dalam urusan melahirkan musisi-musisi maupun *group band rock* dari masa ke masa. *Group band* asal Kota Surabaya selalu bersaing di kancah belantika musik nasional dengan mengusung *genre rock* hingga milenium baru ini. Sebut saja *group band* macam AKA, SAS, *Rock Trikel*, *Grass Rock*, *Adromeda*, *Power Metal*, *Dewa 19*, *Boomerang*, dan *Padi*. Predikat Kota Surabaya sebagai kota penghasil talenta-talenta dalam bidang seni musik *rock* memang dibenarkan, namun predikat sebagai barometer musik *rock* tidak disandang oleh Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan para pengamat musik, wartawan, musisi ataupun *group band rock* menganggap bahwa Kota Malang yang lebih pantas menyandang predikat sebagai barometer musik *rock* di Indonesia (Wawancara dengan Sylvia Saartje, 28 Mei 2013).

Kemunculan dan Perkembangan Musisi Maupun Group Band Rock di Kota Malang antara 1970-an–2000-an

Dalam sejarah perkembangan musik di Indonesia, Kota Malang pernah melahirkan musisi-musisi maupun *group-group band*

ternama. Terlebih ketika *arek-arek* Malang mulai meneriakkan lagu-lagu milik legenda musik *rock* dunia seperti The Rolling Stone, Led Zeppelin, Genesis, Deep Purple, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat Kota Malang dikenal sebagai kota *rock* pada dekade 70-an hingga 90-an. Memang tidak banyak *group band* bermunculan saat itu. Akan tetapi, *group band* yang muncul sudah mampu menaklukkan hati para pendengar, penikmat, penggemar dan pengamat musik di Indonesia.

Hal tersebut dimulai pada tahun 1960-an ketika arus budaya populer dari Barat gencar-gencarnya masuk ke Indonesia dalam bentuk seni musik. Kota-kota besar di Indonesia tidak terkecuali Malang secara langsung mendapat pengaruh kuat dari budaya musik Barat. Pada mulanya, *group-group band* yang lahir di Kota Malang masih dalam bentuk *group* pengiring atau orkes dan bisa dikata musik yang dimainkan terkesan ber-*genre* pop. Adapun musik *rock* hanya sebagai selingan di tengah-tengah pertunjukan dan musik *rock* yang mereka mainkan itupun masih tergolong lunak. Hal ini ditandai dengan *band-band* orkes yang muncul di Kota Malang pada era 1960-an. *Group band* pertama di Kota Malang yang muncul dengan konsep bermain musik seperti ini adalah Eka Dasa Taruna. *Group Band* yang berdiri pada tahun 1962 ini sering melantunkan lagu-lagu dari *group* Barat seperti Natking Cole dan Blues Presley. Selanjutnya pada tahun 1967 di Malang berdirilah *group band* pengiring lainnya bernama Tornado Band (Wawancara Bapak Hari Sangehan, 18 Mei 2013).

Hal tersebut akan mengilhami terbentuknya *group band* pengiring (orkes) yang sudah memainkan musik ber-*genre rock*. Salah satunya muncul *group band* orkes yang disponsori oleh perusahaan rokok ternama asal Kota Malang, yaitu Bentoel. *Group band* yang dimotori oleh Ian Antono ini bernama *Bentoel Band*. Hal yang membedakan Bentoel Band dengan *group band* orkes era 1960-an adalah lagu-lagu yang dimainkan oleh Bentoel Band sudah mulai mengarah pada musik berjenis *rock* di beberapa

show pada tahun 1970-an. *Image* Bentoel Band sebagai *group* orkes *rock* ini terlihat ketika mereka berkolaborasi di panggung pertunjukan bersama dengan vokalis seperti Micky Merkelbach dan Sylvia Saartje.

Pada tahun 1974 Bentoel Band mulai mengalami masa-masa *vacuum* dan pada akhirnya bubar. Hal ini dikarenakan Bentoel Band ditinggalkan oleh Ian Antono yang memilih berlabuh ke *group band* God Bless. Bubarnya *group band* Bentoel Band akhirnya melambungkan nama *group band rock* lainnya, yaitu Ogle Eyes. *Group* milik perusahaan rokok Opet ini juga membawa warna musik berjenis *rock* di setiap pertunjukannya. Seiring dengan perkembangan *group band* ini di pentas pertunjukan nasional, mereka berhasil mengeluarkan album rekaman pada tahun 1978 (*Aktuil* No. 253, Agustus 1978).

Dapat dilihat bahwa pada masa 1970-an campur tangan perusahaan-perusahaan swasta di Kota Malang cukup besar dalam membangun kegiatan bermusik lewat *group band*. Fenomena *group band* perusahaan ini terjadi dikarenakan keinginan yang sangat besar dari kaum muda Kota Malang yang gemar bermain musik, namun tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1970-an alat-alat musik elektrik merupakan barang yang sangat mahal untuk dijangkau oleh masyarakat, khususnya kaum muda Kota Malang. Alat-alat musik elektrik ini jarang ada orang yang memiliki, bahkan untuk menyewa alat-alat musik saja tidak bisa dianggap murah pada zaman itu. Oleh karena itu, alternatif lain kaum muda untuk menyikapi agar bisa bermain musik dan berkarya dalam musik adalah hanya dengan melobi agar dapat direkrut oleh suatu instansi atau perusahaan yang memiliki satu set alat-alat musik (Wawancara Hari Sangehan, 18 Mei 2013).

Pada dekade 1970-an Kota Malang juga melahirkan sesosok *lady rocker* pertama Indonesia, yaitu Sylvia Saartje. Julukan sebagai *rocker* pertama Indonesia ini disematkan oleh media massa. Mengawali karier dari *band-band* lokal Malang seperti Tornado, Bentoel Band, Ogle

Eyes, Bad Session, dan Avia's, yang pada akhirnya membentuk warna musik *blues-rock* pada sesosok Sylvia Saartje. Bahkan seorang pengamat musik ternama Indonesia, Bens Leo, menjuluki Sylvia Saartje sebagai Janis Joplinnya Indonesia (*cover* kaset pita Sylvia Saartje album *Oooh*, 1983). Eksistensinya dalam belantika musik *rock* tidak pernah memudar hingga beberapa generasi. Hal inilah yang menyadarkan bahwa musik *rock* tidak hanya sekadar bermain musik semata, namun juga merupakan bagian dari *lifestyle* yang mewakili jiwa para penggemarnya.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada dekade 1980-an, kemunculan *group band* di Kota Malang bermula dari para kaum muda terpelajar yang ingin berprestasi di bidang musik. Arus perkembangan musik Barat ber-*subgenre art-rock* yang sangat kuat menyebabkan *group-group* yang lahir pada dekade 1980-an terpengaruh dan menjadi *repertoar* aliran *art-rock* Barat. Pada tahun 1980-an ini ajang festival juga menjadi modal penting bagi *group band rock* di Kota Malang untuk lebih dikenal di belantika musik nasional.

Pertengahan tahun 1980-an dapat dikatakan sebagai era bersemainya musik *rock* di Kota Malang dalam panggung pertunjukan. Festival-festival musik *rock* bergengsi sering diselenggarakan di Kota Malang. Dari beberapa festival yang bergengsi ini muncullah *rockstar-rockstar* baru, tak terkecuali musisi *rock* yang berasal dari Malang seperti Elpamas (1984, 1985, dan 1986), Heart Breaker (1984, 1985), dan Genk Voice (1986). Di luar beberapa ajang festival musik *rock* yang diselenggarakan, muncul juga *group band rock* yang diperhitungkan namanya di kancah panggung pertunjukan lokal maupun nasional. *Group band* tersebut di antaranya adalah Q-Red, Bad Sessions, Darkness, dan Destop (Wawancara dengan Wahyu G.V, 20 Agustus 2013).

Pada pertengahan 1980-an lagu-lagu *rock* ber lirik Indonesia secara perlahan mulai dikenal dan mendapat tempat di kalangan kaum muda penggemar. Di sisi lain, musik *rock* masih tetap menjadi pilihan utama bagi kebanyakan

penggemar *rock* di Kota Malang. Hanya beberapa *group band rock* Indonesia dengan karya dalam negerinya yang mampu menaklukkan hati penggemar musik *rock* di Kota Malang. Salah satunya adalah *groupband* Elpamas yang berhasil menciptakan karya yang tertuang dalam sebuah album. Hal ini dikarenakan pada tahun 1985 Elpamas berhasil menjadi juara festival *rock* berskala nasional versi Log Zhelebour dan berhak masuk dapur rekaman di samping tur keliling. Bahkan hingga tahun 2000-an mereka termasuk *group band* yang masih produktif dalam berkarya di jalurnya (*Gitar Plus* 25 July 2013).

Sementara itu, memasuki akhir tahun 1980-an Wahyu G.V yang merupakan salah satu personil Genk Voice mendirikan *group band* bernama Arema Voice. *Group band* Arema Voice terbentuk pada 25 Oktober 1989 dengan mengusung *genre rock*. Hampir setiap lagunya mengangkat tema-tema penyemangat. Hal ini dikarenakan konsep yang ditawarkan Arema Voice adalah sebuah *band supporter* sepakbola. *Group band* ini lahir sebagai rasa ungkapan kecintaannya terhadap kesebelasan kebanggaan warga Malang, PS Arema. Arema Voice dapat dikatakan sebagai *band supporter*⁴ pertama di Indonesia. *Group band* Arema Voice menjadi rujukan bagi *band-band supporter* lainnya, baik di dalam lingkup lokal maupun nasional (Wawancara dengan Wahyu G.V, 20 Agustus 2013).

Pada tahun 1990-an Festival *rock* versi Log Zhelebour masih menjadi acuan para musisi *rock* di Kota Malang. Hal dibuktikan dengan lahirnya *group band* asal Malang yang bernama Balance. *Group band* ini berhasil masuk sepuluh besar dalam ajang festival *rock* versi Log Zhelebour pada edisi VI (Hasil wawancara dengan Arif Wibisono selaku penggiat musik *rock*). Memasuki pertengahan 1990-an musik *rock* di Malang bermetamorfosis menjadi musik-musik *rock*

4 *Band supporter* adalah sekumpulan pemain alat musik yang juga menjadi pendukung dari sebuah klub sepak bola. *Band* ini biasanya terdiri dari vokalis, gitaris, *bassist*, dan *drummer*. Tema lagu dari *band* ini adalah dukungan terhadap klub sepak bola yang mereka gemari (Wawancara dengan Wahyu G.V, 20 Agustus 2013).

*underground*⁵ (musik *metal*, *hardcore*, dan *punk*). Musik *rock underground* maupun *indie*⁶ pada dasarnya ini ingin membangkitkan semangat kemandirian dan kebebasan dalam berkarya maupun dalam berekspresi.

Total Suffer Comunity (T.S.C) menjadi penggerak kebangkitan komunitas *rock underground* di Malang pada 1995. Anggota komunitas ini terdiri dari berbagai macam musisi lintas *scene*, namun didominasi oleh anak-anak *metal*. Konser *rock underground* yang pertama kali digelar di Kota Malang diorganisasikan pula oleh komunitas ini. Acara bertajuk Parade Musik *Underground* tersebut digelar di Gedung Sasana Asih YPAC pada tanggal 28 Juli 1996 dengan menampilkan *band-band* lokal Malang, seperti Bangkai (Graincore), Ritual Orchestra, Sekarat, Knuckle Head, Grindpeace, No Man's Land, The Babies (Tantagode 2008: 26).

Memasuki milenium baru tidak banyak *group band rock* asal Malang yang naik ke atas permukaan untuk bersaing dalam industri musik *rock* Indonesia. Hal ini dikarenakan daya kreativitas musisi *rock* dalam membuat karya tidak sebaik musisi dari luar Kota Malang sehingga mereka tidak mampu bersaing dalam belantika musik di Indonesia. Sungguh disayangkan sebab mereka sangat berbakat dalam hal bermain musik, namun saat ditanya tentang karya mereka sendiri, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Hal ini

5 *Underground* (bawah tanah) ialah segala sesuatu yang melalui jalur bawah. Istilah yang dipakai dalam beberapa bidang, seperti budaya, musik, dan film. Istilah *underground* merujuk pada sebuah idealisme. Istilah *underground* mencakup nilai sosial budaya dan segala aspek kaum bawah, golongan kecil atau segala sesuatu yang berlawanan dengan aturan-aturan dan desakan. *Underground* lebih bebas dengan sebutan media yang menampilkan suara-suara hak kaum bawah, untuk kebebasan bersuara kepada ketidakadilan buatan manusia dan retorikanya. *Underground* lebih bebas menyampaikan pendapat atau bergerak di bidang positif yang mereka inginkan. Dalam bidang musik istilah *underground* identik dengan musik yang bertentangan dengan musik-musik yang sedang populer di masyarakat. Musik *underground* dari segi penggemarnya sangat sedikit, biasanya musik-musik seperti ini dikategorikan sebagai musik keras (Tantagode, 2008: 1-2).

6 *Independent label* atau yang lebih dikenal dengan istilah *indie label* merupakan sebuah perusahaan rekaman yang berukuran kecil. Perusahaan ini hanya membiayai produksi rekaman hingga menjadi album. Untuk proses penggandaan, pendistribusian, dan pemasaran album, perusahaan tersebut bekerja sama dengan *major label* atau perusahaan rekaman besar (Denisoff 1986: 87).

diungkapkan oleh Ian Antono sebagai musisi *rock* yang berasal dari Kota Malang:

“ *skill saya sudah kuno dibandingkan dengan skill yang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Lagu-lagunya lebih sulit dengan melodi yang mbulet dan menuntut ketajaman jari-jari tangan untuk mengolah senar gitar. Banyak group band di Kota Malang ini yang mampu memainkan lagu-lagu grup musik rock yang dikenal rumit partiturnya seperti Dream Theater, Mr. Big, Van Halen, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, Rush, dan lain sebagainya. Meskipun skill memainkan lagu orang lain rocker Malang tergolong hebat namun ketika sudah dituntut untuk membuat lagu yang berkualitas dan bisa laris di pasaran mereka masih belum mampu. Musisi rock Malang pada saat ini perlu belajar dari musisi-musisi di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Jogjakarta ” (Wawancara Arif Wibisono dengan Ian Antono) (Wawancara dengan Arif Wibisono, selaku kolektor dan penggiat musik rock, 12 Agustus 2013).*

Pada tahun 2000-an hanya ada dua band *rock* yang dikategorikan mempunyai nama dan berprestasi di kancah lokal maupun nasional, yaitu Green Master (2003) dan C.C.C.C (2007). Puncak kepopuleran *band* ini adalah ketika berhasil mendapat prestasi di ajang festival *rock* versi Log Zhelebour. Akan tetapi, dua *group band* ini tidak lama mengalami masa puncak kepopulerannya. Lambat laun kedua *group band rock* ini mengalami masa ‘*vacuum*’ dan pada akhirnya membubarkan diri. Padahal Green Master dan C.C.C.C (baca; C four) adalah *band* yang berpotensi untuk dapat meramaikan belantika musik cadas di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2006 kembali muncul *band supporter* bola, bernama D’Kross. Selebihnya tahun 2000-an hingga sekarang menjamur *band-band rock underground* maupun *indie rock*.

Pengaruh Eksistensi Musik *Rock* sebagai Budaya Populer bagi Kehidupan Sosial-Budaya Kaum Muda di Kota Malang

Seiring perjalanan waktu, sedikit demi sedikit Kota Malang mengarah pada pengembangan industrialisasi modern. Melalui industrialisasi inilah gerak urbanisasi mulai terasa di Kota Malang. Sedikit demi sedikit masyarakat kota mulai meninggalkan kegiatan yang berorientasi pada bidang agraris. Masyarakat Kota Malang mulai mengalami keberagaman dalam segala hal, termasuk mengenai budaya. Di lain sisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan peran media massa menjadi alat masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Budaya populer mulai masuk dan memengaruhi masyarakat Kota Malang.

Sebuah eksistensi musik *rock* di Kota Malang dapat dilihat melalui dua hal. *Pertama* mengenai paparan eksistensi musik *rock* dalam panggung pertunjukan. Hal ini disebabkan oleh eksistensi melalui panggung pertunjukan akan memperlihatkan interaksi antarpemilip dengan penonton. Dari situ akan terciptakan situasi di mana pemilip dan penonton secara bebarengan mengekspresikan diri dan melepaskan ketegangan melalui fisikalisasi musikal yang sering kali mencakup gerakan tubuh simbolis dan terkadang menyinggung beberapa aspek identitas politik. Di samping itu, suatu pertunjukan musik *rock* yang digelar secara resmi juga mempertimbangkan komersialisasi, seperti yang terlihat dari harga tiket masuk, festival *group band* dengan hadiah uang, promosi-promosi album, memperoleh sponsor yang banyak dan besar, penggunaan tata panggung serta pencahayaan serta tempat pertunjukan (Richter 2012: 257).

Kedua mengenai paparan eksistensi musik *rock* dalam industri rekaman. Dalam hal ini musik *rock* merupakan produk budaya populer kaum muda yang terpublikasikan lewat sebuah industri budaya. Pada dasarnya budaya populer merupakan produk dari masyarakat industrial. Eksistensi budaya populer lewat industri musik ini lebih bersifat kepada hasil dan tampilan dalam

jumlah besar, kerap dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan penggandaan massal sehingga gampang dijangkau masyarakat luas (Heryanto 2012: 9). Pada tahun 1970–2007 ada beberapa usaha publikasi karya musik *rock* dari musisi maupun *group band rock* Kota Malang. Walaupun publikasi karya tidak sebanyak ataupun sepopuler musisi maupun *group band rock* di luar Malang, paling tidak ada gambaran bahwa musisi maupun *group band rock* Malang mencoba untuk eksis di dalam kancah industri rekaman di Indonesia.

Dua hal tersebut menjadi tolok ukur penulis untuk melihat eksistensi musik cadas sebagai bagian dari *popular culture*. Kedua fenomena tersebut juga memperlihatkan bagaimana kaum muda Malang secara bebas mampu mengembangkan suatu budaya luar yang mereka gemari dari waktu ke waktu. Dari situ akan terlihat sedikit demi sedikit suatu bentuk corak budaya musik *rock* yang diterapkan dalam sebuah kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya serta menyalurkan karya dan gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Eksistensi Musik Rock Melalui Panggung Pertunjukan

Jalur pertunjukan di Kota Malang pada tahun 1970-an merupakan masa awal eksistensi musik *rock* di Kota Malang. Nuansa musik-musik *rock* Barat masih terasa kental lewat panggung pertunjukan di Kota Malang. Musisi-musisi *rock* Kota Malang masih sering memainkan *repertoar* musik *rock* Barat di atas panggung. Hal ini dikarenakan penikmat musik *rock* di Kota Malang masih menganggap bahwa memainkan *repertoar* musik *rock* Barat dengan baik dan sama persis merupakan hal yang terkesan hebat dan perlu diberi sebuah apresiasi.

Eksistensi sebuah *group band rock* tidak lepas dari aksi di panggung pertunjukan yang terkenal atraktif dan ekspresif. Ternyata aksi panggung musisi *rock* di Indonesia pada 1970-an, awal mulanya juga terpengaruh aksi panggung

dari *group band rock* Barat. Hal semacam ini juga dialami oleh *group-group band rock* asal Malang dalam menampilkan aksinya di atas panggung. Salah satunya adalah aksi panggung Micky Merkelbach bersama Bentoel Band yang penuh kontroversi dan tidak dapat dilupakan. Pada 18 Februari 1973 ketika itu Bentoel Band tampil di Gelora Pancasila Surabaya dalam acara “*Victor Wood’s Show*”. Acara tersebut disponsori oleh perusahaan rokok Bentoel. Maka dari itu *group band* kebanggaan perusahaan rokok tersebut diberi kesempatan untuk tampil di acara tersebut (Aktuil No. 116, Maret 1973).

Pada lagu pertama Mickey menyanyikan lagu “*Highway Star*” sambil menyambar tonggak mic yang dipergunakannya seperti toya. Lagu pertama diakhiri dengan sambutan tepuk tangan dari para penonton. Pada lagu kedua Micky bernyanyi semakin memanas suasana. Puncaknya adalah ketika Micky mengambil belati dan kemudian menusuk kelinci yang terikat kakinya tersebut di atas permukaan panggung. Micky kembali mengambil kelinci tersebut dan diangkatnya sejenak. Setelah itu kelinci itu didekap erat-erat, sambil Micky menggorok leher kelinci, darah pun bercucuran dari binatang tersebut. Tak lantas aksi Micky berhenti di situ saja, darah yang keluar dari leher kelinci tersebut dihisap dan diminumnya darah kelinci tersebut. Setelah menghabiskan darah kelinci tersebut, Micky kemudian melemparkan kelinci itu di samping belati. Alunan musik pun mengalami klimaks” (Aktuil No. 116, Maret 1973).

Penampilan semacam ini merupakan bentuk pengaruh dari penampilan *group band* Barat. Aksi sadis yang ditampilkan Micky Merkelbach merupakan replika dari aksi panggung Ozzy Osbourn (Black Sabbath) dengan mengombinasikan aksi panggung musisi *rock* Barat seperti Alice Cooper. Diketahui bahwa Alice Cooper sangat populer dengan aksi panggung teatrikal yang seram dan mengarah pada tindakan kesadisan. Sementara itu, aksi panggung *group band rock* di Indonesia pada awal

perkembangannya juga sering menampilkan hal-hal semacam ini sesuai dengan *group band* Barat yang menjadi kegemaran mereka. Hal serupa juga dapat dilihat ketika aksi panggung yang dilakukan Micky Merkelbach bersama Bentoel Band merupakan sebuah gejala transformasi budaya yang terkesan semu.

Hal ini dikarenakan musisi *rock* pada tahun itu hanya mengikuti tren dan belum mengetahui gaya yang ditampilkan. Menurut Harry Roesli, awal perkembangan *rock* di Indonesia memerlukan *snobisme*. Tanpa *snobisme*, orang merasa statis, berawal dari *snobisme*, musisi maupun penonton merasa senang dan terhibur. Kemudian, mereka mencoba lebih jauh berbuat dengan tujuan memperlihatkan sesuatu yang lain daripada yang lain (*Aktuil* No. 225, 11 Juli 1977).

Tidak semua penampilan musisi *rock* pada tahun 1970-an diwarnai dengan aksi teatral yang membuat rasa kagum maupun rasa mengerikan bagi para penonton. Ada musisi maupun *group band rock* yang tampil di atas panggung yang tidak menggunakan aksi teatral. Walau tanpa aksi teatral, musisi juga mampu menunjukkan aksi panggung yang menarik. Terkecuali *group band* maupun musisi *rock* pada tahun 1970-an di Kota Malang. Karier musisi yang dibesarkan di Kota Malang harus mampu mempunyai kekuatan untuk memikat para penggemar musik *rock* Malang.

Salah satunya adalah Sylvia Saartje yang mengawali karier bermusiknya lewat panggung-panggung pertunjukan lokal di Kota Malang. Sylvia Saartje identik dengan aksi panggung yang memukau para penonton. Dalam setiap penampilannya, Sylvia Saartje selalu ditopang dengan kekhasan suaranya dan mampu menjiwai lagu-lagu yang dinyanyikannya dengan baik. Hal inilah yang membuat penampilan Sylvia Saartje kaya akan ekspresi dan juga tampil atraktif di atas panggung pertunjukan.

Suara maupun gaya panggung yang khas membuat penampilan Sylvia Saartje selalu dinanti para penggemar musik *rock* Malang.

Media massa lah yang menobatkan Sylvia Saartje sebagai penyanyi solo beraliran *rock* pertama di Indonesia dan dikenal sebagai *Lady Rocker* pertama Indonesia. Demikian juga dengan *style* berpakaian dan aksesoris yang dikenakan Sylvia Saartje, menambah penonton semakin terpukau menyaksikannya. *Style* berpakaian menjadi daya tarik sendiri bagi para penonton. Hal ini menunjukkan bahwa Sylvia Saartje bereksistensi tidak hanya lewat musik maupun lagu yang dibawakannya, melainkan juga keberadaannya yang diakui lewat *fashion* musik *rock* perempuan yang selalu diusung olehnya.

Dapat dikatakan bahwa masa puncak kejayaan musik *rock* di Kota Malang terjadi pada tahun 1980-an. Perusahaan rokok lokal maupun nasional tidak lagi mendirikan dan membina *group band* seperti pada era 1970-an untuk kepentingan promosi produk. Hal ini dikarenakan perusahaan rokok tersebut mengalihkan strategi pemasarannya dengan mensponsori pertunjukan maupun festival musik *rock*. Pada pertengahan 1980-an, pertunjukan musik *rock* di Kota Malang yang bertajuk festival sering digelar hampir setiap tahunnya. Misalnya festival yang dipromotori Log Zhelebour dengan menggandeng sponsor PT Djarum dan dikenal dengan nama “Djarum Super Rock Festival Indonesia” (*Jawa Pos* 5 Oktober 1988). Di samping itu, beberapa perusahaan rokok nasional juga mensponsori festival-festival musik *rock*, contohnya perusahaan rokok ternama Kota Malang dengan ajang “Bentoel Rock Festival” maupun “*Bentoel Rock Selection*” (*Jawa Pos*, 12 Desember 1989) atau perusahaan rokok Gudang Garam yang mensponsori ajang festival “*Surya Rock Competition*”.

Di antara festival-festival *rock* tersebut, festival milik Log Zhelebour lah yang mampu bertahan dari perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan promotor kenamaan ini berhasil menggandeng sponsor perusahaan rokok ternama di Indonesia. Selain itu, festival *rock* versi Log ini juga menumbuhkan rasa cinta terhadap karya-karya *rock* dalam negeri yang tidak kalah dengan *rock-rock* luar negeri. Memang diketahui bahwa

dalam festival ini para peserta wajib membawakan musik *rock* berlisik Indonesia dan harus mampu membawakan karya mereka sendiri (HAI 41/ XXVIII/11 Oktober 2004).

Pada tahun 1980-an musik *rock* Barat mulai jarang dimainkan di atas panggung pertunjukan. Musik *rock* berlisik Indonesia mulai muncul ke permukaan. Kontaminasi penggemar musik *rock* Malang terhadap musik *rock* Barat masih terasa kuat sehingga menyebabkan para penggemar musik *rock* Kota Malang ini tidak begitu baik dalam merespons karya-karya *rock* dalam negeri. Hanya beberapa *group band rock* yang mampu mendapat tempat di hati para penggemar musik *rock* di Malang dengan karya dalam negerinya (Jawa Pos 1 September 1986).

Memasuki 1990-an, ketenaran musik *rock* mulai pudar. Di sisi lain, pada pertengahan 1995 muncul sebuah gerakan pembeda dalam konsep bermain musik *rock* di Kota Malang. Pada tahun-tahun ini *subgenre-subgenre* musik *rock* tumbuh subur di Kota Malang. Konser-konser kecil (*gigs*) sering berlangsung serta muncul beberapa komunitas-komunitas pecinta musik yang mewakili *subgenre* mereka masing-masing.

Pada kurun waktu 1970-an–1990-an Kota Malang dianggap sebagai barometer musik *rock* Indonesia. Kaum muda Kota Malang memberikan warna tersendiri bagi perkembangan musik *rock* di Indonesia. Hal ini disebabkan sikap apresiatif, selektif, dan kritis penggemarnya terhadap *band-band* yang tampil di atas panggung. Bahkan penulis musik, M.H. Alfie Syahrane, menyebut Kota Malang sebagai “*City of Monsters*” (Malang Post Forum & D’Kross Community 2014: 34). Istilah yang diberikan ini berkaitan dengan respons kaum muda Kota Malang terhadap pertunjukan musik *rock* yang digelar di Kota Malang. Sebagai contoh, *band-band rock* yang tampil kurang baik di hadapan para *fans rock* Kota Malang akan segera diminta untuk lebih awal turun panggung pertunjukan.

Kota Malang sampai dengan tahun 1975 belum mempunyai gedung khusus untuk

pementasan musik. Untuk itu, pementasan musik di Kota Malang biasanya digelar di lapangan basket Tenun atau kolam renang Slembad yang berada di kompleks olahraga Stadion Gajayana. Pada tahun 1976 baru dibangun gedung olahraga di Malang. Gedung ini dikenal oleh masyarakat Kota Malang dengan sebutan GOR Pulosari. Walaupun kurang memenuhi syarat karena atapnya masih seng, gedung olahraga ini sering digunakan untuk pementasan musik, terutama musik ber-*genre rock* pada pertengahan tahun 1970-an (Aktuil No. 206, Oktober 1976).

Eksistensi Musik Rock Melalui Industri Rekaman

Keadaan industri musik *rock* di Kota Malang dari kurun waktu 1970-an– 1990-an tidak seproduktif kota-kota lain di Indonesia. Pada tahun 1970-an musisi ataupun *group band* mulai merekam karya-karya mereka, tetapi tidak banyak album yang dikeluarkan. Salah satunya adalah Bentoel Band yang memublikasikan karya mereka lewat media piringan hitam hingga 3 album.

Album pertama Bentoel Band lahir pada tahun 1971 dengan judul *Bentoel Hit Vol I*. Album pertama ini disajikan dalam bentuk piringan hitam produksi perusahaan rekaman Remaco. Pada bagian *cover* depan album *Bentoel Hits Volume I* terpampang penyanyi-penyanyi yang diiringi oleh *group* Bentoel Band. Bentoel Band mengiringi suara-suara penyanyi ibu kota, antara lain Tetty Kadi, Emilia Contessa, Anna Mathovani, Inneke K., Benyamin, dan Eddy Kardianto (*Cover* piringan hitam *Bentoel Hit Vol I*, tahun 1971). Kemudian kerja sama antara Emilia Contessa dengan Bentoel Band melahirkan album dengan judul “Emelia Contessa dan Band Bentoel”. Album kedua yang aransemennya digarap oleh para personel Bentoel Band ini mulai diedarkan pada tahun 1973 dalam bentuk piringan hitam (Theodore 2013: 100). Demikian juga beberapa saat kemudian pada tahun yang sama muncul rekaman terbaru Bentoel Band bersama Trio The King’s (*Cover* Piringan Hitam Album Trio The King’s; Band Bentoel,

Tahun 1973). Kedua rekaman pada tahun 1973 ini jauh lebih sempurna dari album sebelumnya yang beredar pada tahun 1971.

Pada tahun 1971 dan 1973 Bentoel Band mampu memublikasikan kreativitas bermain musik mereka lewat piringan hitam. Menyusul pada tahun 1978 *group band* pengiring, Ogle Eyes, berhasil memublikasikan album perdananya. Album perdana *group band* pengiring yang juga didanai oleh perusahaan rokok Oepet ini diberi judul “Menyambut Sinar Pagi”. Pada kesempatan itu Ogle Eyes mampu menggandeng perusahaan rekaman Irama Tara untuk memproduksi dalam bentuk pita kaset. Karya-karya album pertama sekaligus terakhir Ogle Eyes ini rata-rata diciptakan dan diarsenkan oleh Lexy Rumagit, Toto, dan Imanuel (Kaset pita Ogle Eyes tahun 1978).

Musisi *rock* era 1970-an dari Kota Malang yang bisa dikatakan produktif dalam hal publikasi karya hanya ada Sylvia Saartje. Ditandai dengan keluarnya album rekaman perdana Sylvia Saartje yang berjudul “Biarawati”. Hal ini tidak lepas dari peran musisi asal Malang yaitu Ian Antono, sebagai aransemen lagu-lagu pada album ini. Bahkan lagu pada album ini, “Biarawati”, merupakan ciptaan dari Ian Antono. Lagu “Biarawati” menjadi hits pada tahun itu sebab banyak diputar di stasiun-stasiun radio di seluruh Indonesia. Sayang, kerja sama Sylvia Saartje dengan Ian Antono hanya pada album “Biarawati” saja (Wawancara dengan Sakrie, 30 Januari 2014).

Setelah sukses dengan album pertama, Sylvia Saartje kembali bereksistensi dalam industri rekaman dengan meluncurkan album kedua dengan judul “Kuil Tua”. Album ini diproduksi oleh perusahaan rekaman PT Irama Tara Jakarta pada tahun 1979 (Kaset pita album Kuil Tua, 1979). Album kedua ini tidak begitu sukses seperti album perdana. Akan tetapi, produktivitas Sylvia Saartje tidak berhenti sampai di sini saja. Pada tahun 1980 di bawah rumah produksi rekaman yang masih sama, Sylvia Saartje meluncurkan album ketiga dengan judul

“Mentari Kelabu” (Kaset pita album Mentari Kelabu, 1979).

Pada tahun 1981 Sylvia Saartje kembali berhasil merekam album keempatnya dengan judul “Puas” (Kaset pita album Puas, 1981). Dua tahun berselang muncullah kembali album kelima dengan judul “Ooh”. Pada album keempat dan kelima ini Sylvia Saartje kembali bekerja sama dengan musisi Indonesia, yaitu Yopie Item (Kaset Pita album Ooh, 1983). Kemudian pada tahun 1984 Sylvia Saartje kembali bekerja sama dengan musisi Indonesia lainnya, yaitu Farid Hardja, dan berhasil meluncurkan album keenam dengan judul “Jakarta *Blue Jeans*-ku” (Kaset pita album Jakarta Blue Jeansku, 1984).

Memasuki tahun 1987 Sylvia Saartje kembali meluncurkan album ketujuh yang diberi judul “Gerhana”. Album ini menandai berakhirnya kerja sama Sylvia Saartje dengan perusahaan rekaman PT. Irama Tara Jakarta yang sudah berlangsung selama kurang lebih sembilan tahun. Album “Gerhana” ini diproduksi dan diedarkan melalui perusahaan rekaman Insan Record Jakarta (Kaset pita album Gerhana, 1987). Album Gerhana ini juga menjadi *sound track* film dengan judul “Gerhana” (Wawancara dengan Sylvia Saartje selaku musisi, 28 Mei 2013).

Kemudian pada akhir tahun 1988 Sylvia Saartje pergi ke New York, Amerika dan kariernya di Indonesia sempat *vacuum*. Kemudian Sylvia Saartje kembali pada tahun 1994 dan kembali berkarya dengan meluncurkan album “*Take Me With You*”. Dari situlah Sylvia Saartje mengawali kembali kariernya di Indonesia. Album ini diproduksi oleh Logis Record (Kaset pita album *Take Me With You*, 1994). Tiga tahun berselang, Sylvia Saartje kembali meluncurkan album kesembilan dengan judul “Cinta Negeri Serumput”. Pada album ini Sylvia Saartje berduet dengan vokalis Radja, yaitu Ian Kasela, dan diproduksi oleh PT SKI Jakarta (Hasil wawancara dengan Sylvia Saartje selaku musisi, 28 Mei 2013).

Memasuki tahun 1980-an eksistensi industri rekaman tergilas oleh hingar- bingar pertunjukan musik *rock* di Kota Malang. Ajang-ajang festival

yang semarak pada tahun 1980-an menjadikan grup-grup *band rock* asal Kota Malang hanya mungkin memiliki karya *single* yang terkumpul dalam album kompilasi. Adapun grup *band* yang berhasil mengeluarkan album hanya Elpamas. Pada kurun waktu 1989–2000, *group band* ini hanya mengeluarkan 5 album saja. Di bawah naungan Logiss Records pada akhirnya Elpamas berhasil mengeluarkan album pertamanya pada tahun 1989 dengan judul “Dinding-Dinding Kota”.

Pada tahun 1980-an Logiss Records merupakan perusahaan rekaman yang identik dengan musisi *rock* di Indonesia. Kerja sama Elpamas dengan Logiss Records berlanjut hingga album terakhir *group band* ini. Album kedua mulai diluncurkan pada tahun 1991 dengan judul “Tato”. Dua tahun berselang Elpamas kembali menyuguhkan album ketiga dengan judul “BOS” (1993). Lama berselang tepatnya pada tahun 1997, Elpamas baru mengeluarkan album keempat dengan judul “Negeriku”. Tiga tahun kemudian Elpamas mengeluarkan album kelima dengan judul “Dongeng” (2000).

Memasuki tahun 1995–2007 grup *band rock* cenderung memublikasikan karyanya bukan lewat perusahaan *major label*, melainkan secara *indie label*. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya aliran-aliran *rock* baru yang membawa kembali filosofi “*Do It Yourself*” yang sempat populer pada era 1970-an. Adapun *group band rock* yang berhasil mengeluarkan album perdana sekaligus terakhir pada tahun 2003 lewat perusahaan rekaman *major label* adalah Green Master. Album perdana Green Master ini dirilis oleh Atmaka Record dan diberi judul “Makhluk Cantik” (Wawancara dengan Arif Wibisono selaku kolektor dan penggiat musik *rock*, 12 Agustus 2013).

Sementara itu, *group band* C.C.C.C mengeluarkan karya mereka lewat media internet. Hal yang menarik dari album C.C.C.C ini adalah cara pemasaran karya yang tidak mencari untung secara komersial. Para penggemar cukup mengunduh karya-karya C.C.C.C lewat situs milik *group band* ini (Dian 2008).

Pengaruh Musik Rock bagi Kehidupan Sosial-Budaya Kaum Muda Kota Malang

Musik *rock* sebagai budaya populer bagi kehidupan sosial-budaya kaum muda di Kota Malang pada tahun 1970-an–2000-an tidak lepas dari peran media massa yang sangat memengaruhi perjalanan eksistensi musik *rock* di Kota Malang. Melalui media massa, musik *rock* di Kota Malang mendapat popularitas di kalangan kaum muda Malang. Kaum muda Kota Malang dari tahun 1970-an–2000-an mampu menggali segala informasi mengenai perkembangan musik *rock* di dunia ataupun di dalam negeri dari majalah, koran, dan radio. Jadi, media massa secara tidak langsung memberikan referensi kepada para *fans rock* di Kota Malang. Hasilnya adalah para *fans rock* ini mengerti segala seluk-beluk perkembangan musik *rock*. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan perilaku kritis, apresiasi, dan selektif terhadap musisi-musisi yang tampil di atas panggung pertunjukan di Kota Malang ataupun karya-karya musik *rock* yang diproduksi dan diedarkan oleh industri rekaman.

Majalah yang tren di kalangan kaum muda Kota Malang adalah *Aktuil* (tahun 1970-an), *Vista* (tahun 1980-an), *HAI* (akhir 1980-an –1990-an), dan lain-lain. Tidak hanya majalah, surat kabar lokal maupun nasional juga membawa sebuah informasi terhangat seputar perkembangan musik *rock* dunia maupun dalam negeri. Selain majalah maupun surat kabar, media radio sangatlah vital bagi perkembangan musik *rock* di Kota Malang. Hal ini dikarenakan pada tahun 1970-an di Kota Malang banyak berdiri radio-radio amatir yang menjadi sarana informasi dan propaganda budaya dari Barat. Kehadiran radio-radio amatir umumnya dikelola oleh anak-anak muda yang banyak memutar lagu-lagu yang sedang tren. Seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, di Kota Malang pun juga berdiri pemancar radio-radio beratena bambu seperti PK 17, KD 33, OOM, dan lain-lain (Tedjoleksono 2006: 73).

Pada tahun 1970-an siaran di beberapa radio amatir juga terpengaruh oleh segala sesuatu

yang berhubungan dengan musik *rock*. Radio siaran di Kota Malang yang menjadi corong musik *rock* adalah TT 77, KDS 8, dan Senaputra. Dari ketiga radio tersebut, radio Senaputra lebih memancarkan nuansa *rock* yang sangat kental daripada radio-radio amatir lainnya. Terlebih lagi ketika Ovan Tobing masuk sebagai penyiar pada tahun 1975, citra *rock* melekat kuat pada radio Senaputra. Ovan Tobing menghibur sekaligus memberi edukasi pada ribuan pendengarnya. Tak hanya memutar lagu, Ovan Tobing banyak membagi sejarah kelompok musik *rock* atau cerita di balik pembuatan album atau lagu yang diputarnya. Sosok Ovan Tobing sangat penting dalam perkembangan musik *rock* di Kota Malang. Berkat jasanya sebagai penyiar, anak muda Kota Malang memperoleh informasi mengenai musik yang sesuai dengan selera mereka. Selain itu Ovan Tobing juga sering menjadi MC pagelaran musik *rock* di skala lokal maupun nasional (Rolling Stone 2009: 92).

Melalui proses transformasi budaya ini pada akhirnya musik *rock* menjadi gaya hidup sebagian kaum muda di kota-kota besar Indonesia pada tahun 1970-an. Hal ini yang memengaruhi kaum muda Malang, mulai dari apa yang dikonsumsi untuk tubuh bagian luar maupun dalam. Penampilannya seperti badan cekung-cekung, hem ketat, memakai rompi, celana *cutbray* ataupun *street*, rambut gondrong, sepatu bot, dan gaya *Twigy* untuk kaum perempuannya, bertindik, bertato hingga penggunaan minuman beralkohol untuk sarana persahabatan antarpara pecinta musik *rock*. Semua itu menjadi gambaran kaum muda Kota Malang sejak tahun 1970-an–2000-an. Dalam hal gaya hidup para penggemar *rock* ini bisa dikategorikan sebagai kaum *plastic hippies*, mereka sama sekali tidak memahami mengenai gagasan tentang *hippies*, tetapi hanya hiasan-hiasan luarnya saja, seperti rambut gondrong, pakaian, menenggak minuman beralkohol dan penggunaan narkoba. Semua hal tersebut merupakan tanda kalau mereka sedang melakukan *counter culture* (Yudhistira 2010:44).

Dari pemaparan mengenai pengaruh dan dampak musik *rock* dalam kehidupan sosial-budaya, dapat disimpulkan bahwa dasar dari musik *rock* di Kota Malang merupakan budaya serapan dari Barat. Pada tahun 1970-an–2000-an karakter musik *rock* beserta pernak-perniknya di Kota Malang maupun di Indonesia belum mampu menciptakan karakter musik *rock* yang benar-benar berbudaya khas Indonesia. Hal inilah yang membawa dampak positif maupun negatif penggemar musik *rock* di Kota Malang pada dekade 1970-an–2000-an.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa musik *rock* di Kota Malang terus mengalami perubahan dan berkelanjutan. Dimulai dari tahun 1970-an musisi maupun *group band rock* di Kota Malang kebanyakan masih membawakan *repertoar* musik *rock* dari Barat. Musik *rock* jenis *hard-rock* lebih digemari oleh musisi maupun penggemar. Musik *rock* terus mengakar pada tahun 1980-an. Musisi maupun *group band* sudah mulai menciptakan dan membawakan lagu-lagu *rock* karya sendiri lewat panggung festival, dan aliran musik *rock* yang menjadi tren pada saat itu adalah jenis *art-rock*.

Dalam kurun waktu 1990-an ajang festival masih menjadi pilihan utama untuk menuju popularitas bagi musisi *rock* di Kota Malang. Namun di lain sisi, musik *rock* jalur *underground* maupun *indie* mulai bersemi di Kota Malang pada pertengahan 1990-an. Hal ini ditandai dengan munculnya *group band subgenre rock*, yaitu *heavy metal*. Memasuki tahun 2000-an teknologi dunia di bidang musik semakin bertambah maju. Oleh karena itu, musik *rock* mulai kaya akan suara, efek-efek elektrik yang baru, dan teknik-teknik baru pun mulai berkembang pesat. Hal inilah yang menimbulkan musik *rock* mulai berkembang dan menampilkan *subgenre* yang beraneka ragam, dari mulai *punk-melodic*, *funk rock*, *brithrock*, *hip-rock*, *hardcore*, *heavy metal*, *metalcore*, *grindcore* dan lain sebagainya.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan sehingga ada beberapa pembahasan yang kurang mendetail ataupun belum sempat dibahas di dalamnya. Hal inilah yang nantinya mampu memberikan peluang kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk membahas tema musik *rock* dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menganjurkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai tema *subgenre* musik *rock* di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, T. (1985). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Aktuil* No. 116. Maret 1973.
- Aktuil* No. 206, Oktober 1976.
- Aktuil* No. 224. Juli 1977.
- Aktuil* No. 225, 11 Juli 1977
- Aktuil* No. 253. Agustus 1978.
- Dian, Y. (2008). CCC: Album Panduan Revolusi, (Online), (<http://hot.detik.com/music/read/2008/01/08/181312/876615/217/cccc-album-panduan-revolusi>, diakses 2 April 2014).
- Denisoff, R. S. (1986). *Tarnished Gold: The Record Industry Revisited*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Gitar Plus. (2013). Aku Ngak Pernah Puas. (Online), edisi 111, (<http://www.gitarplus.net>), diakses 12 November 2013.
- HAI 41/XXVIII. 11 Oktober. (2004). *Djarum Super Rock Festival X 2004*.
- Hardjana, S. (2004). *Musik: antara Kritik dan Apresiasi*. Jakarta: Kompas.
- Haris, S. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Heryanto, A. (2012). Budaya Pop dan Persaingan Identitas. Dalam Ariel Heryanto (Ed), *Budaya Populer di Indonesia: Mencairnya identitas Pasca-Orde Baru* (hlm.: 1–52). Yogyakarta: Jalasutra (Anggota IKAPI).
- Jawa Pos*. (1986). 'Rolling Stone' Tampil Malam ini. 1 September 1986.
- Jawa Pos*. (1988). *Jambore Rock Tour Membedah Jombang*. 5 Oktober 1988.
- Jawa Pos*. (1989). *Rocker Sumatera ikut Rock Selection '89*. 12 Desember 1989.
- Jawa Pos*. (1989). *Ternchem Hidup lagi Tanpa Adegan Sadis*. 13 Maret 1989.
- Kompas*. (2002). *Napak Tilas Anak Muda 1970*. 29 April 2002.
- Kompas*. (2003). *Riwayat Band-Band dari Kota Bandung*. 6 September 2003.
- Kompas*. (2004). *Ini Rock Medan! Bung*. 23 Desember 2004.
- Kompas*. (2005). *From SBY with Rock*. 28 Januari 2005.
- Kompas*. (2005). *Bengawan Solopun Ber-rock n Roll*. 25 Februari 2005.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Alam.
- (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Lichtman, A.J. & French, V. (1978). *Historian and The Living Past, The Theory and Practyice of Historical Study*. Illinois: Harlan Davidson.
- Mack, D. (1995). *Apresiasi Musik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Malang Post Forum dan D'Kross Community*. (2014). *Bangga menjadi Arek Malang*. Malang: Banyumedi Publishing.
- Richter, M. (2012). "Dunia Lain di Yogyakarta: Dari Jatilan hingga Musik Elektronik". Dalam Ariel Heryanto (Ed.), *Budaya Populer di Indonesia: Mencairnya identitas Pasca-Orde Baru* (hlm. 243–269). Yogyakarta: Jalasutra (Anggota IKAPI).
- Rolling Stone. (2009). *Best Rock Propagandist: Radio Senaputra FM & Ovan Tobing*.

- Sutarto, A. (2004). "Pendekatan Kebudayaan: Wacana Tanding untuk Mendukung Pembangunan di Jawa Timur". Dalam Sutarto, A. & Sudikan, S.Y. (Ed.). *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur* (hlm. 1–13). Jember: Kelompok Peduli Budaya & Wisata Daerah Jawa Timur (Kompyawisata).
- Tantagode, J. (2008). *Musik Underground Indonesia Revolusi Indie Label*. Yogyakarta: Harmoni.
- Tedjoleksono. (2006). "Malangsche Radio Vereeniging". Dalam Widodo, D. (Ed.), *Malang Tempoe Doloe* (hlm. 73–74). Malang: Banyumedia Publishing.
- Yudhistira, A.W. (2010). *Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an*. Tangerang: Marjin Kiri.

DINAMIKA RESPONS NGO TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI REPUBLIK CEKO

Kurnia Novianti

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: kurnia.novianti@yahoo.com

Diterima: 01-06-2015

Direvisi: 22-06-2015

Disetujui: 29-06-2015

ABSTRACT

This study focuses on the dynamic responses of some of environmental NGOs in Prague, the Republic of Czech related to the development of renewable energy. Their responses are varied. Some of them support the government policy on renewable energy development, but some others express their disagreement to its policy by demonstration or protest in some media. These responses show that NGOs have their own interpretations and interests about dynamic condition of renewable energy development. They are not always having the same perception with the government policy. They argue that the government's policies somehow contradict with the effort to develop renewable energy in the Republic of Czech. This study itself borrows a resistance's perspective to analyze the data and information that were collected through a field research in Prague. It concludes that the environmental NGOs responses to the effort of renewable energy development are varied based on their methods and strategies influenced by their ideologies.

Keywords: *responses, environmental NGO, resistance, renewable energy, the Republic of Czech*

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada respons yang dinamis dari NGO lingkungan terkait pengembangan energi terbarukan di Republik Ceko. Data menunjukkan bahwa respons tersebut beragam. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi tidak sedikit pula yang mengekspresikan ketidaksetujuannya dalam bentuk protes dan disampaikan secara langsung melalui media. Dinamika ini menunjukkan bahwa setiap NGO memiliki interpretasi dan kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai justru kontradiktif dengan upaya pengembangan energi terbarukan. Dengan menggunakan perspektif resistensi, penulis melihat bahwa protes merupakan bentuk resistensi, yang berbeda dengan resistensi sehari-hari, diekspresikan melalui media. Perhatian penulis pada gerakan lingkungan setelah revolusi beludru (era transformasi bagi Ceko) menunjukkan bahwa NGO memilih menyuarakan aspirasi mereka, baik yang berasal dari organisasi maupun komunitas, dengan beragam metode atau strategi berdasarkan ideologi yang dimilikinya.

Kata kunci: dinamika respons, resistensi, NGO lingkungan, resistensi, energi terbarukan, Republik Ceko

PENDAHULUAN

Perhatian pada ruang gerak Non-Governmental Organization (NGO) di Republik Ceko telah dimulai sejak penulis melakukan penelitian tentang gerakan lingkungan tahun 2010 silam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Republik Ceko, gerakan lingkungan yang dilakukan oleh NGO (dengan dukungan dari masyarakat) dapat dikategorikan ke dalam *ecologist* dan *conservation groups*.¹ Beberapa

organisasi lingkungan bahkan lebih memfokuskan pada aksi untuk memasukkan agenda lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan pemerintah (Novianti 2010a: 41–42). Selama periode 1989–1992, ketika Kementerian Lingkungan

untuk mencapai tujuannya, yaitu *ecologist groups* dan *conservation groups* → tidak ada dalam daftar pustaka. Kelompok yang pertama lebih fokus pada isu-isu lingkungan dalam masyarakat industri maju dan melakukan perubahan-perubahan mendasar terkait hubungan masyarakat dan politik dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut (misalnya penolakan terhadap nuklir atau adopsi terhadap standar lingkungan yang berkelanjutan/*sustainable environmental standard*). Sementara itu, kelompok yang kedua, lebih memperhatikan masalah perlindungan makhluk hidup/*wildlife* dan isu-isu pemeliharaan/*presevation* tanpa melakukan *action* yang melawan kekuasaan dominan di dalam negara untuk mencapai tujuannya.

¹ Dalam penelitiannya mengenai *Environmental Movement and The Modes of Political Action* yang dilakukan terhadap 248 organisasi lingkungan di 59 negara, Dalton (2003: 758-759) mengatakan bahwa ada 2 kategori organisasi lingkungan berdasarkan orientasi ideologi yang mendasari *action* yang dilakukan

baru didirikan, bersamaan dengan serangkaian *environmental initiatives* oleh pemerintah transisi, gerakan lingkungan yang diprakarsai oleh beberapa organisasi nasional mulai memperlihatkan keberhasilan dalam mengampanyekan isu-isu energi, lalu-lintas dan transportasi, perlindungan lingkungan, dan pendidikan bagi masyarakat umum (Shriver dan Messer 2009: 169–170).

Energi terbarukan menjadi alternatif yang diambil oleh Republik Ceko mengingat sumber energi tidak terbarukan, seperti batu bara yang merupakan andalan negara ini, bersifat tidak berkelanjutan. Dengan potensi berupa sumber-sumber energi yang dimiliki, ditambah dengan pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, Ceko terus melakukan upaya pengembangan energi terbarukan di berbagai sektor. Dukungan dan keseriusan pemerintah dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan juga turut memengaruhi proses pengembangan tersebut sehingga sasarannya bukan hanya pada pengembangan energi terbarukan, tetapi mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.²

Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama yang komprehensif dengan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, industri (swasta), media (massa dan elektronik), dan organisasi-organisasi independen seperti NGO. Sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai peran yang cukup krusial dalam

2 Pemanfaatan energi terkait dengan aspek ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan dan kesehatan, dan mengarah ke pembangunan berkelanjutan (Khan 2006→ tidak ada dalam daftar pustaka). Target jangka panjang Kebijakan Lingkungan Negara Republik Ceko adalah untuk menyatukan ketersediaan pasokan energi dengan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan target indikatif umum Uni Eropa, 22% kebutuhan listrik kawasan ini dipenuhi dari sumber energi terbarukan pada tahun 2010, dan dengan perhitungan yang dilakukan, pangsa sumber energi terbarukan dalam konsumsi yang bersumber dari energi primer saat ini dan pembangkit listrik di Republik Ceko sangat mungkin menjadi lebih dari dua kali lipat apabila semua prasarana yang dibutuhkan terpenuhi. Proporsi sumber energi terbarukan dalam konsumsi domestik total sumber energi primer (DCPES) harus meningkat dari pencapaian sekarang yang kurang dari 2% sampai 6% (15–16% pada tahun 2030, sesuai dengan Kebijakan Energi Negara) pada tahun 2010. Target indikatif nasional pangsa listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan dalam konsumsi listrik nasional bruto adalah 8% (5–6% pada tahun 2005) pada tahun 2010 (European Renewable Energy Council TT: 42).

proses sosialisasi hingga perumusan kebijakan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah *pertama*, bagaimana respons yang dimunculkan oleh NGO lingkungan terkait upaya pengembangan energi terbarukan? *Kedua*, apa yang melatarbelakangi munculnya respons-respons tersebut? *Ketiga*, bagaimana cara NGO “menyuarakan” respons tersebut? Dengan menggunakan perspektif resistensi, tulisan ini hendak mengkaji dinamika respons NGO dalam mengkritisi kebijakan energi terbarukan Pemerintah Ceko.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN GERAKAN NGO

Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan sekelompok orang/masyarakat terkait dengan kebudayaan (*culture*). Kebudayaan digunakan oleh kebanyakan antropolog untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sekelompok orang dalam sebuah masyarakat memanfaatkan lingkungan mereka, namun cara mereka memanfaatkan lingkungan fisiknya adalah masalah yang bersifat multidimensional (Bennett 1980: 244–245). Dengan kata lain, manusia (atau sekelompok orang) memegang peranan yang dominan dalam pemanfaatan lingkungan dan memiliki berbagai macam strategi guna menjaga kelangsungan hidup dan keturunannya. Strategi ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan (termasuk sumber daya alam di dalamnya) (Schutkowski 2006: 3).

Dalam konteks Republik Ceko, negara yang baru terbentuk setelah runtuhnya sebuah rezim yang memosisikan negara sebagai satu-satunya pengatur jalannya pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah mendapat kritik dan protes keras akibat kerusakan lingkungan selama kurun waktu yang cukup lama (Novianti 2010b: 5). Kritik ataupun protes yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan beberapa NGO lingkungan masa itu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat di pemerintahan, melainkan juga dimiliki

oleh masyarakat maupun NGO. Gerakan yang dilakukan bersama tersebut dimungkinkan, seperti disebutkan oleh Kottak (1999: 29), adalah karena NGO secara umum dipandang lebih responsif terhadap keinginan-keinginan masyarakat lokal dan dinilai lebih efektif dalam mendorong partisipasi komunitas daripada pemerintah yang sifatnya otoriter dan totaliter. Dengan demikian, gerakan-gerakan NGO juga menjadi satu isu yang dikaji oleh pendekatan ini.

“Menciptakan ruang” menjadi penting dalam hubungan dengan aspek publik, bagian pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelompok pemerhati lingkungan (*environmentalists* dalam istilah Tsing) menekankan pada keadilan sosial untuk membuat pengelola sumber daya alam (pemerintah) bertanggung jawab tidak hanya pada kepentingan bisnis, tetapi juga terhadap komunitas/masyarakat yang terkena dampak eksploitasi sumber daya alam, degradasi, polusi, dan pembangunan bendungan. Para aktivis akan melawan pemerintah apabila tidak ada peluang untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, banyak bermunculan aktivis lingkungan dan advokasi yang lebih berorientasi pada negara sebagai pengatur sumber daya alam (Tsing 1999).

Dukungan terhadap keterlibatan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh warga negara Republik Ceko demi terwujudnya *civil society* telah ditunjukkan sejak satu dekade silam. Melalui pidatonya, Presiden Ceko saat itu, Václav Havel, dalam EEA dan Norway Grants (2011: 3) menegaskan bahwa:

“Civil society, at least as I see it, is simply one of the great opportunities for human responsibility for the world. I certainly do not need to stress how important it is in today’s world, which is endangered by so many different threats, that we cultivate opportunities of this kind.” (Václav Havel, Presiden Republik Ceko period of 1993–2003).

EEA dan Norway Grants (2011: 3) menyebutkan bahwa cuplikan pidato tersebut

dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memandang masyarakat sipil sebagai proses dalam membawa nilai-nilai inti dari demokrasi, transparansi, dan kesetaraan. Partisipasi dan aksi warga masyarakat juga membantu dalam memperluas konsensus sosial dan menyediakan arena untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Keduanya berperan sangat besar dalam proses runtuhnya rezim sosialis di Eropa Tengah dan Selatan, juga selama masa transisi menuju masyarakat yang demokratis serta perubahan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut, termasuk pencapaian integrasi Eropa.

Dalam tulisannya yang berjudul “Non-governmental Organizations and Public Participation in Local Environmental Decision-making in The Czech Republic”, Carmin (2003: 549) mengatakan bahwa sejak jatuhnya rezim komunis, reformasi politik telah membentuk peluang kelembagaan bagi partisipasi dan menciptakan dasar bagi organisasi independen untuk membentuk dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Di Republik Ceko, ketentuan legislatif dan pengaturan institusional membentuk peluang bagi warga masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan masalah lingkungan. Kendati peran asosiasi sosial-budaya, profesional, dan agama serta organisasi-organisasi gerakan sosial memiliki penekanan yang berbeda, keduanya (baik asosiasi maupun organisasi) dapat berkontribusi dalam proses-proses kebijakan dan perencanaan dengan cara memperkenalkan norma-norma perilaku dan menyediakan sumber daya yang mendukung partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut (Carmin 2003: 543).

Salah satu bentuk partisipasi dan aksi yang dilakukan selama masa transisi di Republik Ceko adalah gerakan lingkungan yang digerakkan dan difasilitasi oleh NGO. Dengan demikian, NGO berperan penting dalam menyosialisasikan (melalui kampanye atau pendidikan) sebuah isu, mengadvokasi masyarakat, bahkan turut berkontribusi atau mengevaluasi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Fagan dan Jehlicka (2010: 51) menganalisis

bahwa gerakan lingkungan di Ceko mengalami evolusi selama satu dekade terakhir. Dalam penjelasannya, mereka menggunakan model perspektif perkembangan Barat dan membuat klasifikasi NGO lingkungan (Environmental Movement Organization/EMO) di Ceko berdasarkan tingkat kelembagaan, birokratisasi, *repertoar* tindakan, struktur organisasi internal, dan keterlibatan keanggotaan. Klasifikasi ini menawarkan landasan untuk memantau perubahan dan perkembangan seperti yang didefinisikan, dalam banyak kasus, oleh EMO sendiri.

Berbeda dengan kebanyakan bentuk asosiasi sosial, budaya dan profesional, organisasi (NGO) lingkungan dari semua tipe terkait dengan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan mengurus masalah lingkungan. Temuan Walsh dkk., 1997 dalam (Carmin, 2003) tentang organisasi lokal yang terkait dengan aksi lokal konsisten dengan pandangan bahwa mobilisasi atau gerakan lingkungan diprakarsai oleh organisasi khusus atau dipolitisasi dan organisasi-organisasi dibentuk untuk mengatasi masalah yang spesifik. Lebih lanjut, Carmin (2003: 550) mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang dibentuk dan diatur di level lokal sesungguhnya dekat dengan konstituen bahwa mereka seolah-olah mewakili. Akibatnya, mereka mungkin berpengaruh dalam mendorong tindakan karena mereka memahami dan dapat mengartikulasikan kekhawatiran tertentu anggota masyarakat. Aksi itu tidak hanya terkait dengan keberadaan organisasi lokal, tetapi juga bagi anggota komunitas masyarakat dalam menerima pendampingan dari organisasi lingkungan nasional maupun internasional.

Dilihat dari aktivitas yang dilakukan, Andresen dan Gulbrandsen (2003: 3) membedakan NGO lingkungan menjadi dua, yaitu 1) Organisasi aktivis, yang memperoleh dana dan legitimasi melalui keanggotaan dan dukungan rakyat, 2) Penasihat organisasi, yang memperoleh dana dan legitimasi melalui kemampuan mereka untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan memberikan masukan hukum, teknis atau ilmiah

kepada pihak pembuat keputusan. Contoh NGO yang termasuk kategori aktivis adalah World Wide Fund for Nature (WWF), Greenpeace, dan Friends of the Earth. Sementara, organisasi yang merupakan penasihat atau '*think tank*' NGO adalah Center for Environmental Law International (CIEL), Lingkungan Pertahanan (ED), Yayasan Hukum Internasional, dan Pembangunan (FIELD) serta beberapa organisasi lain.

Untuk memengaruhi opini publik dalam rangka mendorong negara agar menjadi lebih efektif dalam negosiasi internasional, mendorong pemerintah untuk mematuhi komitmen internasional, dan memberikan paparan kepada publik dan perusahaan tentang bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan, beberapa cara dapat dilakukan oleh NGO, seperti memberi tekanan pada negosiator, pemerintah dan kelompok-kelompok target melalui kampanye, surat protes, aksi langsung, boikot, bahkan pembangkangan sipil (Andresen dan Gulbrandsen 2003: 3–4). Kendati demikian, dimensi orang dalam-orang luar (*insider-outsider*) cenderung bervariasi di antara NGO dan beberapa organisasi lingkungan (terutama yang memiliki sumber daya yang besar) cenderung mengejar strategi ganda. Aktivis global seperti Greenpeace dan WWF juga terlibat dalam konstruksi pengetahuan, menggunakan jasa ilmuwan dan analis untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang isu-isu kompleks.

Beberapa kekuatan atau modal NGO yang dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan informasi dan memengaruhi para pengambil keputusan adalah sebagai berikut. (1) Landasan intelektual: NGO memiliki pengetahuan tentang isu tertentu dan kemampuan untuk menyediakan penasihat ahli dan analis bagi para pembuat keputusan; (2) Keanggotaan: anggota NGO yang melampaui tingkat nasional bahkan internasional; (3) Landasan politik: akses NGO kepada para pengambil keputusan dan politisi resmi; (4) Kondisi keuangan: sumber daya keuangan NGO untuk kebutuhan kampanye, lobi, partisipasi di konferensi, membimbing laporan para ahli, dan lain-lain (Andresen dan Gulbrandsen 2003: 5).

Selain itu, struktur peluang berpolitik di level lokal atau domestik juga turut memengaruhi perkembangan gerakan NGO. Carmin dan Hicks (2002: 2) menyebutkan paling tidak ada 4 faktor yang berhasil diidentifikasi dari struktur tersebut. *Pertama*, akses dan pilihan-pilihan untuk berpartisipasi dalam politik kelembagaan. *Kedua*, stabilitas keberpihakan politik dan kesepakatan elite. *Ketiga*, aliansi antara kelompok-kelompok gerakan dan elite. *Keempat*, kapasitas negara dan kecenderungan untuk represi.

Namun, NGO juga memainkan peran ekonomi dan budaya, khususnya dalam pembangunan dan konseptualisasi serta membingkai suatu isu. Princen dan Finger (2003: 60) lebih jauh mengatakan bahwa definisi murni politik NGO menjadi terlalu statis di mana sistem politik global lebih atau kurang dimaknai secara harfiah dan peran NGO adalah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari sistem itu. Hal tersebut juga merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh organisasi lingkungan internasional, berkontribusi terhadap teori gerakan sosial secara umum, terhadap konseptualisasi NGO yang pada dasarnya terbatas pada dimensi politik semata.

Hal menarik terungkap dalam uraian Fagin (2000: 3) tentang protes dalam gerakan lingkungan di Republik Ceko. Ia mengatakan bahwa meskipun mengadopsi taktik yang kurang konfrontatif dan lebih damai, NGO sedang dipaksa keluar dari keributan politik saat ini karena tidak ada sumber daya dan tidak ada patronase politik. Para mantan pembangkang hampir semua meninggalkan politik kiri secara formal dan oposisi yang terpecah tampaknya tidak tertarik pada isu lingkungan. Hal yang menjadi jelas dari analisis protes lingkungan di Ceko selama dekade terakhir adalah sementara hubungan antara sektor lingkungan dan elite politik telah dipastikan penting dalam menentukan pilihan strategi dan pengaruh, masalah sumber daya dan konteks yang lebih luas dalam membangun masyarakat sipil sangat penting dalam menganalisis kapasitas gerakan lingkungan.

PERKEMBANGAN ISU ENERGI TERBARUKAN

Dalam laporannya yang berjudul “Regional Sustainability Transitions: On-Farm Renewable Energy Production” Sutherland, Peter, dan Zagata (2012: 2) melakukan pembabakan terhadap perkembangan yang terjadi di 3 negara Eropa, yaitu Jerman, Republik Ceko, dan Skotlandia. Era pertama dikategorikan sebagai fase pelopor (tahun 1950 hingga 1980-an) yang ditandai dengan munculnya inovasi dan kerja sama di antara para petani, ahli (insinyur), dan perusahaan-perusahaan pengelola limbah. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an hingga 1996, mulai dilakukan percobaan dan dimulai pengakuan serta pemberian dukungan oleh pemerintah. Khusus di Republik Ceko, transformasi dan liberalisasi dalam sektor pertanian mengakibatkan runtuhnya model pertanian komunis.

Memasuki tahun 1997 hingga 2007, pengembangan energi memasuki tahap European Directives. Fase ini ditandai dengan publikasi a White Paper tentang energi terbarukan, di mana *gross in-land* utama energi terbarukan meningkat dari 5.4% pada tahun 1997 menjadi 12% tahun 2010 (laporan European Commission tahun 1997). Respons yang dimunculkan Ceko ketika itu adalah selama pra-aksesi ke Uni Eropa (2000 hingga 2004), Republik Ceko menargetkan sebesar 8% produksi energi terbarukan pada tahun 2010. Pada tahun 2002, Pemerintah Ceko mulai mendukung produksi energi terbarukan melalui dukungan harga. Amandemen terhadap UU Energi Terbarukan tahun 2004 menyebabkan peningkatan tanaman biogas (Sutherland, Peter, dan Zagata 2012: 2).

Pada tahun 2005, Republik Ceko memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk mendorong pembangkit listrik dari sumber terbarukan. UU Promosi Pembangkitan Listrik dari Sumber Terbarukan menetapkan kerangka legislatif untuk penyediaan dukungan. Sistem dukungan dirancang untuk menjamin pengembalian investasi di pembangkit listrik

fotovoltaik dalam 15 tahun.³ Selain tenaga surya, Ceko juga mengembangkan energi yang bersumber dari angin, air, energi panas bumi, dan biomassa untuk memproduksi listrik dan panas. Pemanfaatan sumber energi sekunder dan bahan bakar alternatif dalam transportasi juga akan dipromosikan. Ini dilakukan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, dan meminimalkan beban lingkungan. Dengan demikian, hanya teknologi yang tidak menghasilkan kerusakan permanen pada lingkungan yang akan digunakan. Negara akan mendukung teknologi yang meminimalkan produksi limbah yang tidak dapat diolah (*non-degradable*) sebagai beban bagi generasi mendatang. Negara juga akan mendukung penyimpanan yang aman dan jangka panjang dari limbah tersebut yang tidak dapat didaur ulang atau dibuang dengan cara lain (*European Renewable Energy Council* TT: 42–43).

Tahap ketiga menurut analisis Sutherland, Peter, dan Zagata (2012: 3) disebut sebagai pengarusutamaan, fase yang ditandai dengan perbaikan dan penyerapan. Fase ini dimulai pada tahun 2008 hingga saat ini. Khusus di Ceko, pada tahun 2012 undang-undang baru untuk mendukung produksi energi terbarukan disahkan sehingga penggunaan limbah panas secara minim dari stasiun biogas menjadi kewajiban dan kebijakan ini juga menetapkan kerangka kerja baru untuk pengembangan sektor tersebut. Selain itu, terjadi peningkatan oposisi lokal penggunaan turbin angin dan pengembangan berbasis komunitas (*community-based*) yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini. Fase ini juga ditandai dengan oposisi lokal dalam proses lobi penduduk Ceko untuk mendukung pencapaian target sebesar 13,5% energi terbarukan (diharapkan tercapai tahun 2013).

3 Berita dalam artikel berjudul “Developments in Czech Renewables”, diunduh dari <http://www.kinstellar.com/publications/article/developments-in-czech-renewables-825/>. Diakses tanggal 8 November 2012.

Sementara itu, dalam pandangan Gewessler dan Lottje (2010), perdebatan politik dan media di Republik Ceko sangat tidak menguntungkan bagi sumber-sumber terbarukan. Lembaga negara, dengan menggunakan perkiraan dari perusahaan energi setengah milik negara yang bernama ČEZ, memperingatkan bahaya peningkatan yang signifikan dari harga listrik sebagai akibat dari dukungan untuk tanaman fotovoltaik. Politisi justru menentang pemanfaatan semua sumber energi terbarukan. Tindakan negara tersebut justru bertentangan dengan persyaratan dalam Directive 2009/28/EC.⁴

Kelanjutan dari proses tersebut, selama tahun 2010 pemerintah dan lembaga negara lainnya mengambil beberapa langkah yang cukup rumit, atau dengan kata lain dapat menyulitkan pengembangan lebih lanjut pemanfaatan energi dari sumber terbarukan, yaitu dengan menghentikan koneksi sumber energi terbarukan terhadap jaringan listrik, mempersiapkan SK penetapan standar efisiensi minimal untuk panel fotovoltaik secara sistematis, dan membuat proposal untuk memodifikasi UU No. 180/2005 Coll. dan mengenakan pajak sebesar 26% terhadap pendapatan untuk tanaman fotovoltaik yang dioperasikan pada tahun 2009 dan 2010. Hal yang disayangkan adalah langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah tersebut dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan *stakeholder* lainnya seperti sektor bisnis (pengembang energi terbarukan), NGO, dan masyarakat luas (Gewessler dan Lottje 2010).

Inilah yang menarik dari perjalanan Ceko dalam mengembangkan energi terbarukan. Setiap pemangku kepentingan memiliki perspektif masing-masing dalam memaknai

4 *Directive* ini menetapkan kerangka umum penggunaan energi dari sumber terbarukan untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan untuk mempromosikan transportasi bersih. Untuk tujuan ini, rencana aksi nasional didefinisikan, seperti prosedur penggunaan *biofuel*. *Directive* 2009/28/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 April 2009 berisi tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan dan mengubah serta membatalkan *Directives* 2001/77/EC dan 2003/30/EC (dapat diunduh di http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm). Diakses tanggal 11 November 2012).

energi terbarukan. Kepentingan pun kemudian memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah meskipun Ceko memiliki kewajiban untuk mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa. Dalam skenario European Commission yang dikutip dari Zacharov, Fidler, dan Černý (dalam *The Club of Prague 2006*: 23) bahwa intensitas energi dan karbon harus dikurangi penggunaannya dalam produksi listrik. Ini akan didorong oleh kebijakan hingga batas tertentu, tetapi juga harus didukung oleh pasar. Dengan demikian, efisiensi dan kelanjutan? Ataukah dalam perjalanannya justru kontradiktif dengan cita-cita tersebut? Melalui pencarian data sekunder berupa berita atau artikel yang mendeskripsikan perkembangan terbaru di Ceko, penulis mencoba menunjukkan bahwa upaya pengembangan energi terbarukan di Ceko tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang terjadi di beberapa negara lain, kondisi sosial-politik Ceko juga turut memengaruhi proses tersebut. Dengan memfokuskan pada NGO sebagai pemangku kepentingan yang independen (meskipun beberapa NGO lokal mendapat dana dari pemerintah maupun Uni Eropa), tulisan ini hendak menunjukkan bahwa respons NGO tidaklah homogen.

NGO DAN ENERGI TERBARUKAN: RESPONS YANG MUNCUL

Laporan SRC International CS (1999: 19) menyatakan bahwa kesadaran akan manfaat dari sumber energi terbarukan masih rendah di beberapa kelompok sasaran (yang ditelitinya), seperti investor, masyarakat umum, industri, jasa komersial dan publik, dan pengguna energi lainnya. Sejumlah kesalahpahaman terkait biaya dan potensi yang dibutuhkan juga turut memengaruhi kurangnya dukungan akan pengembangan energi terbarukan. Oleh karena itu, dilakukan beberapa kegiatan untuk menyebarluaskan informasi, kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran, kegiatan penerbitan, kursus dan seminar yang dijalankan oleh beberapa lembaga di Republik Ceko meskipun sejauh ini upaya-upaya

tersebut belum memuaskan dan mereka hanya berorientasi, terutama pada kelompok terpilih.

Berbeda dengan laporan tersebut, “The Clean Energy Brigade”, proyek yang diprakarsai oleh sebuah NGO lokal Ceko, Hnutí DUHA Rainbow Movement, muncul sebagai upaya untuk mempromosikan konsep “hemat energi” dan konservasi dengan langsung memasang teknologi hemat energi di rumah dan bangunan publik. Kegiatan ini didasarkan pada kerja sama dengan pemerintah kota dan masyarakat setempat. Biaya untuk bahan isolasi diperoleh dari para pemilik bangunan atau beberapa organisasi lain, seperti The Environmental Partnership, The Slunicko Foundation, PHARE, The Regional Environmental Centre, Stichting Doen, The United States Agency for International Development (USAID), The US Peace Corps.⁵

Laba atas investasi bagi pelanggan telah dihitung kurang dari dua tahun, namun karena proyek ini sebagian dibiayai oleh pelanggan, kesulitan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dana dalam lingkup kota. Akibatnya, pembangunan beberapa infrastruktur/gedung publik, seperti sekolah, taman kanak-kanak, balai kota, dan *flat* yang dimiliki oleh pemerintah kota menjadi terhambat. Kabar baiknya adalah pemerintah kota mulai menunjukkan inisiatif yang lebih besar. Dengan meningkatnya frekuensi, mereka meminta dukungan teknis dan pendidikan bukan untuk bantuan teknis langsung. Secara khusus, mereka meminta seminar pelatihan bagi penduduk yang menganggur di wilayah di mana teknologi hemat energi dipasang.⁶

Pengembangan sumber energi yang lain dilakukan oleh Czech Renewable Energy Agency, sebuah NGO yang didirikan untuk mendukung energi terbarukan, adalah berdiskusi dengan pemerintah dan mendukung kebijakan tentang energi matahari dan energi terbarukan. Jaromir

5 Berita berjudul “Clean Energy Brigades in the Czech Republic”, diunduh dari http://www.inforse.org/europe/success/SU_EC_CZ.htm. Diakses tanggal 12 November 2012.

6 Berita berjudul “Clean Energy Brigades in the Czech Republic”, diunduh dari http://www.inforse.org/europe/success/SU_EC_CZ.htm. Diakses tanggal 12 November 2012

Rehak, direktur NGO, mengatakan bahwa Republik Ceko adalah satu-satunya negara di Eropa Timur yang memproduksi perangkat fotovoltaik yang mengonversi tenaga surya menjadi energi listrik. Ia juga menyebutkan telah terjalin pula kerja sama yang luas antara sektor komersial dan the Czech Academy of Sciences dan sejumlah perguruan tinggi teknis di Ceko. Namun, sebagian besar dari produksi peralatan surya Ceko justru diekspor. Para peneliti sedang bekerja untuk meningkatkan efisiensi peralatan surya dan menurunkan biaya sehingga negara ini mampu bersaing dengan negara tetangga yang lebih maju dalam penggunaan energi surya.⁷

Sementara itu, Greenpeace menggandeng 2 NGO lingkungan lain di Ceko, yaitu The European Renewable Energy Council (EREC) dan Global Wind Energy Council (GWEC). Mereka mengajukan beberapa rekomendasi bagi kebijakan dan landasan aksi untuk diimplementasikan pada sektor energi⁸, yaitu: (1) Mencabut semua subsidi untuk bahan bakar fosil dan energi nuklir. (2) Menginternalisasi biaya (sosial dan lingkungan) eksternal dari produksi energi melalui perdagangan emisi ‘*cap and trade*’.⁹ (3) Menentukan standar efisiensi yang ketat untuk semua peralatan mengonsumsi energi, bangunan, dan kendaraan. (4) Menetapkan target mengikat secara hukum untuk energi terbarukan dan pembangkit listrik dan panas. (5) Mereformasi pasar listrik dengan menjamin akses prioritas ke

7 Horáková, Pavla. 2004. Czech Solar Day: Raises awareness of benefits of solar power. Diunduh dari <http://www.radio.cz/en/section/science/czech-solar-day-raises-awareness-of-benefits-of-solar-power>. diakses tanggal 12 November 2012.

8 Skenario Energi [R]evolusi 2012 yang diprakarsai oleh Greenpeace. Skenario ini memberikan landasan fundamental yang konsisten untuk melindungi iklim melalui investasi dalam energi terbarukan. Ini tentang memperoleh dunia “dari mana kita sekarang” kepada “kemana kita perlu melangkah” dengan menghapuskan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi CO₂ sambil menjamin keamanan energi.

9 Di bawah skema perdagangan emisi *cap-and-trade*, pemerintah akan menetapkan “topi” tahunan pada total emisi polusi karbon yang tercakup di dalam skema. Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah izin emisi yang setara dengan “topi” yang ditetapkan. Perizinan tersebut dapat dijual dengan cara dilelang, atau dialokasikan secara administratif. Setiap izin emisi akan setara dengan satu ton karbon dioksida. Pada setiap akhir tahunnya, kesatuan/entitas yang berwenang harus menyerahkan sejumlah izin yang setara dengan polusi karbon aktual mereka. Entitas yang bertanggung jawab, dan pihak lainnya, bebas untuk mendapatkan izin perdagangan di antara mereka sendiri.

jaringan listrik bagi pembangkit listrik terbarukan. (6) Memberikan keuntungan yang ditetapkan dan stabil untuk investor, misalnya dengan program *feed-in tariff*.¹⁰ (7) Mengimplementasikan, baik mekanisme pelabelan maupun pengungkapan, dalam menyediakan informasi produk yang lebih ramah lingkungan. (8) Meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi.

Di samping beberapa upaya yang dilakukan NGO-NGO tersebut, penulis juga ingin menunjukkan beberapa kasus sebagai bentuk protes NGO terhadap kebijakan maupun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Ceko yang mengatasmakan pengembangan energi terbarukan. Dengan beberapa modal yang disebutkan Andresen dan Gulbrandsen (2003), protes tersebut disampaikan melalui media-media elektronik, seperti radio, televisi, ataupun internet. Seperti disebutkan dalam analisis yang dilakukan oleh Císař (TT) bahwa media (terutama yang berpengaruh) dibutuhkan dalam menyosialisasikan “suara-suara” NGO, khususnya yang ditujukan kepada pemerintah maupun industri (baik milik negara maupun swasta). Kemudahan akses masyarakat pada media akan memudahkan penyebaran informasi tentang perumusan maupun implementasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memonitor jalannya kebijakan.

Draft peraturan yang dipersiapkan oleh The Energy Regulatory Office (ERÚ) dan Kementerian Industri dan Perdagangan menjadi salah satu contoh kebijakan yang mendapat kritikan

10 Menurut Vyoma Jha (2012), sistem *feed-in tariff* ditandai dengan jaminan harga pembelian listrik (diatur lebih tinggi dari harga pasar), jaminan terhadap akses jaringan listrik, dan kontrak jangka panjang. Fitur lain dalam kebijakan ini adalah persyaratan “muatan lokal” atau “muatan domestik”, yang membuatnya wajib bagi investor untuk menggunakan beberapa bagian tertentu dari material yang berasal dari para pemasok lokal guna memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari kebijakan ini (dalam artikel online berjudul “Trends in Investor Claims Over Feed-in Tariffs for Renewable Energy”, diunduh dari <http://www.iisd.org/itn/2012/07/19/trends-in-investor-claims-over-feed-in-tariffs-for-renewable-energy/>). Diakses tanggal 16 November 2012.

dari NGO. Neela Winkelmann-Heyrovská¹¹ melayangkan protes kepada pemerintah untuk menghentikan semua subsidi energi terbarukan mulai tahun 2014 dan seterusnya. Ia merespons pernyataan ketua ERÚ,¹² Alena Vitásková, yang mengatakan bahwa energi terbarukan dengan cepat menjadi lebih kompetitif dengan sumber listrik konvensional. Dengan potensi yang dimiliki oleh Republik Ceko dan asumsi kebijakan yang tepat, Ceko dapat menjadi salah satu negara pertama di mana sumber-sumber terbarukan mampu benar-benar bersaing dengan nuklir dan batu bara.¹³ Oleh karena itu, pemanfaatan kedua sumber energi tersebut dapat dihapuskan.

Neela Winkelmann-Heyrovská juga memperingatkan bahwa bagaimanapun kebijakan baru yang mendukung pengembangan sumber-sumber energi akan segera dimasukkan ke Parlemen dan menghasilkan subsidi, kebijakan tersebut berpotensi merusak strategi energi hijau dalam jangka panjang.¹⁴ Ia pun menjelaskan bahwa mengingat kurangnya kontrol regulasi yang kuat, hukum akan memunculkan kerentanan pasar terhadap oknum perusahaan gas alam.¹⁵ Dengan demikian, respons tersebut menjadi awal dari gerakan kelompok-kelompok NGO lingkungan untuk mengirim surat terbuka kepada Presiden Václav Klaus pada tanggal 27 April 2012 yang isinya meminta presiden mengganti Vitásková sebagai kepala pembuat kebijakan.¹⁶

11 Seorang advokat publik untuk energi terbarukan.

12 Disampaikan kepada media tanggal 25 April 2012.

13 Thompson, Emily. 2012. Lights out for renewable energy subsidies?

A proposal to end all state support for renewable energy has been applauded by industry, but has outraged green energy producers. Berita online <http://www.praguepost.com/business/13003-lights-out-for-renewable-energy-subsidies.html>. Diakses tanggal 30 Oktober 2012.

14 Winkelmann-Heyrovská menyatakan bahwa "dalam rancangan yang diajukan saat ini, ada juga dukungan yang luar biasa untuk bio-metana, yang merupakan bio-gas dimurnikan untuk gas alam berkualitas," kata. "Satu-satunya cara untuk membedakannya adalah melalui penanggalan karbon (*carbon dating*), dan tidak ada yang akan melakukan itu karena terlalu mahal."

15 Ia mengatakan bahwa "Kita tidak bisa mengecualikan skenario ini mengingat betapa sedikit kontrol terhadap para pemain tertentu di pasar".

16 Thompson, Emily. 2012. Lights out for renewable energy subsidies?

A proposal to end all state support for renewable energy has been applauded by industry, but has outraged green energy producers. Berita online <http://www.praguepost.com/business/13003-lights-out-for-renewable-energy-subsidies.html>. Diakses tanggal 30 Oktober 2012.

Protes terhadap kebijakan pemerintah yang lain dilakukan oleh Environmental Law Service dan the Centre for Transport and Energy, 2 NGO yang berada di Praha. Mewakili NGO-NGO lingkungan di Ceko, keduanya telah mengajukan laporan kritis kepada the European Commission. Laporan tersebut berisi beragam isu problematis terkait rencana Ceko baru-baru ini untuk mengalokasikan 108 juta tunjangan gratis untuk 85 produsen listrik lokal setelah 2012. Apabila permohonan yang diajukan oleh pemerintah tersebut melanggar *Emissions Trading System (ETS) Directive* Uni Eropa, Komisi Eropa dapat menolak secara keseluruhan atau sebagian saja.¹⁷

Analisis yang dilakukan beberapa NGO lingkungan dalam "*New Report on Czech ETS Application. Commission Alerted*"¹⁸ kemudian dituangkan dalam beberapa temuan utama dalam laporan berikut: (1) Republik Ceko belum dimasukkan ke dalam ketentuan *monitoring* dan penegakan kewajiban sehubungan dengan implementasi rencana. (2) Setidaknya sepuluh proyek investasi besar dalam aplikasi tidak memenuhi syarat karena tanggal yang lebih awal daripada yang diperbolehkan dalam *Directive*. (3) Perusahaan energi raksasa CEZ, perusahaan listrik yang mayoritas kepemilikannya adalah negara, seharusnya menerima 68.200.000 tunjangan bebas dari total 108,2 juta. Hal itu meningkatkan kekhawatiran serius tentang distorsi dalam kompetisi dan penguatan posisi perusahaan tersebut menjadi semakin dominan di pasar. (4) Empat puluh enam persen dari investasi dalam aplikasi berdampak pada ketergantungan

17 Republik Ceko adalah salah satu dari sepuluh negara anggota Uni Eropa yang dapat mengajukan permohonan pengecualian dari aturan lelang Uni Eropa dan terus mengalokasikan sebagian besar dari tunjangan emisi untuk produsen listrik secara gratis pada 2019. Dalam pertukaran untuk alokasi gratis, penerima manfaat dari ketentuan ini - perusahaan listrik - diwajibkan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan memodernisasi sektor listrik dan membantu transisi ke pembangkit listrik karbon kurang intensif. Berita online berjudul "New report on Czech ETS application. Commission alerted", diunduh dari <http://en.eps.cz/news/new-report-czech-ets-application-commission-alerted>. Diakses tanggal 10 November 2012.

18 Berita online yang diunduh dari <http://en.eps.cz/news/new-report-czech-ets-application-commission-alerted>. Diakses tanggal 10 November 2012.

Ceko (saat ini dan masa yang akan datang) pada batu bara dan intensitas karbon yang tinggi.

Selain itu, proses penyusunan dan pengadopsian dokumen tidak sesuai dengan *Strategic Environmental Assessment* dari EU *Directive*, ditambah dengan kenyataan bahwa kurangnya sosialisasi kepada publik sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk beropini semakin menambah penolakan terhadap rancangan tersebut.¹⁹

Bankwatch, NGO lingkungan yang beraktivitas di level regional, juga mengajukan keberatan atas langkah parlemen Ceko dalam menyetujui "*Renewable Energy Sources Support Bill*" yang menurutnya lebih tepat disebut sebagai "*The CEZ Support Bill*". RUU ini berpotensi menjadi hambatan serius bagi pengembangan energi terbarukan karena justru membuka jalan bagi pasar energi Ceko yang didominasi oleh bahan bakar fosil dan nuklir yang diproduksi oleh mastodon CEZ. Bankwatch memperkuat argumennya dengan berasumsi bahwa sektor bisnis dan politik di Ceko memiliki hubungan dekat sehingga RUU tersebut disetujui.²⁰

Beberapa poin dari undang-undang baru ini membuat NGO lingkungan yakin bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk meredam daripada mendukung langkah untuk mengembangkan energi terbarukan, yaitu: (1) Produsen energi bersih akan kehilangan jaminan penyerapan listrik mereka ke jaringan listrik. Oleh karena itu, energi terbarukan tidak pernah bisa sampai ke jaringan. (2) Dukungan dalam bentuk *feed-in tariff* akan dibatasi oleh batas tahunan yang ditetapkan untuk setiap sumber energi terbarukan. Substitusi tidak diperbolehkan, ataupun mentransfer bagian dari kuota ke tahun berikutnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan energi terbarukan akan bersaing satu

sama lain untuk menjual produksi mereka sebelum kuota diisi. Kendala-kendala dan ketidakpastian bisnis tersebut dipastikan akan dengan mudah membuat Republik Ceko kehilangan target pencapaian sebesar 13% pemanfaatan energi terbarukan. (3) RUU meluaskan dana untuk *co-firing* biomassa dan batu bara di pembangkit listrik yang besar sampai dengan tahun 2015. Keputusan ini akan menyebabkan kenaikan harga biomassa sehingga mengancam tanaman lokal, stasiun CHP, dan pengguna boiler domestik. (4) Alih-alih mendukung penggunaan sumber energi yang berasal dari sampah dapur, daun atau rumput dalam bentuk biogas, undang-undang baru secara finansial mendukung pembakaran sumber-sumber energi potensial di pabrik pembakaran sampah, bersama dengan bahan-bahan daur ulang berkualitas tinggi lainnya.

Dengan undang-undang ini, Pemerintah Ceko memotong setiap pesaing potensial untuk sumber energi fosil dan sektor nuklir, dan diwujudkan dalam CEZ di mana-mana.

Bentuk ketidaksetujuan beberapa NGO yang disampaikan dalam bentuk protes dipahami oleh penulis sebagai resistensi. Meminjam istilah Scott (1985: 33–34), konsep *political action* lebih relevan untuk menggambarkan gerakan yang dilakukan oleh NGO di beberapa media tersebut. Berbeda dengan resistensi "sehari-hari" ("*everyday*" *resistance*), aksi politik bersifat lebih terbuka, berupa konfrontasi terbuka, meskipun juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Sisi menarik dari gerakan lingkungan yang dilakukan oleh NGO lingkungan di Ceko sejak masa transisi (hingga Ceko bergabung dengan Uni Eropa) adalah sifat gerakan yang lebih bersifat politis. NGO berupaya menyuarkan aspirasi, baik yang datang dari organisasi maupun dari masyarakat, dengan metode atau strategi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi yang dimilikinya.

19 Berita online berjudul "New report on Czech ETS application. Commission alerted", diunduh dari <http://en.eps.cz/news/new-report-czech-ets-application-commission-alerted>. Diakses tanggal 10 November 2012.

20 The day renewable energy was killed in the Czech Republic. Artikel online tanggal November 14, 2011. Diunduh dari website <http://bankwatch.org/node/9193>. Diakses tanggal 10 November 2012.

Para aktivis²¹ (*transactional activists* dan *green activists*) di Ceko tidak lagi tertarik pada gerakan yang memobilisasi sejumlah orang, melainkan mengembangkan kapasitas yang dapat memungkinkan mereka untuk membentuk perdebatan dan memengaruhi publik melalui berbagai media. Císař (TT: 10) menyebutkan bahwa protes yang muncul dalam berbagai bentuk mengasumsikan bentuk-bentuk dari *dry statistics*, fotografi yang menunjukkan gambar-gambar mengejutkan dan menyedihkan, keterangan saksi mata, selebaran, poster, grafiti, surat elektronik, lobi atau *scientific expertise*. Protes dinyatakan dalam publikasi, tulisan bernada hukum, festival film, pameran seni, program pelatihan, konferensi, maupun upaya-upaya yang dilakukan jaringan nasional dan internasional. Oleh karena itu, aktivis (transaksional) biasanya memilih metode profesional dari *public relations* dan “marketing” aktivis, yaitu mereka bekerja pada kerangka isu yang difokuskan dan mencoba masuk ke dalam media utama (*mainstream media*).

Dengan bantuan para ahli untuk mempelajari berbagai kebijakan lingkungan, NGO lingkungan bertindak sebagai aktor sub-negara yang kredibel dan efektif untuk memengaruhi kebijakan lingkungan dan setiap perencanaan yang disusun oleh pemerintah, dengan cara yang lebih mendalam. Cruickshank (2008: 119–120) mengatakan bahwa di Republik Ceko kelompok inti NGO-NGO lingkungan berupaya membangun jaringan yang efektif di antara mereka. Bagaimanapun, dengan beberapa

21 Dalam definisi yang dibuat Císař (2008: 25), para aktivis adalah individu yang mencurahkan sebagian besar waktu dan/atau sumber daya lain yang mereka miliki untuk kegiatan politik kelompok/*platform*/organisasi tertentu. Menurut penelitian yang ia lakukan, para aktivis tidak harus dibayar karena itu adalah perjuangan mereka untuk memenuhi syarat sebagai aktivis. Sementara, yang lain adalah non-aktivis, yaitu warga biasa, yang mungkin berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik. Dalam beberapa penelitian tentang partisipasi politik, hal itu disebut sebagai “tindakan oleh warga biasa”, → tidak ada dalam daftar pustaka, → tidak ada dalam daftar pustaka. Perbedaan antara aktivis dan warga biasa adalah tidak seperti warga biasa, aktivis memperhitungkan biaya atau keuntungan ekstra terkait keterlibatan mereka dalam berpolitik. Definisi lain yang terkait adalah aktivisme yang mengacu pada apa yang aktivis dan organisasi mereka lakukan; bentuk partisipasi untuk “menangkap” apa yang warga biasa lakukan.

pengecualian, NGO lingkungan profesional yang mendominasi arena kebijakan (mungkin) berhasil memengaruhi draft kebijakan serta mengartikulasi wacana lingkungan yang dominan di media dan dalam lingkup kebijakan kendati menemui beberapa kegagalan untuk mendukung masyarakat luas.

Di samping keberhasilan NGO lingkungan dalam memengaruhi proses perumusan maupun implementasi kebijakan, terdapat pula kesulitan yang harus dihadapi, terutama ketika mengkritik kebijakan yang cenderung lebih memihak pada *stakeholder* lain, misalnya industri. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan salah seorang aktivis Greenpeace (tanggal 3 Juni 2010), Lucie Jakesova, yang menunjukkan resistensi yang besar terhadap industri-industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Sementara itu, Greenpeace menilai bahwa industri dapat memengaruhi kebijakan yang dirumuskan pemerintah karena sumber daya materi (uang dan kekuasaan) yang mereka miliki, seperti kutipan berikut:

“All of our campaigning meets big challenges. You always have an industry against you, such as energy, chemicals, and coal. They have different resources, they are powerful, they have money and they have influence in the political context. As NGOs, we are only financed by donors and have limited capacity. There are good reasons for why we want to achieve the changes we seek. At the very basic level, all of our campaigns are for quality of life for the people.”

Beberapa respons NGO terhadap isu energi terbarukan yang muncul di berbagai media menunjukkan bahwa selain lobi, protes juga menjadi salah satu aktivitas inti NGO lingkungan di Republik Ceko. Seperti disebutkan oleh Davis (2004: 386) bahwa NGO lingkungan juga sangat aktif melakukan penelitian, pemberian pendidikan/pelatihan, penerbitan, dan protes, di samping giat melobi dan melitigasi proses perumusan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, NGO kemudian lebih giat melibatkan diri dalam

mode-mode “*insider*” dalam partisipasi politik yang dijalaninya.

PENUTUP

Energi terbarukan menjadi salah satu fokus pembangunan Republik Ceko saat ini meskipun upaya pengembangannya telah dimulai sejak negara ini masih menjadi Cekoslovakia. Setelah bergabung dengan Uni Eropa tahun 2004 lalu, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber tidak terbarukan (seperti batu bara), semakin keras, mengingat Uni Eropa juga memiliki ketentuan dengan beberapa target yang harus dicapai oleh negara-negara anggotanya melalui kebijakan (Directive) Komisi Eropa. Dalam jangka pendek (tahun 2013), pemanfaatan energi terbarukan di Republik Ceko diharapkan mencapai angka 13,5% dari total penggunaan energi di negara tersebut.

Sekalipun cukup tinggi, Ceko memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai target tersebut. Tersedianya sumber-sumber terbarukan bagi energi listrik seperti air, angin, surya, panas bumi, limbah pertanian dan rumah tangga, serta beberapa potensi yang lain, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (meskipun belum semaju Jerman), sangat memungkinkan Ceko mampu memenuhi kebutuhan energi bersih bagi masyarakat. Beberapa langkah telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka tujuan tersebut, termasuk di antaranya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain seperti mendukung industri dalam negeri untuk memproduksi energi yang lebih ramah lingkungan.

Selain menghasilkan energi yang lebih bersih sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pemanfaatan batu bara, isu lain yang menyertai energi terbarukan adalah pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini pula yang diangkat oleh beberapa NGO, sebagai pemangku kepentingan lain, dalam mengkritisi setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Secara sederhana dalam pemahaman penulis,

pembangunan berkelanjutan berarti menjamin ketersediaan sumber daya energi bagi generasi mendatang sehingga yang harus dilakukan generasi masa sekarang adalah memanfaatkan sumber energi secara bijaksana (efisiensi energi).

Namun dalam praktiknya, tidak semua kebijakan pemerintah berada dalam kerangka tersebut. Beberapa kritik kemudian diajukan oleh NGO-NGO lingkungan yang *concern* terhadap masalah energi (telah dideskripsikan). Keberatan yang dimunculkan antara lain inkonsistensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Salah satu isu yang juga cukup menguat adalah adanya “kolaborasi” atau saling dukung antara pemerintah dan industri (baik milik negara maupun swasta) sehingga kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Di sisi lain, dalam perspektif NGO, proses perumusan kebijakan juga tidak melibatkan masyarakat padahal Uni Eropa sendiri mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah itulah yang kemudian memunculkan respons negatif beberapa NGO lingkungan. Respons-respons tersebut disampaikan dalam bentuk protes melalui media. Ada NGO yang menyampaikan secara individual, ada pula yang menyertakan NGO lain sehingga berbentuk protes bersama. Cara-cara tersebut, dalam pandangan penulis, cukup efektif mengingat akses terhadap media sangat terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung. Dengan demikian, proses demokratisasi di Ceko dapat berjalan dan resistensi yang diwujudkan dalam bentuk protes dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan. Bagaimanapun, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memfasilitasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di level lokal, maupun langkah-langkah untuk memunculkan perdebatan publik melalui protes terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa NGO lingkungan di Ceko sangat dinamis dalam merespons sebuah isu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andresen, S. & Gulbrandsen, L.H. (2003). *The Role of Green NGOs in Promoting Climate Compliance*. FNI report. The Fridtjof Nansen Institute. Norway: Fridtjof Nansen Institute.
- Bennett, J.W. (1980). Human Ecology as Human Behavior: A Normative Anthropology of Resource Use and Abuse. Dalam Altman, I. et al. (ed.). *Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research*. New York: Plenum Press.
- Carmin, J. (2003). Non-governmental Organizations and Public Participation in Local Environmental Decision-making in The Czech Republic. *Local Environment*, 8 (5): 541–552.
- Carmin, JoAnn & Hicks, B. (2002). International Triggering Events, Transnational Networks, and The Development of Czech and Polish Environmental Movements. *An International Journal*, 7(3): 305–324.
- Císař, O. (2008). Political Activism in the Czech Republic. The paper was presented at the Workshop on Contentious Politics, ISERP, Columbia University, New York.
- Císař, Ondřej. (Tanpa tahun). Representation without Participation? The Channeling of Environmental Movement Organizations in the Czech Republic after the Fall of Communism. This paper has been prepared as part of the research project Political Parties and Representation of Interests in Contemporary European Democracies.
- Clean Energy Brigades in the Czech Republic, diunduh dari http://www.inforse.org/europe/success/SU_EC_CZ.htm. Diakses tanggal 12 November 2012.
- Cruickshank, N.A. (2008). *Power, Civil Society and Contentious Politics in Post Communist Europe*. A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St. Andrews. Full metadata for this item is available in the St Andrews Digital Research Repository. Online at <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/>.
- Czech Solar Day: Raises awareness of benefits of solar power. Diunduh dari <http://www.radio.cz/en/section/science/czech-solar-day-raises-awareness-of-benefits-of-solar-power>. Diakses tanggal 12 November 2012.
- Davis, S.M. (2004). Building a Movement from Scratch: Environmental Groups in the Czech Republic. *The Social Science Journal*, (41): 375–392.
- Developments in Czech Renewables, diunduh dari <http://www.kinstellar.com/publications/article/developments-in-czech-renewables-825/>. Diakses tanggal 8 November 2012.
- EEA & Norway Grants. (2011). *Empowering NGOs to Make a Difference*. Thematic Report on Civil Society. Published on the occasion of the NGO stakeholder seminar in Oslo in June 2011.
- European Renewable Energy Council (EREC). (Tanpa tahun). *Energy Sustainable Communities: Experience, Success Factors, and Opportunities in The EU-25*. The Support of The European Communities dan Fifth Framework Programme.
- Fagan, A. & Jehlicka, P. (2010). Contours of the Czech environmental movement: a comparative analysis of Hnutí Duha (Rainbow Movement) and Jihočeské matky (South Bohemian Mothers). *Environmental Politics*, 12(2): 49–70.
- Fagin, A. (2000). Environmental Protest in the Czech Republic: Three Stages of Post-Communist Development. *Czech Sociological Review*, 8(2): 139–156.
- Gewessler, L. & Lottje, F. (2010). *27 National Action Plans = 1 European Energy Policy? An analysis of six National Renewable Energy Action Plans*. Belgium: the Green European Foundation.
- http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm. Diakses tanggal 11 November 2012.

- Jha, Vyoma. (2012). Trends in Investor Claims Over Feed-in Tariffs for Renewable Energy”, diunduh dari <http://www.iisd.org/itn/2012/07/19/trends-in-investor-claims-over-feed-in-tariffs-for-renewable-energy/>. Diakses tanggal 16 November 2012.
- Khan, Hameed Ahmed. 2006. Road to Sustainable Development. Islamabad: COMSATS Headquarters.
- Kottak, C.P. (1999). The New Ecological Anthropology. *American Anthropologist*, 101 (1): 23–35. USA: American Anthropological Association.
- New report on Czech ETS application. Commission alerted, diunduh dari <http://en.eps.cz/news/new-report-czech-ets-application-commission-alerted>. Diakses tanggal 10 November 2012.
- Novianti, K. (2010a). *Environmental Movement di Republik Ceko: Dinamika Tantangan yang Dihadapi NGO Lingkungan Pasca Revolusi Velvet*. *Global & Strategies*, 4(1): 29–49. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Novianti, K. (2010b). *The Environmental Movement in The Czech Republic: the Civil Society Establishment Process*. Jakarta: LIPI Press.
- Princen, T. & Finger, M. (2003). *Environmental NGOs in World Politics Linking the Local and the Global*. Jack P. Manno and Margaret L. Clark (ed.). UK: the Taylor & Francis e-Library.
- Schutzowski, H. (2006). *Human Ecology Biocultural Adaptations in Human Communities*. Dieter Czeschlik, (ed.). Springer-Verlag. Heidelberg. Germany.
- Scott, J.C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. USA: Yale University Press.
- Shriver, T.E. & Messer, C. (2009). Ideological Cleavages and Schism in the Czech Environmental Movement. *Human Ecology Review*, 16 (2): 161–171.
- SRC International CS s.r.o., dll. (1999). *Renewable Energy Action Plan: Policy Action Plan for Promotion of Renewable Energy in the Czech Republic to 2010*. Prepared for the World Bank, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Environment of the Czech Republic.
- Sutherland, Lee-Ann, Peter, S. & Zagata, L. (2012). *Regional Sustainability Transitions: On-farm Renewable Energy Production*. The FarmPath project is co-ordinated by the James Hutton Institute, Aberdeen, Scotland, UK.
- The Club of Prague. (2006). *Energy: Empowering the Individual and the Community*. Dmitriy Zacharov, Pavel Fidler, dan Oldřich Černý (ed.). Prague: Prague Security Studies Institute.
- The Day Renewable Energy was Killed in the Czech Republic. Artikel online tanggal November 14, 2011. Diunduh dari website <http://bankwatch.org/node/9193>. Diakses tanggal 10 November 2012.
- Thompson, Emily. 2012. Lights Out for Renewable Energy Subsidies? A Proposal to End all State Support for Renewable Energy has been Applauded by Industry, but has Outraged Green Energy Producers. Berita online <http://www.praguepost.com/business/13003-lights-out-for-renewable-energy-subsidies.html>. Diakses tanggal 30 Oktober 2012.
- Tsing, Anna. (1999). *Notes on Culture and Natural Resource Management*. Berkeley: Institute of International Studies.
- J(0)1-& B(0)-(0)5-A. & , P(0)9-(0)-& C.(0)1-S. & L.H(0)(Tanpa tahun). & (0)(Tanpat tahun)(0) N.A(0)

MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA *INDONESIAN STUDENTS MOBILITY IN THE NETHERLANDS*

Choerunisa Noor Syahid

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: c.runisa@gmail.com

Diterima: 20-04-2015

Direvisi: 09-06-2015

Disetujui: 15-06-2015

ABSTRACT

Today the student mobility becomes an important issue in the global dynamics. As a student, they have good qualification with their high level of education, and at the same time their access to the international labor market also open wider. However, on the other hand, based on the resources and networks that they have, they also have many opportunities to engage in the public activities, which related to social and political issues, both in their own fatherland or as a part of the world. Based on those both domain, by using historical and sociological approach, this study will observe the personal and structural aspects of the Indonesian students mobility in the Netherlands.

Keywords: *mobility, Indonesian students, higher education, the Netherlands*

ABSTRAK

Mobilitas mahasiswa adalah isu penting dalam dinamika global sekarang. Pada satu sisi, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akses mereka terhadap pasar tenaga kerja internasional sangat terbuka lebar. Sementara itu, pada sisi yang lain, dengan sumber daya dan jaringan yang dimiliki, mereka juga mempunyai peluang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik, termasuk yang berkaitan dengan persoalan sosial politik, baik yang terjadi di tanah air (Indonesia) maupun di bagian dunia lainnya. Dalam dua ranah tersebut, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi, studi ini akan meneliti aspek-aspek personal dan struktural yang melingkungi permasalahan mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda.

Kata kunci: mobilitas, Mahasiswa Indonesia, pendidikan tinggi, Belanda.

PENDAHULUAN

Studi mengenai mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda merupakan penelitan tahun terakhir dari migrasi dan kewarganegaraan orang Indonesia di Belanda sejak tahun 2010–2014, setelah sebelumnya secara berurutan membahas mengenai pekerja migran pada tahun 2010–2011, perempuan Indonesia yang menikah dengan WN Belanda pada tahun 2012, dan kaum eksil pada tahun 2013. Adapun pertimbangan memilih mahasiswa sebagai bagian dari studi ini adalah karena kelompok ini merupakan salah satu elemen penting yang menjadi simpul bagi elemen komunitas Indonesia lainnya di Belanda.

Tingginya mobilitas mahasiswa memberikan keleluasaan bagi kelompok ini untuk bergaul

dengan komunitas satu dan lainnya, tanpa terkecuali masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu pula, peran aktif kelompok ini dalam bidang sosial dan ekonomi juga menjadi perhatian penting saat ini. Seperti yang telah diketahui pula bahwa cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia dimulai sejak adanya Perhimpunan Hindia pada tahun 1908. Tak hanya isu-isu politik yang membuat mereka menyatu, namun juga bidang kesenian dan olah raga. Keduanya terbukti ampuh sebagai aktivitas non-politik yang dapat merangkul dan memikat perhatian para mahasiswa yang terpencar di berbagai wilayah Belanda. Dalam konteks kontemporer, keberadaan mereka dianggap sebagai elemen penting bagi Indonesia. Dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*

misalnya, pendidikan tinggi di luar negeri dapat memberikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara.

Pengumpulan data untuk studi ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka selama bulan Mei–Agustus 2014. Observasi dan wawancara dilakukan terhadap mahasiswa Indonesia di Belanda dan juga alumninya yang telah kembali ke Indonesia. Pemilihan narasumber dilakukan secara terarah (*purposive*), lalu berkembang berdasarkan rekomendasi dari narasumber sebelumnya. Beberapa orang di antara narasumber itu adalah pemimpin PPI.

Studi ini menjadi menarik karena keberadaan mahasiswa Indonesia di negara-negara lain cukup berbeda dengan mahasiswa Indonesia di Belanda. Sebagai salah satu pelaku utama pergerakan nasional, persatuan mahasiswa Indonesia di Belanda juga identik sebagai pembakar semangat kebangsaan sekaligus bagian dari komunitas kosmopolitan. Posisi ini menjadikan keberadaan mahasiswa Indonesia di Belanda sebagai bagian penting dengan keunikannya tersendiri. Jika pada masa lalu mereka dihadapkan pada pilihan untuk terlibat atau tidak dalam wacana dan aksi-aksi menuju kemerdekaan, sekarang mereka dimasukkan sebagai salah satu kategori penting dalam perbincangan tentang daya saing global (*global competitiveness index*). Arus pembangunan neoliberal yang menguat akhir-akhir ini memaksa pemerintah nasional memperhitungkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki sebagai salah satu alat ukur pembangunan milenium global.

Pokok permasalahan studi ini bisa didekati setidaknya dari dua tradisi akademis, yaitu kajian Indonesia dan kajian migrasi. Dalam kajian Indonesia, keberadaan mahasiswa Indonesia di Belanda dilihat tidak hanya sebagai fenomena kontemporer, tetapi terkait juga dengan hubungan kolonial Indonesia dan Belanda pada masa lalu. Studi ini mengungkapkan beberapa pengalaman mahasiswa Indonesia dalam membangun komunitas di Belanda, baik yang terbatas pada interaksi akademis maupun lebih luas lagi pada

persoalan sosial politik di tanah air mereka.

Sementara itu, dalam lingkup studi migrasi, telaah terhadap mobilitas mahasiswa internasional boleh dikatakan agak terabaikan. Ini sedikit banyak terkait dengan status mereka sendiri yang ambivalen dibanding kaum migran lainnya. Memang jika mengingat temporalitasnya, aktivitas mereka cocok dikatakan sebagai fenomena mobilitas yang bisa diterjemahkan setidaknya dalam tiga pengertian: 1) migrasi ahli; 2) produk globalisasi; dan 3) kebudayaan anak muda dan geografi konsumsi.

Rizvi (2005) dalam studinya menyampaikan bahwa mahasiswa internasional memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik karena mereka harus berhadapan dengan arus globalisasi. Hal tersebut terjadi karena adanya kekhawatiran akan ‘*brain drain*’ atau kebocoran sumber daya manusia andal bagi negara pengirim yang dominan dalam literatur pembangunan pada tahun 1970-an. Saat ini kekhawatiran tersebut tidak lagi ada, namun sekarang mereka adalah pelaku aktif ‘*brain circulation*’ atau sirkulasi sumber daya manusia andal. Adapun definisi mengenai ‘*brain circulation*’ yang dikutip dari laporan OECD dalam tulisan Mahroum (1999) ialah:

Brain exchange implies two-way flow of expertise between the sending country and the receiving country. But, where the flow is only heavy in one direction the term becomes brain gain and brain drain. Otherwise, brain waste describes the waste of expertise when a skilled migrant moves to other country which requiring expertise and experience obtained in the previous job.

Berangkat dari dua tradisi akademis tersebut, studi ini menganalisis posisi mahasiswa Indonesia di Belanda secara dialektis. Pada satu sisi mereka adalah subjek yang terikat secara politis dengan agenda-agenda nasional, tetapi pada saat yang sama mereka juga adalah individu-individu yang bebas mencari kehidupan lebih baik yang disediakan oleh pasaran kerja global. Tarik-menarik antara dua kecenderungan ini

tidak jarang menghadapkan mereka pada situasi ambivalen, tetapi justru di sini letak proses ‘*brain circulation*’-nya.

Oleh karena itu, posisi mahasiswa yang menjadi subjek penelitan ini dapat dipahami, terutama pada saat proses masa studi dan setelah usai masa studinya. Jurang antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh para alumni Belanda di Indonesia adalah narasi unik yang memperlihatkan ambivalensi pendidikan tinggi di era globalisasi. Apa yang didapatkan di bangku sekolah di negara-negara maju sering dirasa tidak berguna ketika diterapkan dalam realitas di negara-negara berkembang. Ketidakcocokan ini adalah peluang dan tantangan lebih lanjut bagi reformasi sektor pendidikan tinggi internasional.

SEJARAH PANJANG MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA

Salah satu bagian yang juga diangkat dalam studi ini ialah mengenai sejarah mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda. Sebagai bagian dari mahasiswa internasional, mahasiswa Indonesia di Belanda juga merupakan subjek globalisasi yang sangat diuntungkan oleh perkembangan dunia kontemporer sekarang ini. Pasalnya mereka dianggap memiliki status istimewa yang bisa direproduksi sebagai modal sosial dan kultural untuk mencapai kesuksesan. Status istimewa tersebut khususnya berlaku bagi mahasiswa jenjang pascasarjana, khususnya program doktoral. Secara langsung atau tidak langsung, para doktor lulusan Belanda ini telah tergabung dalam suatu komunitas global yang lebih luas. Komunitas global yang dimaksud tidak terbatas pada bidang akademis saja, namun pada bidang-bidang lain yang juga memengaruhi gelar keserjanaan mereka.

Dalam studi ini disampaikan bahwa status istimewa yang diperoleh oleh mahasiswa Indonesia di Belanda itu bukanlah fenomena kontemporer. Mahasiswa Indonesia di Belanda merupakan bagian dari subjek modern yang

telah muncul, setidaknya sejak awal abad ke-20 sebagai konsekuensi dari kebijakan ‘politik etis’ di Hindia Belanda. Istilah politik etis itu sendiri pada awalnya mengacu pada gagasan yang diajukan oleh kalangan sosial demokrat Belanda sebagai koreksi terhadap praktik kolonialisme di negara jajahan. Kalangan tersebut berpendapat bahwa orientasi kolonialisme sebaiknya diubah dari corak eksploitasi ke asosiasi. Lebih jelasnya, mengutip Locher-Scholten (1996), politik etis berisi “kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata, dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat”. Dari pengertian tersebut tersirat bahwa politik etis pada dasarnya tetap merupakan bagian dari strategi kolonial.

Politik etis adalah konsep sentral dalam studi ini. Meskipun kolonialisme telah lewat, bukan berarti politik etis otomatis hilang begitu saja. Melalui program-program bantuan pembangunan, yang di antaranya mencakup kerja sama di bidang pendidikan tinggi, gagasan itu direproduksi dalam suatu latar belakang politik baru. Memang hubungan Belanda dan Indonesia secara formal dianggap setara, tetapi arus program tersebut bersifat searah, yaitu dari Belanda ke Indonesia dan bukan sebaliknya. Dari kenyataan ini muncul penilaian yang mengaitkan itu dengan bentuk-bentuk neokolonialisme sebagaimana memuncak menjadi ketegangan pada tahun 1992 ketika Presiden Soeharto memerintahkan untuk menghentikan kerja sama dengan Belanda.

Meski demikian, perkembangan yang terjadi, baik di Belanda maupun di Indonesia akhir-akhir ini membuat relevansi gagasan politik etis dipertanyakan. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Eropa, termasuk Belanda, pada satu sisi dan kebijakan neoliberalisasi di bidang pendidikan tinggi yang besar-besaran membuat alokasi bantuan beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Belanda terhadap mahasiswa asing, termasuk Indonesia, di bidang-bidang

tertentu berkurang drastis. Di sisi lain, keputusan Pemerintah Indonesia untuk menaikkan anggaran pendidikan hingga 20% melahirkan beragam program beasiswa internasional yang melimpah. Dengan adanya hal terakhir ini kesempatan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa negara sendiri bertambah besar daripada sebelumnya.

Dengan melihat rentang sejarah yang cukup panjang, kita akan melihat suatu tegangan yang sangat hidup mengenai apa yang mereka bayangkan sebagai Indonesia sebagai tanah air mereka dan Belanda sebagai tempat mereka menuntut ilmu untuk sementara. Tegangan itu sendiri tidak berhenti seiring dengan ambruknya kolonialisme, tetapi berlanjut ke dalam suasana politik baru. Hingga akhir abad ke-19, tidak ada satu pun komunitas Indonesia yang eksis di Belanda. Oleh karena itu, bagi orang Belanda, orang Indonesia dikenal hanya dari laporan-laporan perjalanan yang ditulis oleh para pelancong, penginjil, pegawai pemerintah, lalu belakangan kalangan etnolog profesional.

Salah satu mahasiswa Indonesia angkatan pertama yang cukup menonjol adalah Abdul Rivai yang datang ke Belanda pada 1899. Bersama beberapa temannya dia menerbitkan beberapa koran berbahasa Melayu di Amsterdam. Dia lulus sebagai doktor di Universitas Gent, Belgia, pada tahun 1908. Warisan Abdul Rivai yang sangat penting adalah bukunya yang berjudul *Student Indonesia di Eropa* (Rivai 2000). Dalam buku ini Rivai melaporkan pengalamannya belajar di Eropa. Rivai juga mengkritik kebijakan Pemerintah Belanda yang semakin membatasi ruang gerak mahasiswa Indonesia sejak pertengahan tahun 1920-an.

Memasuki abad ke-20, jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda meningkat. Sebagian besar dari mereka adalah anak para raja-raja kaya dan bangsawan Jawa. Mereka dikirim ke Belanda agar bisa mempelajari bahasa Belanda dengan lebih baik, meningkatkan pengetahuan umum, dan memperoleh orientasi umum mengenai Negeri Belanda itu sendiri (Poeze 2008). Ketiga

orientasi ini adalah imajinasi yang berkembang di kalangan priyayi sebagai syarat agar mereka bisa bertahan di tengah lajur modernisasi. Secara konkret mereka harus mengikuti sekolah modern yang setara dengan orang Eropa sebagai kiblat modernitas pada waktu itu. Atas dasar inilah para bangsawan menyekolahkan anaknya ke Belanda meskipun dengan biaya sendiri.

Berbicara mengenai kiprah sosial politik mahasiswa Indonesia di Belanda, kita tidak bisa mengabaikan peranan Perhimpunan Indonesia (PI). Bahkan bisa dikatakan dari perdebatan di kalangan aktivis PI ini rumusan nasionalisme Indonesia dimatangkan. PI sendiri adalah transformasi dari Perhimpunan Hindia (PH) atau *Indische Vereeniging*. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1908 oleh sekelompok mahasiswa Indonesia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam ini mendapat dukungan penuh dari para penganjur politik etis terkemuka seperti J. H. Abendanon. Harapan yang disematkan kepada PH sesuai dengan visi dan imajinasi salah seorang pendirinya, Noto Soeroto, yang membayangkan terwujudnya suatu asosiasi antara Timur dan Barat, antara bangsa Hindia dan Belanda. Dia berpendapat bahwa keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, mereka harus dipersatukan. Timur unggul dalam hal spiritualitasnya, sementara Barat maju karena rasionalitasnya.

Orientasi PH mulai berubah menjadi lebih politis setelah tiga orang eksil politik dari Hindia tiba di Belanda pada akhir 1913. Mereka adalah Doewes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangunkusumo. Mereka mulai mempertanyakan gagasan politik asosiasi yang masih menjadi arus utama dalam organisasi PH. Namun, perubahan di tubuh PH tidak terbendung lagi sejak kedatangan angkatan baru pada awal tahun 1920-an. Yang paling terkemuka adalah Mohammad Hatta. Ia dikenal sebagai pribadi dengan karakter yang kuat dan wawasan yang luas. Dengan profilnya itu dia pun terlibat dalam berbagai pertemuan dan solidaritas para aktivis anti-kolonial di negara-negara Eropa

lainnya. Hasilnya, pada 1925 nama Perhimpunan Hindia berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (Ingleson, 1979). Tentu saja dari perubahan nama saja sudah tersirat adanya reorientasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Belanda.

Satu hal yang cukup pasti adalah bahwa sejak tahun 1950-an nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda telah muncul meski kapan persisnya berdiri masih menjadi perdebatan. Kondisi mahasiswa Indonesia di Belanda pada dekade 1950-an dipotret oleh Gunawan (1966) dalam *Indonesische Studenten in Nederland*. Pokok penyelidikan Gunawan adalah soal interaksi sosial di antara sesama mahasiswa Indonesia dan antara mahasiswa Indonesia dengan masyarakat Belanda. Menjelang akhir tahun 1950-an hubungan Belanda-Indonesia memanas, terkait soal Irian Barat yang belum selesai. Presiden Soekarno menagih janji Belanda dalam Konferensi Meja Bundar untuk mengembalikan Irian Barat. Namun, janji itu tidak dipenuhi. Meski persoalan diplomatik ini tidak terlalu memengaruhi kehidupan sehari-hari mahasiswa Indonesia di Belanda, kegiatan PPI secara resmi dibekukan. Ini terjadi karena posisi PPI dalam urusan politik mengikuti persis garis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1963 PPI Belanda kembali dibangkitkan seiring dengan pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Hingga pertengahan 1966 PPI Belanda tetap mendukung kepemimpinan Soekarno untuk menuntaskan masalah itu. Kata-kata seperti ‘revolusi belum selesai’ masih kerap muncul dalam penerbitan-penerbitan mereka.

Sejak pemerintahan Orde Baru di Indonesia berkuasa, kiprah sosial politik mahasiswa Indonesia di Belanda meredup. Sejak saat itu, kegiatan PPI sebagian besar dialokasikan untuk acara-acara sosial dan kesenian. Meski demikian, pada akhir tahun 1970-an, beberapa aktivis PPI Belanda dan Amsterdam pernah bekerja sama dengan PPI Berlin dalam menerbitkan *Berita Indonesia* yang isinya cukup kritis terhadap

Pemerintahan Soeharto. Akibat dari sikap kritis mereka, beberapa aktivisnya dipersulit saat akan pulang maupun berkegiatan di Indonesia.

Di beberapa PPI kota, kegiatan diskusi bertema politik masih kerap dilakukan. PPI Leiden dan Den Haag adalah yang paling aktif. Penyebabnya adalah karena di kedua kota itu terdapat banyak mahasiswa ilmu-ilmu sosial atau berlakang aktivis. Sekarang kiprah itu lebih sering diimplementasikan dalam aksi solidaritas kemanusiaan.

BEASISWA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Bantuan pendidikan atau beasiswa adalah isu krusial yang telah dibahas oleh para penganjur politik etis sejak awal abad ke-20. Mereka berpendapat bahwa para mahasiswa dari Hindia perlu mendapatkan bantuan keuangan sebab kalau tidak, hanya anak-anak bangsawan saja yang bisa bersekolah ke Belanda. Pada masa itu bantuan diperoleh dari subsidi pemerintah dan sumbangan pribadi. Politik etis yang bergulir sejak awal abad ke-20 di Indonesia telah memikirkan cara agar para pelajar dan mahasiswa pribumi bisa mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk kesempatan agar mereka bisa meneruskan studi ke Belanda. Pada tahun-tahun antara 1945–1950, Pemerintah Belanda masih memberikan bantuan bagi mahasiswa Indonesia yang kesulitan biaya keuangan. Hiruk pikuk revolusi di Indonesia memang berpengaruh, tetapi tidak membuat kontak-kontak di bidang pendidikan putus begitu saja. Pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto membawa perubahan berarti bagi hubungan Indonesia-Belanda. Orientasi pembangunan Orde Baru Soeharto yang berkiblat ke Barat membuka pintu lebar bagi masuknya dana asing.

Pasca-reformasi, Indonesia kini telah mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya ialah kesempatan yang diberikan untuk mengenyam pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Hal ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya di mana hanya

kalangan *elite* saja yang memiliki materi lebih yang dapat bersekolah ke luar negeri. PPI Belanda pada tahun 2014 menyatakan bahwa mayoritas sumber finansial mahasiswa *bachelor* adalah orang tua (95%). Hal ini berbanding terbalik dengan master dan doktor di mana beasiswa/sponsor dominan, yaitu 82% untuk master dan 95% untuk doktor. Secara keseluruhan, 65% mahasiswa mendapatkan finansial dari beasiswa dan 30% mahasiswa dari orang tua.

Fenomena ini turut didukung oleh sejumlah lembaga donor pemberi beasiswa, baik nasional maupun internasional. Tujuan utama pemberian dana beasiswa tersebut tentunya menjadi pacuan bagi generasi muda Indonesia untuk berlomba mendapatkan kesempatan emas itu. Tak hanya itu, cara ini juga merangsang tingkat pertumbuhan daya saing bagi Indonesia, khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Merujuk pada data *Global Competitiveness Index 2014–2015*, disampaikan bahwa Indonesia saat ini berhasil menduduki peringkat ke-34 dari 144 negara di seluruh dunia. Jika dibanding dengan negara di Asia Tenggara lain, posisi Indonesia dapat dikatakan berada di tengah-tengah. Namun, dibanding dengan negara tetangga terdekat, seperti Singapura dan Malaysia, kedudukan Indonesia masih jauh lebih rendah dari keduanya. Singapura menduduki peringkat kedua dan Malaysia berada di peringkat ke-20. Penilaian yang dilakukan dalam proses perhitungan tingkat daya saing didapatkan berdasarkan 12 pilar penilaian dasar yang telah ditentukan oleh lembaga ini.

Pilar pertama sampai dengan pilar keempat merupakan faktor utama untuk sebuah negara dinyatakan masuk ke dalam penilaian *The Global Competitiveness Index 2014–2015*. Bagian ini disebut sebagai faktor pendorong ekonomi (*key for factor-driven economies*). Bagian selanjutnya ialah *efficiency enhancers*, yaitu faktor-faktor yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat melengkapi dalam mendorong efisiensi dalam perekonomian. Agar masuk dalam bagian kedua ini, sebuah negara harus memiliki pilar nomor lima sampai dengan sepuluh. Bagian

terakhir merupakan bagian *innovation and sophistication index* yang berisi dua pilar pendorong untuk mendorong inovasi dari sebuah negara. Berdasarkan penentuan tahapan menuju negara berdaya saing, Indonesia kini berada pada tahap kedua, yaitu *efficiency enhancers*.

Dalam laporan *The Global Competitiveness Index 2014–2015*, dinyatakan bahwa daya saing atau *competitiveness* diartikan sebagai penentuan produktivitas dari sebuah negara yang diukur berdasarkan kemampuan dalam mendayagunakan institusinya, kebijakan-kebijakan, dan juga faktor-faktor lain yang menentukan produktivitas¹. Lebih lanjut dalam laporan *The Global Competitiveness Index 2014–2015* disampaikan pula bahwa level produktivitas sering kali diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penting lain yang juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas sebuah negara tidak hanya dilihat dari *level of income* saja, namun juga dari faktor penting lainnya, yaitu *growth potential* sebuah negara.

Berdasarkan kedua belas pilar yang disajikan oleh *The Global Competitiveness Index 2014–2015*, terlihat bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing sebuah negara. Lebih lanjut dalam tahapan kedua, pilar utama yang perlu dibangun ialah pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Hal tersebut memberikan arti yang cukup tajam bahwa pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas.

Tuntutan baru yang saat ini dihadapi negara-negara dalam era globalisasi kini ialah bagaimana menciptakan tenaga kerja yang *well-educated*. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan intelektualitas tinggi menjadi syarat penting sekaligus senjata untuk bersaing dengan negara lain. Melalui pendidikan tinggi yang telah dimiliki

¹ Dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf dari pernyataan asli: “*competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country*”.

oleh seorang individu, sangat diharapkan individu tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapinya pada masa mendatang. Individu tersebut juga diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan dan tugas-tugas yang kompleks dengan hasil kinerja yang baik.

Pemberian kesempatan melalui beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri ialah agar mereka dapat belajar secara langsung. Harapan yang besar disematkan agar proses belajar yang dialami dapat membuahkan berbagai temuan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing negaranya. Selain itu, diharapkan pula bahwa strategi efektif dari negara maju agar Indonesia mampu bersaing dapat ditularkan. Jika hal ini terjadi, Indonesia akan mengalami suatu tahapan penting dalam meningkatkan daya saing. Namun, jika pemerintah tidak siap mengelola sumber daya manusianya, ancaman baru pun bersiap untuk timbul.

Ketidakpuasan atas keberadaan negara dalam membuktikan eksistensi diri para pelajar yang kembali merupakan ancaman yang paling besar. Untuk itu, diperlukan kehadiran negara agar mampu mengayomi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah melalui penguatan jaringan yang dimiliki oleh para mahasiswa agar ada sarana untuk berkontribusi secara nyata dan langsung terkait ilmu pengetahuan yang digeluti. Selain itu, pemerintah juga dapat menyinkronisasikan kebutuhan negara melalui rencana strategis (renstra) yang hendak dicapai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, kebutuhan tenaga ahli dapat sejalan dengan kebutuhan strategis negara serta tidak menghasilkan SDM yang sia-sia.

KESIMPULAN

Seiring dengan berlalunya kolonialisme, kiprah politik mahasiswa Indonesia memang mengalami pasang surut, tetapi dapat dipastikan tidak pernah hilang sama sekali. Beberapa waktu

yang lalu, PPI Belanda sempat mengkritik dan mempertanyakan dengan kritis kegiatan studi banding yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia ke Belanda. Hal tersebut membuktikan bahwa perhatian mereka masih besar terhadap apa yang terjadi di negaranya. Tak hanya itu, para mahasiswa Indonesia di Belanda ini juga berperan aktif dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi. Sejak awal berdirinya PPI, dapat terlihat bahwa tidak semua mahasiswa berminat dengan isu-isu politik, mereka juga bergerak di bidang kesenian dan aktivitas-aktivitas non-politik. Aktivitas non-politik yang dilakukan antara lain olahraga yang menjadi kegiatan penting dalam merangkul perhatian mahasiswa yang terpecah. Mereka mencoba menghubungkan dan membentuk komunikasi dengan komunitasnya bahkan dengan sesama orang Indonesia di Belanda.

Mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda juga mempunyai arti penting bagi Pemerintah Indonesia. Dalam konteks kontemporer, keberadaan mereka adalah penunjang penting pencapaian daya saing nasional di tingkat global, termasuk apa yang disebut *Millenium Development Goals (MDGs)*. Menyadari hal tersebut, pemerintah berusaha memfasilitasi proses ini dengan menyediakan beasiswa yang memungkinkan warga negaranya untuk melanjutkan studi ke kampus-kampus terbaik dunia. Tujuannya adalah memacu daya saing negara melalui pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara teoretis, politik etis yang ada saat ini dapat dikatakan berubah bentuk. Jika sebelumnya politik etis tersebut berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik kolonialisme di negara jajahan, kini dengan skema yang berbeda corak eksploitasi menjadi berubah. Berbagai skema bantuan pendidikan disiapkan dan subsidi pendidikan banyak disampaikan. Namun dengan adanya hal tersebut, politik etis yang ada saat ini tetap menuntut Indonesia, terutama mahasiswa Indonesia di Belanda, untuk membawa negaranya masuk ke dalam indeks globalisasi

yang dikompetisikan. Secara bersamaan pula, hal tersebut menciptakan ketergantungan yang cukup kuat dari Indonesia kepada Belanda atau negara maju lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basak, B. (2009). *Lost in Status? Temporary, Permanent, Potential, Highly Skilled: The International Student Mobility*. Bielefeld: COMCAD.
- Gunawan, B. (1966). Indonesische Studenten in Nederland. *Disertasi Amsterdam 1966*, VII, 182 pp. Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage.
- Ingleson, J. (1979). *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927–1934*. Heinemann for the Asian Studies Association of Australia, Singapura. Innis.
- Locher-Scholten, E. (1996). *Etika Yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877–1942*. Djambatan: Jakarta.
- Mahroum, Sami. (1999). Highly-skilled globetrotters: the international migration of human capital. In OECD, *Mobilizing Human resources for Innovation-OECD Workshop on Science and Technology Labor Markets*. Diakses dari http://www.oecd.org/disti/sti/s_t/inte/prod/human_resources.htm, pada 20 February 2010.
- Patoppang, J.I. (2009). *Bhinneka Tunggal Ika: The Indonesian communities in the Netherlands 1950–2000*. Tesis MA. Leiden University.
- Poeze, H. (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600–1950)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rizvi, F. (2005). International education and the production of cosmopolitan identities. *RIHE International Publication Series 9*.
- Rivai, Abdul. (2000). *Student Indonesia di Eropa*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Schwab, K. (ed). (2014). *The Global Competitiveness Report 2014–2015. Insight Report for 2014 World Economic Forum*. Diakses dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf pada tanggal 3 April 2014.
- (2011). Theorizing student mobility in an era of globalization. *Teachers and Teaching: Theory and Practice* Vol. 17, No. 6, December.
- Stutje, K. (2013). *Indonesian Identities Abroad: International Engagement of Colonial Students in the Netherlands, 1908–19311*. *BMGN-Low Countries Historical Review*, Volume 128–1.

TINJAUAN BUKU

KRITIK TERHADAP MODERNITAS¹

DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT

Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer: California: Stanford University Press, 2002

Abdul Fikri Angga Reksa

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: fikrianggareksa@gmail.com

Diterima: 08-04-2015

Direvisi: 30-04-2015

Disetujui: 09-06-2015

PENDAHULUAN

Dialectic of Enlightenment merupakan buku hasil kolaborasi karya Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer. Buku ini menjadi salah satu *masterpiece* dalam disiplin ilmu sosial karena memiliki pengaruh cukup besar, terutama terhadap perkembangan teori-teori kritis. Secara garis besar, buku yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1944 ini memuat kritik Adorno dan Horkheimer terhadap modernitas. Adorno dan Horkheimer menunjukkan sikap intelektual yang kritis terhadap gagasan pencerahan di Eropa yang menurut mereka mengalami kebuntuan. Hal tersebut membuat teori yang dikemukakan Adorno dan Horkheimer itu menjadi populer di kalangan ilmuwan sosial. Bahkan di era kemajuan teknologi seperti sekarang, relevansi teori-teori Adorno dan Horkheimer masih dibicarakan oleh para akademisi, terutama yang fokus pada bidang *cultural studies*. Untuk itu, tulisan ini berusaha memaparkan kritik terhadap modernitas menurut Adorno dan Horkheimer serta menganalisis teori tersebut dari sudut pandang budaya populer di Indonesia yang sedang berkembang pesat.

Terminologi pencerahan pertama kali diungkapkan oleh Immanuel Kant melalui esainya berjudul *Was It Aufklarung* (1784). Menurut Kant, pencerahan merupakan pembebasan

manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri (Agger 2003: 11). Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk mempergunakan pemikirannya sendiri karena terdapat otoritas di luar diri seperti tradisi, dogma agama, ataupun negara yang memengaruhi. Dengan demikian, pencerahan harus dipahami sebagai suatu proses sekaligus kesadaran untuk mencapai kedewasaan dengan cara berani menggunakan rasio sendiri.

Bagi Adorno dan Horkheimer, pencerahan pada tingkatan idealitasnya dapat diartikan sebagai kemajuan pemikiran yang ditujukan kepada manusia untuk membebaskan diri dari rasa takut dan membentuk mereka menjadi mandiri dalam pengetahuan (Adorno dan Horkheimer 2002: 2). Sayangnya, pencerahan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Adorno dan Horkheimer berargumen bahwa filsafat Pencerahan telah perlahan menutup diri terhadap realitas luar dan makna yang terkandung di dalamnya. Alhasil, Pencerahan yang semula dipandang sebagai kemajuan dari cara pandang mitologis telah bertransformasi menjadi mitos itu sendiri. Kemudian mitos itu pula yang menghasilkan penindasan dan penguasaan manusia yang satu terhadap yang lainnya. Gagasan tersebut dituliskan dalam bab pembukaan, "Mitos dan Pencerahan" (Adorno dan Horkheimer 2002: 36 -38).

¹ Makalah disampaikan pada Seminar *In House Training* (IHT) P2SDR LIPI, *Industri Budaya dalam Perspektif Adorno dan Horkheimer*, tanggal 11 Maret 2015.

Secara ideologis, gagasan Adorno dan Horkheimer dipengaruhi perspektif Karl Marx. Namun, mereka tidak serta merta menerima perspektif Marx, melainkan juga mengajukan kritik yang lebih kompleks. Jika Marx hanya memfokuskan pada ranah kapitalisme, Adorno dan Horkheimer mengkaji lebih banyak unsur-unsur di luar kapitalisme, seperti kesinambungan alam, kemanusiaan, dan teknologi. Mereka mengkritik dominasi filsafat barat karena lebih mementingkan kemajuan teknologi dan rasionalisasi tanpa ada pihak yang mengatur seperti pemerintah atau dogma agama. Akibatnya, muncul segregasi kepemilikan sumber daya alam. Pihak yang berkuasa atau pemilik modal pada saat yang bersamaan tidak hanya mengambil alih kekuasaan terhadap alam, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Manusia tidak lagi dianggap berharga layaknya ketidakadilan kepemimpinan Nazi di Jerman terhadap kelompok minoritas.

Pada sisi lain, Adorno dan Horkheimer tidak menafikan produktivitas ekonomi yang signifikan yang terjadi pada masa itu (Damascenus 2015). Namun, kemajuan ekonomi itu lantas tidak mengantarkan kondisi masyarakat dan pemilik modal yang ekuilibrium. Pada konteks permasalahan ini, ekuilibrium dimaknai sebagai suatu kondisi dua kelas (borjuis dan proletar) yang meskipun berbeda atau berlawanan, tetap saling berpengaruh dan dapat bertahan dalam titik stabil (Dewi 2015: 3). Kemajuan ekonomi justru memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok sosial tertentu (borjuis) untuk mengendalikan keuntungan yang tidak proporsional atas seluruh penduduk. Sebagai hasilnya, individu menjadi sepenuhnya tidak berdaya menghadapi kekuatan ekonomi. Manusia bukan lagi dipandang sebagai subjek, tetapi sebagai objek untuk mencapai tujuan-tujuan kapitalisme. Dalam kondisi tersebut tentu saja pemilik modal lebih banyak diuntungkan dibandingkan penduduk lainnya.

BUDAYA SEBAGAI KOMODITAS

Apabila dirunut sejarahnya, Adorno dan Horkheimer memulai konsep metode berpikir

kritis sejak tahun 1930-an (Bertens 2002: 194). Konsep *critical* ditulis oleh Horkheimer, tepatnya pada tahun 1937, dalam esai yang berjudul *Traditional and Critical Theory*. Dalam esainya tersebut, Horkheimer memaparkan konsep *critical* sebagai teori yang dikonstruksi dengan cara mempertentangkannya dengan teori yang sudah ada dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Melalui teori kritis, Adorno dan Horkheimer menyampaikan kritik terhadap pendekatan ilmu sosial barat yang positivistik¹.

Pada waktu tersebut, mereka menilai bahwa hasil riset para pemikir barat tidak dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana mestinya. Hasil riset justru dimanfaatkan untuk memuluskan kebutuhan perusahaan dalam meraup keuntungan. Bahkan, hasil riset sering digunakan untuk mempertahankan *status quo* politik dalam dan luar negeri Pemerintah Amerika Serikat. Mereka menyebut alat-alat hegemoni tersebut sebagai industri budaya. Adorno sengaja menggunakan konsep industri budaya supaya tidak bias dengan budaya yang secara spontan dan murni datang dari massa. Industri budaya sebagai industri telah memproyeksikan budaya melalui alat reproduksi mekanis untuk tujuan memelihara dominasi atas massa.

Konsep industri budaya muncul berdasarkan pengalaman keduanya sebagai emigran Jerman yang bermukim di Amerika Serikat. Mereka menjelaskan konsep industri budaya untuk mengkritik nasib kemanusiaan dalam kapitalisme yang sama buruknya dengan kekejaman Nazi di Jerman terhadap kaum minoritas, seperti penganut Yahudi, kaum gipsi, *gay*, dan lesbian. Dijelaskan pula di buku tersebut bahwa Adorno bersama para anggota Mazhab Frankfurt yang berada di Amerika menyaksikan secara langsung situasi di Amerika pada waktu tersebut yang sarat

¹ Positivistik merupakan aliran filsafat Barat yang berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya, August Comte. Pandangan positivistik sangat menitikberatkan metodologi dalam refleksi filsafatnya. Positivistik menempatkan metodologi ilmu-ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, yaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan (Hardiman 2003: 54–55).

dengan budaya massa, tetapi minim intervensi dari pemerintah. Budaya massa berupa film, musik, radio, televisi, dan lainnya dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan negara. Hal tersebut menyebabkan munculnya budaya massa yang dikomersialkan khas masyarakat kapitalis.

Adorno dan Horkheimer kemudian mengembangkan diskusi tentang industri budaya yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubungan produksi kapitalis. Menurut mereka, industri budaya berkorelasi dengan anti-pencerahan karena secara terselubung mengekang rasio manusia melalui instrumen modal dan teknologi. Jika tujuan utama pencerahan untuk membebaskan manusia dari mitos dan untuk menjamin kebebasan individu untuk berpikir, industri budaya hanya membawa manusia pada penindasan dan dominasi. Melalui alat berupa modal dan teknologi, industri budaya telah menghambat perkembangan individu yang otonom dan mandiri yang menilai dan memutuskan secara sadar untuk diri mereka sendiri.

Kapasitas untuk berpikir secara rasional telah diinstrumentalisasi untuk mempertahankan *status quo* dan kekuasaan mereka yang memegang kontrol dan juga untuk mendominasi bumi dan alam. Manusia dalam industri budaya dilihat sebagai *massa* dan *modal* untuk mengakumulasi kekayaan mereka yang secara ekonomi paling kuat. Manusia pun diobjekkan sebagai modal dalam bentuk konsumen dan pekerja. Budaya dalam kondisi seperti ini menjadi ideologi untuk mendominasi alam dan manusia. Kondisi tersebut tidak memungkinkan masyarakat untuk bisa berpikir secara dialektis dan logis.

Investigasi Horkheimer dan Adorno terhadap industri budaya didorong oleh observasi mereka atas nasib budaya dalam relasi budaya kapitalis. Tesis industri budaya dibangun dengan pemahaman tentang proses komodifikasi budaya atau seni dalam konteks kapitalisme. Menurut kedua filsuf ini, fitur-fitur seperti hiburan

dan tragedi dibuat seakan-akan seperti seni. Padahal seni yang serius menentang keberadaan dan memprotes bentuk-bentuk realitas yang tereifikasi. Namun, industri budaya tidak memiliki potensi resisten (Adorno & Horkheimer 2002: 102). Industri budaya sekadar mengimitasi gaya seni murni untuk dilihat sebagai seni. Dengan absennya antitesis dan otonomi untuk melampaui dunia yang tereifikasi, seni dan budaya hanya menjadi perpanjangan dari realitas, mereproduksi kebohongan, dan menghancurkan kebenaran (Adorno & Horkheimer 2002: 102–103). Ini menyebabkan budaya dan seni tunduk terhadap totalitas industri budaya (Subijanto 2013).

Adorno berpendapat bahwa industri budaya mengakibatkan perubahan dalam karakter seni. Budaya dalam industri budaya adalah komoditas paradoks yang melunturkan nilai-nilai seni. Budaya menjadi industri karena lebih mementingkan keuntungan besar daripada meminati nilai sebagai bentuk kritis dan kebebasan manusia. Seni telah menjadi komoditas dalam pasar yang berarti seni tidak lagi dipandang sebagai *high culture*, tetapi *low culture*. Akibatnya, nilai-nilai artistik seni direduksi sehingga menjadi komersial. Produksi budaya mengalami perubahan dari nilai-nilai guna menjadi nilai tukar yang berarti semua produksi budaya hanya memiliki nilai sejauh itu bisa ditukar, tidak sejauh itu adalah sesuatu dalam dirinya sendiri.

Bahkan, manifestasi estetika menunjukkan pemahaman yang sama di setiap lapisan masyarakat. Semua budaya massa di bawah monopoli telah dibentuk sedemikian rupa untuk mengonstruksi persepsi masyarakat. Mereka yang memonopoli tidak lagi mengalami banyak kesulitan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Radio dan film yang sebelumnya merepresentasikan diri mereka sebagai seni kini tidak lagi menampilkan diri mereka sebagai seni (hlm. 94). Produk radio dan televisi tidak lain hanyalah usaha yang digunakan untuk melegitimasi industri budaya yang sengaja diproduksi penguasa.

ALIENASI DAN PENINDASAN

Konsep industri budaya yang diperkenalkan Adorno dan Horkheimer telah menjadi isu utama di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang. Industri seni, baik di radio, televisi, layar lebar, internet, maupun media massa lainnya pada kenyataannya memang semakin berkembang dan digandrungi masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika industri di bidang seni dipandang sebagai usaha yang mendatangkan keuntungan. Atas nama seni, mereka yang memiliki modal berusaha mengakomodasi berbagai pertunjukan yang terkadang berbiaya mahal. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah industri budaya itu selalu berkonotasi negatif dan memiliki tujuan kapitalisasi 'terselubung' seperti yang diungkapkan Adorno dan Horkheimer.

Pencerahan melalui industri budaya terus-menerus menciptakan kesadaran palsu tentang dunia di sekitar masyarakat berdasarkan mitos dan distorsi yang sengaja ditanamkan oleh penguasa. Mereka yang memiliki modal secara tidak langsung menghegemoni sudut pandang masyarakat terhadap budaya untuk mengonsumsi kenikmatan semu. Hal itu termasuk jenis kapitalisme yang dimodifikasi sehingga konsumen bersedia membeli atau mengonsumsi industri budaya tersebut dan larut dalam keterasingan. Parahnya, kebanyakan masyarakat kesulitan untuk melepaskan diri dari arus kapitalisme yang diproduksi atas nama industri budaya.

Melalui industri budaya berupa seni, manusia dibuat seolah-olah mati suri hingga terjebak dalam arus fetisisme komoditas (Adorno dan Horkheimer 2002: 128). Maksudnya, di bawah kondisi-kondisi kapitalis, seni menjadi satu bentuk pekerjaan yang teralienasi karena seni berubah status menjadi komoditas dalam pasar (Soetomo 2003: 32). Para pekerja seni sekarang dilukiskan seperti halnya para buruh yang dibayar. Sementara itu, manusia telah dipaksa berpartisipasi aktif untuk mengikuti produk budaya massa. Sebagai balasannya, mereka akan

mendapatkan kepuasan dan kebanggaan. Namun, tanpa disadari pada saat itulah mereka hanya mengalami euforia semu dan kesadaran palsu. Manusia dijebak dan dikurung dalam lingkaran pemujaan sehingga mereka menjadi pasif, lemah, dan rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi. Hal tersebut merupakan keberhasilan konspirasi kapitalisme lewat budaya populer (Hardiman 2003: 34).

Masyarakat sebagai konsumen industri budaya mendapat pengaruh yang sering kali berada di luar nalar. Masyarakat menikmati suatu produk budaya sebagai representasi kehidupan nyata. Melalui produk budaya yang ditayangkan, masyarakat bisa merasakan emosi dan empati yang sama sehingga masyarakat menjadi penonton yang kehilangan nalar kritisnya. Bahkan kebanyakan warga masyarakat terhanyut dalam euforia. Mereka terjebak dalam fanatisme yang berlebihan terhadap suatu karakter atau tokoh yang diproduksi oleh budaya industri. Beberapa di antaranya juga menghabiskan waktu luangnya demi menikmati produk-produk industri budaya tersebut.

Melalui anti-tesisnya terhadap pencerahan, Adorno dan Horkheimer berharap kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan kembali kepada kemandirian akal budi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui resistensi terhadap kapitalisme meskipun sangat minim tingkat keberhasilannya. Seharusnya, lanjut Adorno, kekuatan resistensi terhadap kapitalisme berada di dalam seni, khususnya seni modernis *avant-garde*. Bagi Adorno, seni di satu sisi merupakan fakta social, tetapi di sisi lain ia juga bersifat otonom dari masyarakat. Dengan kata lain, pada satu sisi seni dipengaruhi oleh masyarakat. Akan tetapi, pada sisi lain, ia bersifat independen. Pada konteks ini Adorno dipengaruhi oleh Kant yang mengatakan bahwa keindahan adalah *purposiveness without purpose*, yakni kerja seni bertujuan untuk membuat artefak-artefak bagi manusia.

INDIE SEBAGAI BUDAYA TANDINGAN

Industri hiburan di beberapa negara di Asia meningkat drastis, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut data BPS, sepanjang 2010–2013 terjadi peningkatan jumlah usaha industri musik dari 14,9 ribu unit usaha menjadi 15,6 ribu usaha (*kompas.com* 2014). Begitu pula dengan industri televisi dan radio yang ditandai dengan mengorbitnya saluran televisi lokal di berbagai daerah. Pesatnya pengguna internet juga berimplikasi pada industri hiburan model baru dengan memanfaatkan situs jejaring sosial. Apabila dahulu masyarakat hanya bisa membaca melalui bentuk fisik berupa buku, koran, dan majalah, kini mereka bisa menikmati kebudayaan dari genggamannya lewat *gadget* canggih.

Di tengah era kecanggihan teknologi dan perkembangan informasi, semakin banyak produk budaya yang ‘dijual’ secara terang-terangan. Selama 24 jam stasiun televisi berlomba-lomba menyediakan program menarik untuk merebut hati jutaan pemirsa demi sebuah *rating* atau *share* yang fantastis. Industri musik pun berjalan tidak lagi sesuai dengan idealisme musisinya, melainkan ada mekanisme pasar yang dibentuk oleh pemodal dan wajib dipenuhi. Begitu pula dengan dunia layar lebar yang cenderung lesu apabila tidak mengikuti selera konsumen. Semua hal tersebut dilakukan tidak lain demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir pemilik modal yang bergerak di industri hiburan.

Tidak jauh berbeda, industri media pun mengalami kecenderungan senada. Sebuah film dokumenter berjudul *Di Balik Frekuensi* (2013) secara tegas menyebutkan fakta bahwa sebenarnya di Indonesia hanya ada 12 korporasi media yang mengakomodasi ribuan format media yang ada. Mirisnya, pemilik 12 grup media tersebut berasal dari 5 orang yang sebagian besar berafiliasi dengan partai politik. Fakta tersebut bisa menyebabkan munculnya keraguan masyarakat terhadap media

massa. Oleh masyarakat, media massa dianggap tidak bisa mempertahankan independensinya bahkan menjadi senjata untuk meraih jabatan politik.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa konsep industri budaya Adorno dan Horkheimer semakin menguat dalam derasnya industri hiburan yang berkembang sporadis di Indonesia. Tanpa disadari, masyarakat menjadi sekadar objek yang tidak berarti, namun dimanfaatkan menjadi ladang keuntungan bagi pemilik modal. Hal itu disebabkan untuk memenuhi kebutuhan industri budaya tersebut sehingga masyarakat harus mengeluarkan sejumlah biaya meskipun pada kenyataannya masyarakat mengabaikan sisi material tersebut.

Namun, yang patut diperhatikan adalah seiring dengan meningkatnya jumlah industri hiburan, semakin terbuka pula ruang publik untuk mewadahi masyarakat yang benar-benar menghargai seni dalam arti sesungguhnya (*high culture*). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsep industri budaya yang ditawarkan oleh Adorno dan Horkheimer melupakan sisi resistensi. Pada masa kini yang disebut tahap kapitalisme lanjut, masyarakat cenderung tidak mau diperbudak oleh industri. Terbukti dengan munculnya berbagai komunitas independen atau disebut indie² yang menjadi tandingan dari budaya industri. Ruang independen ini sesuai dengan konsep yang diajukan oleh murid dari Adorno di Sekolah Frankfurt, Jurgen Habermas (1982) tentang *public sphere*.

Hasil kebudayaan indie ini sangat familiar di industri seni musik dan film. Bahkan, komunitas indie berhasil menciptakan ruang sendiri di luar ruang *mainstream* yang ada. Misalnya dalam

2 Independen atau sering disingkat menjadi indie dapat dartikan sebagai bebas, merdeka, atau berdiri sendiri (*kbbi.web.id* 2014). Dalam terminologi industri budaya, indie merupakan gerakan dari suatu kelompok subkultur yang menjadi tandingan dari budaya *mainstream*. Bentuk budaya indie biasanya diaplikasikan dalam bentuk seni musik, film, media massa, dan produk budaya lainnya. Indie juga berarti mengutamakan proses kreatif, mulai dari produksi hingga distribusi.

bidang seni musik di Indonesia yang banyak memunculkan musisi indie. Para musisi indie yang kesulitan menembus industri membangun label rekaman independen sendiri. Dengan idealisme bermusik yang terbilang berbeda, musisi indie memberikan pilihan kepada masyarakat. Kendati penikmat musisi indie tidak sebanyak musisi *mainstream*, musisi indie tetap bisa eksis lantaran tujuan bermusik mereka tidak didasarkan pada materi. Beruntungnya, saat ini mulai berkembang label rekaman yang mulai berpihak pada musisi indie.

Komunitas indie juga berkembang di ranah seni lainnya. Bahkan saat ini produk budaya massa seperti media massa dan buku mengikuti proses indie. Mereka mulai membebaskan diri dari perspektif industri budaya dan membuat perspektifnya sendiri. Salah satu contoh konkretnya adalah dengan munculnya penerbit dan media yang dikelola oleh seorang idealis serta mewadahi karya-karya yang idealis pula. Dalam hal distribusi pun mereka melakukannya sendiri dengan modal pribadi. Idealnya, jalur indie memang tidak menjanjikan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti industri sebab indie mementingkan proses berpikir kreatif dan kebebasan berekspresi.

Harus diakui bahwa teknologi internet memegang peranan penting dalam eksistensi komunitas indie. Ditambah dengan perkembangan sosial media yang cukup pesat di Indonesia. Sebuah karya seni musik, film, atau seni rupa bisa dengan mudah menyebar secara viral. Belakangan ini banyak pula dilihat festival atau pertunjukan khusus untuk seniman indie. Hal itu dapat dikatakan sebagai kemajuan berpikir atau suatu kebebasan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian, tesis Adorno dan Horkheimer yang menyatakan dibutuhkannya intervensi dari institusi seperti pemerintah atau lembaga agama untuk mengembalikan hakikat manusia seutuhnya terbantahkan. Pada masa kini, manusia memiliki kemampuan dan kemampuan dalam menentukan rasionalitas mereka pribadi.

PENUTUP

Tidak bisa dimungkiri, pemikiran Adorno dan Horkheimer yang tertuang dalam buku *Dialectic of Enlightenment* merupakan gagasan fenomenal. Mereka telah memberikan sumbangan perspektif baru dalam bidang ilmu sosial sehingga buku tersebut masih menjadi bahan diskusi sampai sekarang. Meski demikian, teori-teori yang dikemukakan Adorno dan Horkheimer terbatas oleh dimensi waktu. Teori Adorno dan Horkheimer memang cukup relevan pada masanya, tetapi tidak menemukan konteksnya karena Adorno dan Horkheimer banyak mengkritik permasalahan sosial yang relevan pada saat itu, namun tidak memberikan solusi yang cukup memadai. Pemikiran Adorno dan Horkheimer yang dengan keras mengkritik modernitas justru bisa menyebabkan manusia sulit menerima hal-hal baru.

Penolakan Adorno dan Horkheimer terhadap gagasan Pencerahan menjadi tidak relevan di era kemajuan teknologi dan padatnya arus informasi. Pada kenyataannya, manusia kekinian telah memiliki kemerdekaan untuk mengutarakan gagasannya masing-masing. Mengenai produk budaya industri, saat ini telah bermunculan subkultur atau budaya tandingan yang memberikan ruang untuk berpikir secara dialektis dan logis. Subkultur tersebut sering kali menghasilkan produk budaya yang dinilai lebih bernilai seni. Subkultur juga bersifat resisten dan konstruktif terhadap suatu kebijakan di berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menjamin keberlangsungan kebebasan individu dalam mengungkapkan aspirasinya. Intervensi pemerintah tersebut penting mengingat dalam kondisi masyarakat yang dinamis tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan terhadap karya seni tertentu, terutama karya seni yang rentan bersinggungan dengan adat istiadat atau agama. Walaupun demikian, pemerintah diharapkan tidak membatasi konten-konten seni yang ditampilkan individu sebagai bentuk apresiasi terhadap kebebasan berekspresi.

PUSTAKA ACUAN

- Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. California: Stanford University Press.
- Agger, B. (2003). *Critical Social Theories: An Introduction* (Penerjemah Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bertens, K. (2002). *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damascenus, Y. (2015). Kebudayaan sebagai Ideologi dalam Marxisme. Diakses dari <http://kompasiana.com/post/read/705563/2/kebudayaan-sebagai-ideologi-dalam-marxisme.html> pada 25 Februari 2015.
- Dewi, S. (2015). *Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*. Tangerang: Matjin Kiri.
- Hardiman, B. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Novianti, S. 2014. Menpar: Ini Kunci Peningkatan Industri Kreatif. Diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2014/11/13/125158127/Menpar.Ini.Kunci.Peningkatan.Industri.Kreatif> pada 25 Februari 2015
- Setiawan, E. 2014. Independen. Diakses dari <http://kbbi.web.id/independen> pada 25 Februari 2015.
- Smith, P. & Riley, A. (2009). *Cultural Theory: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Soetomo, G. (2003). *Krisis Seni Krisis Kesadaran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subijanto, R. (2013). *Jurnal Indoprogres: Rangkaian Kritik Terhadap Tiga Pendekatan Kritis Kajian Budaya*. Diunduh dari <http://indoprogres.com/2013/05/rangkaian-kritik-terhadap-tiga-pendekatan-kritis-kajian-budaya-bag-3-habis/>

